

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP NO. 5 TAHUN 2013
TENTANG PROGRAM ADIWIYATA**

**(Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah
Pertama Negeri 14 Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

HAMIDA APRILLIA JAYANTIE

NIM. 115030107111111



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTTO

Mengingat bahwa segala kehidupan di bumi dan langit beserta isinya

hanyalah bersifat sementara, terkecuali keabadian milik-Nya.

Sungguh beruntung bagi hamba yang selalu menjaga kebersihan dan

kesucian hatinya serta senantiasa mengingat pada-Nya dalam setiap

nafas, langkah dan tindak di hadapan-Nya.

(Ayah)

Keterlambatan bukanlah suatu kegagalan dalam mencapai kesuksesan,

sebab keterlambatan merupakan pemikiran dan upaya terbesar untuk

melangkah kedepan dengan tanggung jawab terbaik yang dimiliki.

(Hamida Aprillia Jagantie)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, syukur kupanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kupanjatkan kepada Allah SWT karena telah menghadirkan orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan. Karena dengan rahmat-Nya, doa dan dukungan mereka skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan karya penulisan skripsiku ini kepada yang tercinta dan tersayang yaitu keluarga, sahabat, dan teman yang selalu mendoakanku, mendukungku, menghiburku dan menyemangatiku.

Terima kasih kepada mereka motivasi utama dalam doaku, Ayah Moch. Kholil, Mama Khanani, Kakak Shandy Arief Prasmana, dan keluarga besar lainnya.

Dan terima kasih pula kepada mereka sahabat dan teman-teman.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP NO. 5 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM
ADIWIYATA (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota
Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota
Malang)

Disusun oleh : Hamida Aprillia Jayantie

NIM : 115030107111111

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 21 Desember 2015

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Januari 2016
Skripsi atas nama : Hamida Aprillia Jayantie
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Tentang Program Adiwiyata (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang)

Malang, 26 Januari 2016

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota 1



Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota 2



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota 3



Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Bo. 5 Tahun 2013 Tentang Program Adiwiyata (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 21 Desember 2015



Hamida Aprillia Jayantie

115030107111111

RINGKASAN

Hamida Aprillia Jayantie. 2015. **Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Tentang Program Adiwiyata (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang)**. Dr. Mochamad Makmur, MS Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. 178 Halaman

Perkembangan permasalahan lingkungan di Indonesia semakin luas dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, yang diakibatkan oleh perilaku dan tindakan manusia serta jumlah dan intensitas bencana yang sering terjadi. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup sesuai konsep Pembangunan Berkelanjutan ialah Pendidikan Berwawasan Lingkungan melalui Program Adiwiyata atau perwujudan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang ialah salah satu sekolah yang mengimplementasikan program Adiwiyata. Dalam pelaksanaannya ditemukan kendala yangmana dikemudian hari dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup sekolah.

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara narasumber, observasi lapangan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Fokus penelitian ini ialah pelaksanaan program Adiwiyata berdasarkan Komponen dan Standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 dan model implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam menganalisis data dengan menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian ini ditunjukkan dengan 5 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Secara keseluruhan telah dilaksanakan dan diupayakan secara maksimal oleh warga sekolah. Dengan adanya jenjang pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik, keuangan yang transparan, ketersediaan sarana prasarana, dan partisipasi pihak luar. Namun didalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala yang memicu keberlangsungan program antara lain kurangnya partisipasi peserta didik akibat minimnya pemahaman, sumber dana yang kurang mencukupi dan masih terbatas, sarana prasarana yang tidak berfungsi secara maksimal, dan kurangnya partisipasi sekolah imbas.

Saran dalam penelitian ialah hendaknya meningkatkan pemahaman dan partisipasi peserta didik, mengurangi kegiatan yang membutuhkan pengeluaran dana, perbaikan ketersediaan sarana prasarana, menjaga dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pihak luar khususnya meningkatkan pemahaman sekolah imbas serta penerapan program Adiwiyata tetap terjaga dan adanya inovasi pengembangan program.

Kata kunci: permasalahan lingkungan, implementasi, pendidikan berwawasan lingkungan, program Adiwiyata.

SUMMARY

Hamida Aprillia Jayantie. 2015. **Implementation of Regulation of the Living Environmental Ministry No. 5 Year of 2013 About Adiwiyata Program (Study on Living Environmental Institution of Malang City and Junior High School 14 Malang)**. Dr. Mochamad Makmur, MS and Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. 178 Page

Environmental problems in Indonesia increases due the decreasing of environmental's quality and support which is caused by human activities and the amounts and intensity of disaster often happens. One of solutions to prevent and solve the environment problem refer to sustainable development concept is environmental education through Adiwiyata program or the implementation of environmental cultured and care of school. Junior High School 14 Malang is one of schools which has implementation Adiwiyata program. In the implementation process, the existence of problem affect the sustainable of school's environment.

This research is descriptive research by using qualitative approach with various data collection method i.e interview, observation, documentation and literature study. Focus of this research were implementation Adiwiyata program based on Components and Standard Regulation of Ministry of Living Environmental No. 5 year of 2013 and a model of the policy implementation refers to Van Metter and Van Horn and also factors that affecting. The research methode on data analysis was conducted by using Miles, Huberman and Saldana model.

Result of this research showed that there are 5 variables i.e size and the purpose of policy, resources, characteristic of conducting agent, attitude the implementor, and communication between organization and implementor. Overall, all of the variables has been implemented and efforts maximally by residents school. With the existence of education and teachers, transparent of financial, the availibilty of facility and the participation of outsiders. But in the process of implementation there were some problems found i.e lack of participation due to the lack of comprehension, lack of resources, facilities which did not work properly and the lack of school participation.

This research suggested that students participation and comprehension must be increased, reduce activities that require spending more funds, the preparation of facility, keep and improve the communication and coordination to outsiders especillay improving of school comprehension and also the implemetantion of Adiwiyata program will stiiil exist with the existence of the program development.

Key word: environmental problems, implementation, environmental education, Adiwiyata program.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Tentang Program Adiwiyata (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak sempurna dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku ketua dosen pembimbing Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku anggota dosen pembimbing Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan selama kuliah.

7. Ibu Ila Meimuna, SE selaku bid. Pemberdayaan Masyarakat dan seluruh staf Badan Lingkungan Hidup Kota Malang yang turut mendukung kelancaran peneliti.
8. Ibu Khusnul Khotimah, S.Pd selaku Wakasek bag. Kurikulum, Bapak Suseno, S.Pd selaku Wakasek bag. Kesiswaan, Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata, Ibu Lina Herlina, S.Pd selaku Tim Pokja Adiwiyata bid. Kurikulum, Ibu Rimtha Zalsalina P., S.Si selaku Tim Pokja Adiwiyata bid. Sarana Prasarana, siswa-siswi, seluruh staf dan pegawai Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang yang turut mendukung kelancaran peneliti.
9. Ibu Yayuk selaku reponden warga Kel. Pandanwangi Malang.
10. Keluarga, sahabat, dan teman yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
11. Dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat dipersebutkan satu-persatu ikut turut mendukung kelancaran peneliti.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2016

Penulis,

Hamida Aprillia Jayantie

115030107111111

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	16
1. Pengertian Administrasi Publik.....	16
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik.....	18
B. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik.....	20
3. Pengertian Kebijakan Publik	20
4. Implementasi Kebijakan Publik	23
C. Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup	45
1. Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup	45
2. Program Adiwiyata.....	52
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Fokus Penelitian	58
C. Lokasi dan Situs Penelitian	59
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Analisis Data	64
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
1. Gambaran Umum Kota Malang	67

2. Gambaran Umum Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang.....	79
B. Penyajian Data.....	89
1. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.....	89
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	94
b. Sumberdaya.....	98
c. Karakteristik Agen Pelaksana.....	117
d. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana.....	128
e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	136
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.....	147
a. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Lingkungan Internal.....	147
b. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Lingkungan Eksternal.....	150
C. Pembahasan dan Analisis.....	151
1. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.....	151
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	156
b. Sumberdaya.....	157
c. Karakteristik Agen Pelaksana.....	161
d. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana.....	164
e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	167
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.....	170
a. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Lingkungan Internal.....	170
b. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Lingkungan Eksternal.....	172

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	176
B. Saran.....	177

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
1.	Analisis Data Model Interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana.....	66
2.	Peta Kota Malang	73
3.	SMP Negeri 14 Kota Malang tampak depan	80
4.	Struktur Kepengurusan SMP Negeri 14 Malang.....	88
5.	Wawancara peneliti dengan Bapak Suseno	97
6.	Pelatihan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Malang	99
7.	1) Pemakaian limbah air wudlu dialirkan ke kolam ikan; 2) Pemeliharaan kebun organik sekolah oleh peserta didik; 3) IPAL menjadi Biogas; dan 4) Tong sampah sebagai tempat komposter.....	114
8.	1) Kolam ikan sebagai tempat pembuangan akhir pemanfaatan dan pengolahan limbah air wudlu; 2) Pengelolaan lubang biopori oleh salah satu peserta didik; 3) Salah satu sumur resapan sekolah; dan 4) Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA).....	115
9.	1&2) Taman sekolah; 3) Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara; 4) Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan; dan 5) Penggunaan <i>paving block</i>	116
10.	Kantin sehat	116
11.	Evaluasi kegiatan peserta didik melibatkan orang tua.....	123
12.	1&2) Pembuatan energi alternatif dari briket kertas; 3&4) Pemanfaatan limbah kain perca dan plastik kemasan; 5) Mading karya siswa disepanjang depan kelas; 6) Kampanye salah satu calon ketua OSIS tentang lingkungan hidup	127
13.	Wawancara peneliti dengan siswa-siswi SMP Negeri 14 Malang	132
14.	1) Air lindi sebagai sumber arus; 2) Mol dari kotoran sapi; 3) Pestisida organik; 4) Pot gantung sabut kelapa	142
15.	1) Pembinaan oleh Tim Green School Festival (GSF); 2) Pembinaan oleh Bapak Agus dari BALITJESTRO	143
16.	1&2) Pembinaan mengenai alat berat yang digunakan dan penjelasan tentang gas metan dari sampah yang membusuk oleh Bapak Dedi dari TPA Supit Urang; 3&4) Pembinaan mengenai penjelasan cara menanam dan merawat tanaman oleh Bapak Haryono dan Bapak Hasyim dari BALITJESTRO.....	144
17.	1) Pembinaan kegiatan Cerdas Cermat Lingkungan oleh Nivea Cares; 2) Wali murid menjadi narasumber pembelajaran pembuatan kerajinan dari rotan; 3) Pembinaan dengan Pabrik Keju Batu pada pembelajaran topik Bioteknologi; 4) Pembinaan oleh Bapak Saiful dari BPTP	145
18.	Wawancara peneliti dengan Ibu Yayuk, salah satu responden.....	146
19.	Matriks Hasil Penelitian	175

DAFTAR TABEL

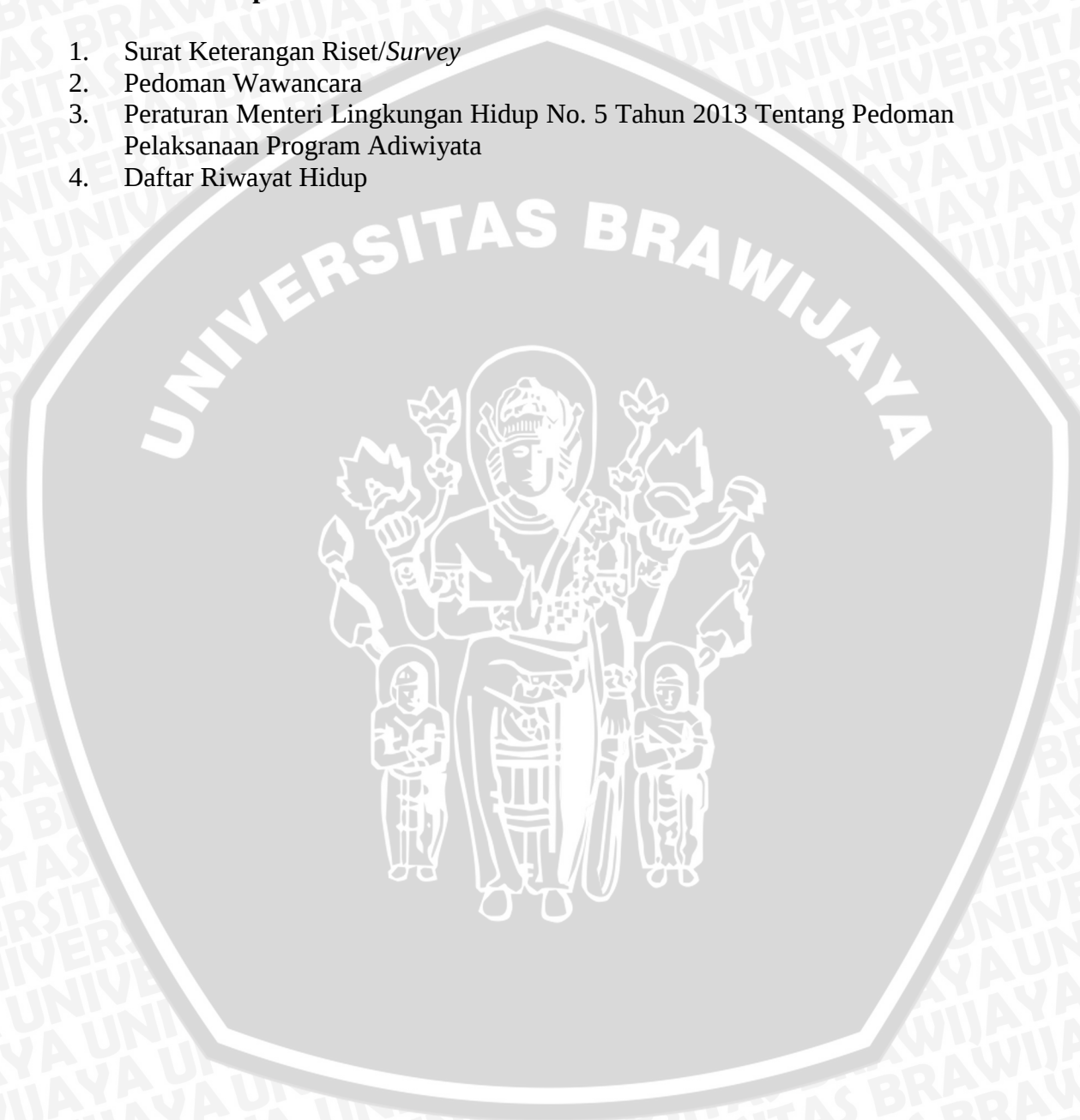
No.	Judul Tabel	Hal.
1.	Daftar Penghargaan Sekolah Adiwiyata.....	8
2.	Data Pegawai SMPN 14 Malang.....	84
3.	Pembagian Tugas Guru dan Karyawan SMPN 14 Malang.....	86
4.	Panitia Pengembang Program Adiwiyata SMPN 14 Malang.....	89
5.	Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 14 Malang Tahun 2014/2015.....	103
6.	Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 14 Malang Tahun 2014/2015.....	105
7.	Bentuk Kegiatan Budaya Pembiasaan SMPN 14 Malang.....	139



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Lampiran

1. Surat Keterangan Riset/*Survey*
2. Pedoman Wawancara
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata
4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik dalam peranannya yang semakin luas menjadi penting dengan adanya keterkaitan pada ekologi administrasi publik. Menurut Makmur (2009:1), kajian tersebut berisi tentang kebijakan publik yang dilihat dalam perspektif ekologi yang mempelajari hubungan pengaruh bersifat timbal balik antara administrasi publik dengan lingkungannya. Dalam hal ini, masyarakat dengan administrasi publik menjadi suatu bagian integral dan mengalami proses perubahan secara tetap. Seperti halnya dengan kegiatan manusia yang tidak pernah terlepas dari interaksi dengan lingkungannya. Secara sadar maupun tidak sadar segala kegiatan manusia tersebut memberikan dampak langsung bagi lingkungan sekitarnya. Menurut Salim (1986:12), bahwa berbagai gangguan lingkungan memiliki satu ciri yang sama yaitu manusia sebagai penyebab utama timbulnya permasalahan lingkungan. Seperti yang diuraikan Moesa (2002:145), orientasi pengetahuan lingkungan adalah manusia, yang diartikan sebagai titik sentral ukuran menguntungkan atau merugikan. Manusia merupakan makhluk hidup yang bertindak berdasarkan apa yang diperbuat, baik positif maupun negatif akan tetap mempengaruhi dan menjadi faktor utama dalam perubahan pada lingkungan hidup.

Pertumbuhan dan perubahan yang pesat di era globalisasi pada abad ini memicu peningkatan permasalahan lingkungan pada skala global, regional, dan lokal. Perilaku dan kegiatan manusia tersebut menjadi faktor utama penyebab dari

meningkatnya permasalahan lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh Asdak (2012:2) bahwa kompleksitas permasalahan lingkungan muncul dari adanya kegiatan manusia seperti meningkatnya kompleksitas sosial-budaya, organisasi sosial dan kapasitas teknologi yang merubah cara berpikir dan bertindak manusia akan keberadaan dan fungsi lingkungan hidup termasuk sumber daya alam. Selain itu, perubahan yang terjadi juga menyebabkan perubahan pada pola berinteraksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Kedua perubahan ini menciptakan konsekuensi meningkatnya konsumsi manusia terhadap sumber daya alam. Di sisi lain, kualitas dan daya dukung lingkungan terus menurun disertai dengan jumlah dan intensitas bencana lingkungan yang meningkat mengancam keamanan hidup manusia (Ginting, 2014).

Tentunya hal tersebut mengalami perubahan yang signifikan sehingga menyebabkan gangguan terhadap lingkungan. Tingkat gangguan terhadap lingkungan tersebut diperkirakan akan terus mempengaruhi dan mengakibatkan kerusakan, penurunan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Dampak yang terlihat dan dirasa tersebut sebagai akibat dari aktivitas manusia yang tentunya tidak dapat dengan mudah untuk diatasi, terutama pada lingkungan yang telah mengalami degradasi (Asdak, 2012:2). Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin luas dan menjadi isu lingkungan hidup di dunia yang disoroti secara tajam oleh media massa internasional dan menjadi permasalahan lingkungan global. Seperti semakin besarnya ‘lubang ozon’ (*ozone hole*), semakin luasnya gejala perubahan iklim (*climate change*), semakin meningkatnya laju deforestasi dan isu keanekaragaman hayati (*biodiversity*), isu

penurunan (*desertification*), banjir dan kekeringan sebagai dampak fenomena alam *El Nino* dan *La Nina* serta dampak lingkungan regional bahkan lokal, antara lain berbentuk hujan asam, pencemaran air dan udara, dan kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam pada umumnya (Asdak, 2012:2).

Pada beberapa waktu terakhir di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius. Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang baru di alami oleh negara kita dan sudah terjadi dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, bencana asap akibat kebakaran hutan, banjir, pencemaran lingkungan, dan konversi lahan produktif menjadi peruntukkan lain (Asdak, 2012:3). Disadur dari Tanjung (2014) dan Ginting (2014), terdapat lima (5) permasalahan lingkungan global di Indonesia yang menjadi sorotan publik pada beberapa bulan terakhir, seperti: 1) Pencemaran lingkungan oleh bahan-bahan kimia berbahaya atau bahan berbahaya dan beracun (B3) industri; 2) Kebakaran hutan dan gambut di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi pada bulan Oktober tahun lalu dan telah menjadi permasalahan setiap tahunnya; 3) Alih fungsi hutan lindung dan lahan pertanian menjadi rencana pembangunan menjadikan semakin berkurangnya lahan hutan dan pertanian, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara terbesar di Asia Tenggara yang akan di bangun di wilayah Jawa Tengah; 4) Pencemaran perairan oleh limbah pertambangan, seperti kegiatan pertambangan di pulau Bangka, Sulawesi Utara, selain itu dampak yang dapat langsung dirasakan seperti sungai Citarum yang menjadi sungai paling tercemar di dunia; 5) Kurangnya ketegasan terhadap perlindungan hukum untuk usaha pelestarian lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang telah terjadi jika tanpa disertai kegiatan pelestarian lingkungan hidup, pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan alam (Madya, 2012). Menurut Imam dikutip oleh Monalisa (2013), bahwa apabila segala tindakan dan kegiatan manusia tidak memperhatikan kualitas lingkungan, maka akibatnya adalah terganggunya keseimbangan ekosistem dan terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti tanah longsor, erosi, sedimentasi, penggundulan hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran tanah, air dan udara, abrasi pantai, instrusi air asin, serta penurunan debit air permukaan dan air tanah. Perubahan pada lingkungan tersebut menjadi ancaman keselamatan hidup manusia secara tidak langsung. Ancaman akan kerusakan yang terus menerus terjadi dan mengakibatkan kerusakan yang fatal, tentu menjadi suatu permasalahan lingkungan yang patut untuk diperbincangkan. Oleh sebab itu, salah satu tindakan preventif untuk mencegah dan mengobati kerusakan lingkungan diperlukan adanya suatu pengelolaan agar lingkungan yang mengalami penurunan kualitas tersebut tidak menjadi semakin parah dan menjadi pulih kembali.

Menghadapi permasalahan lingkungan tersebut, Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional telah mencanangkan dan menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Salah satu bentuk upaya dalam pembangunan berkelanjutan ialah pengelolaan lingkungan hidup. Perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara formal telah dibentuk pada tahun 1982 oleh Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Asdak, 2012:5). Pengertian yang diuraikan dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Soeriaatmadja, 1999:53). Sedangkan pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah upaya yang terpadu menjadi satu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Sugandhy dan Hakim, 2007:1). Tim Adiwiyata (2011:3) menguraikan bahwa pentingnya pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama masyarakat dunia untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan dan kehancuran sebagai akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Instrumen peraturan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup melewati jangka waktu yang relatif lama dan mengalami berbagai evaluasi hingga revisi. Salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan hidup yaitu melalui dunia pendidikan. Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup (*environmental education*) merupakan salah satu unsur dari konsep pembangunan berkelanjutan. Peraturan yang diutamakan dalam dunia pendidikan tersebut bertujuan mengatasi kerusakan lingkungan pada taraf umur sedini mungkin. Melalui pembelajaran secara langsung maupun tidak

langsung diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekolah untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan adanya pendidikan lingkungan hidup tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah mencanangkan Program Adiwiyata pada tahun 2006. Program ini telah dimulai sejak tahun 2006 hingga sekarang dilaksanakan secara menyeluruh di setiap Propinsi yang ada di Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Definisi Program Adiwiyata menurut Tim Adiwiyata (2011:3) merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, melalui peningkatan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat sekolah untuk lebih peka dan peduli terhadap kelestarian lingkungan sekolah. Selain itu, Adiwiyata sendiri dimaknai sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup serta mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata ini juga bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Tim Adiwiyata, 2011:3).

Program Adiwiyata merupakan instrumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Unsur terpenting yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan program Adiwiyata adalah adanya Prinsip dan Komponen Program Adiwiyata. Wajarnya suatu peraturan menjadikan sebagai pedoman yang secara terencana dan

sistematis dalam pelaksanaannya menciptakan program kebijakan yang terintegrasi diperuntukkan bagi masyarakat. Dengan terlaksanakannya Program Adiwiyata ini, diharapkan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, serta mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2013 pasal 3, bahwa peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata kepada seluruh unsur pelaksana Program Adiwiyata di tingkat pusat hingga daerah. Unsur pelaksana yang dimaksud adalah seluruh aktor yang berhadapan langsung dengan pelaksanaan Program Adiwiyata ini, tidak hanya pada tingkat pusat seperti menteri, menteri terkait, gubernur dan bupati/walikota tetapi juga dewan dan tim pelaksana adiwiyata yang sebelumnya telah dibentuk menteri, baik di tingkat nasional, Propinsi, kabupaten/kota, hingga sekolah. Dijelaskan dalam Tim Adiwiyata (2011:2), Program Adiwiyata yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 hingga tahun 2011, partisipasi mencapai 1.351 sekolah dari 251.415 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia, diantaranya penghargaan Adiwiyata Mandiri: 56 sekolah, Adiwiyata: 113 sekolah, calon Adiwiyata: 103 sekolah, atau total yang mendapat penghargaan Adiwiyata mencapai 272 Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia. Program Adiwiyata tahun 2013, sekolah yang mengikuti program ini mencapai kriteria nasional adalah 463 sekolah dari 19 Propinsi serta 130 sekolah Adiwiyata Mandiri.

Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah sekolah Adiwiyata Nasional adalah 200 sekolah serta Adiwiyata Mandiri adalah 67 sekolah sehingga mengalami peningkatan yang signifikan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2013).

Program Adiwiyata dianugerahkan pada berbagai sekolah di Indonesia yang telah melalui proses penilaian panjang. Sekolah – sekolah di Jawa Timur tersebut mendapatkan penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata Kota, Propinsi, Nasional maupun Mandiri. Kota Malang adalah salah satu kota pendidikan terbesar kedua di Jawa Timur. Oleh karenanya pada tahun 2009 pemerintahan kota Malang bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang dan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang beserta instansi – instansi yang terkait lainnya bekerjasama menerapkan program Adiwiyata pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut beberapa daftar sekolah di Kota Malang yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata.

Tabel 1. Daftar Penghargaan Sekolah Adiwiyata

No.	Sekolah	Penghargaan	Tahun
1.	SDN Tunjungsekar 1	Adiwiyata Mandiri	2010
2.	SMPN 5 Malang	Adiwiyata Mandiri	2010
3.	SMAN 5 Malang	Adiwiyata Mandiri	2010
4.	SDN Dinoyo 2	Adiwiyata Mandiri	2011
5.	SMAN 10 Malang	Adiwiyata Mandiri	2011
6.	SDN Pandanwangi 1	Adiwiyata Mandiri	2012
7.	SMKN 6 Malang	Adiwiyata Mandiri	2012
8.	SDN Purwantoro 1	Adiwiyata Nasional	2012
9.	SMAN 8 Malang	Adiwiyata Nasional	2012
10.	SMKN 1 Malang	Adiwiyata Nasional	2012
11.	SDN Purwantoro 1	Adiwiyata Mandiri	2013
12.	SMAN 8 Malang	Adiwiyata Mandiri	2013
13.	SMKN 1 Malang	Adiwiyata Mandiri	2013
14.	SD AL Kautsar	Adiwiyata Propinsi	2013
15.	SDN Sukun 1	Adiwiyata Propinsi	2013
16.	SMPN 10 Malang	Adiwiyata Propinsi	2013

No.	Sekolah	Penghargaan	Tahun
17.	SMPN 14 Malang	Adiwiyata Propinsi	2013
18.	SMAN 7 Malang	Adiwiyata Propinsi	2013
19.	SMKN 2 Malang	Adiwiyata Propinsi	2013
20.	SD Al Kautsar	Adiwiyata Nasional	2013
21.	SMPN 10 Malang	Adiwiyata Nasional	2013
22.	SMPN 14 Malang	Adiwiyata Nasional	2013
23.	SMAN 7 Malang	Adiwiyata Nasional	2013
24.	SDN Bandungrejosari 3	Adiwiyata Kota	2014
25.	SDN Blimbing 3	Adiwiyata Kota	2014
26.	SDN Bunulrejo 1	Adiwiyata Kota	2014
27.	SDN Buring	Adiwiyata Kota	2014
28.	SDN Kauman 1	Adiwiyata Kota	2014
29.	SDN Lowokwaru 2	Adiwiyata Kota	2014
30.	SDN Pandanwangi 3	Adiwiyata Kota	2014
31.	SDN Purwantoro 6	Adiwiyata Kota	2014
32.	SDN Purwantoro 8	Adiwiyata Kota	2014
33.	SDN Purwodadi 1	Adiwiyata Kota	2014
34.	SDN Percobaan 1	Adiwiyata Kota	2014
35.	SDN Percobaan 2	Adiwiyata Kota	2014
36.	SDN Rampal Celaket 2	Adiwiyata Kota	2014
37.	SDN Sawojajar 1	Adiwiyata Kota	2014
38.	SMPN 7 Malang	Adiwiyata Kota	2014
39.	SMPN 9 Malang	Adiwiyata Kota	2014
40.	SMPN 11 Malang	Adiwiyata Kota	2014
41.	SMPN 13 Malang	Adiwiyata Kota	2014
42.	SMPN 15 Malang	Adiwiyata Kota	2014
43.	SMPN 16 Malang	Adiwiyata Kota	2014
44.	SMPN 19 Malang	Adiwiyata Kota	2014
45.	SMPN 20 Malang	Adiwiyata Kota	2014
46.	SMPN 21 Malang	Adiwiyata Kota	2014
47.	SMPN 22 Malang	Adiwiyata Kota	2014
48.	SMP Katolik Frateran C 21	Adiwiyata Kota	2014
49.	SMAN 2 Malang	Adiwiyata Kota	2014
50.	SMAN 4 Malang	Adiwiyata Kota	2014
51.	SMKN 4 Malang	Adiwiyata Kota	2014
52.	SMKN 8 Malang	Adiwiyata Kota	2014
53.	SMKN 10 Malang	Adiwiyata Kota	2014
54.	SDN Percobaan 1	Adiwiyata Propinsi	2014
55.	SMPN 15 Malang	Adiwiyata Propinsi	2014
56.	SMAN 2 Malang	Adiwiyata Propinsi	2014
57.	SDN Sukun 1	Adiwiyata Nasional	2014
58.	SMPN 15 Malang	Adiwiyata Nasional	2014
59.	SMAN 2 Malang	Adiwiyata Nasional	2014

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, 2015)

Berdasarkan wawancara data terakhir oleh Bu Ila Meimuna, SE selaku bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, tercatat tahun 2010 hingga tahun 2014 terdapat 40 sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata, baik Adiwiyata Kota, Adiwiyata Propinsi, Adiwiyata Nasional maupun Adiwiyata Mandiri. Salah satu sekolah yang pada tahun 2015 telah berhasil dalam melaksanakan program sekolah Adiwiyata dan dianugerahkan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri ialah SMP Negeri 14 Malang. Sekolah ini telah dikenal masyarakat sebagai sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan serta karena keikutsertaan warga sekolah dalam kegiatan perbaikan lingkungan hidup di kawasan sekolah dan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Namun ternyata dalam keberhasilan yang didapat dari pelaksanaan program tersebut, masih terdapat kelemahan didalamnya. Walaupun dalam kinerjanya sesama Tim Adiwiyata dinilai baik, tetapi ketika pelaksanaannya tidaklah mudah. Kelemahan tersebut menjadikan suatu permasalahan yang sangat berarti, karena dikemudian hari dapat berpengaruh terhadap kondisi dan keberlanjutan lingkungan hidup di sekolah. Menurut Van Metter dan Van Horn, permasalahan yang terjadi tak jarang datang dari variabel-variabel yang ada ditubuh organisasi yaitu sumberdaya yang ada, yaitu para pelaksana kebijakan (Agustino, 2008:141-144).

Dalam hal ini peneliti berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata, dan dengan melihat model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn. Peraturan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penilaian oleh Tim-Tim

Adiwiyata yang berawal dari penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013. Pada dasarnya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selain bermanfaat untuk perubahan kearah yang lebih baik demi masa yang akan datang, bertujuan mengedepankan kepentingan rakyat. Terlepas dari itu, segala program yang hendak dicapai tentu memegang unsur penting yaitu manusia yang memiliki kesadaran. Hal tersebut secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan dan diharapkan menunjang keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.

Selain merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013, dalam penelitian ini pengukuran model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan suatu implementasi kebijakan berangkat dari fungsi akan kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi dan memfokuskan pada lima variabel implementasi kebijakan publik dari Van Metter dan Van Horn yaitu pada faktor ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang)?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang).
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan

Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang).

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat teoritis dan praktis terdapat di dalam kontribusi penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu, khususnya ilmu administrasi publik dalam lingkup pendidikan berwawasan lingkungan hidup.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan sebagai informasi dan referensi yang sejenis maupun perbandingan bagi penelitian-penelitian lain dengan pengembangan pemikiran yang lebih baik dan bermanfaat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai informasi dan referensi maupun pertimbangan kepada sekolah dan instansi terkait dalam upaya implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata.
- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terhadap pelaksanaan program Adiwiyata.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam bab ini yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang), perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar teori dan pendapat yang mendukung, diperoleh dari studi kepustakaan literatur sebagai acuan penelitian dalam menganalisa, mendeskripsikan dan menjawab rumusan masalah serta merangkai pembahasan.

BAB III: METODE PENELITIAN

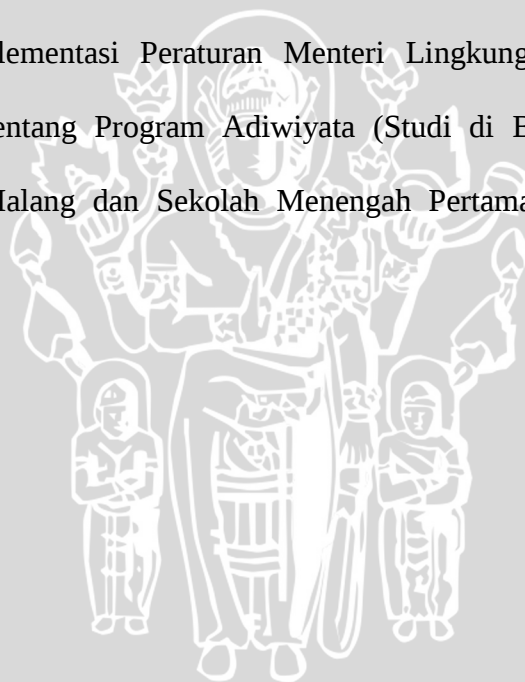
Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, seperti: jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, lokasi penelitian atau situs penelitian, fokus penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi dan inti dari penulisan skripsi yang di dalamnya menguraikan dan membahas hasil penelitian yang menyangkut implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang) beserta faktor pendukung dan penghambat internal maupun eksternal.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Perkembangan administrasi publik yang pesat hingga mengalami reformasi, terlahir dari makna, istilah, definisi dan rumusan didalamnya. Istilah ‘administrasi’ menurut Indradi (2006:2) diartikan berdasarkan 3 macam bahasa, dalam terjemahan bahasa Inggris ‘*administration*’ adalah suatu kegiatan yang memiliki makna luas meliputi segenap aktivitas dalam menetapkan kebijakan beserta pelaksanaannya. Dalam bahasa latin ‘*administrate*’ ialah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya. Sementara dalam bahasa belanda ‘*administratie*’ yaitu suatu kegiatan yang bersifat terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan. Sedangkan menurut Siagian dalam Pasolong (2008:2) administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu dalam mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan. Berbeda dengan pendapat Siagian, menurut Dimock & Dimock dikutip oleh Pasolong (2008:3) administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Makna ‘publik’ menurut Echols dan Shadily dikutip oleh Indradi (2006:110) ialah (masyarakat) umum. Sedangkan arti publik yang dikatakan

Cutlip dan Center dalam Syafri (2012:15) diartikan sebagai kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Berbeda dari pendapat Cutlip dan Center, dalam Pasolong (2008:6) pengertian lain datang dari Syafi'ie dkk. yang mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Pengertian dari dua kata di atas jika digabungkan akan terbentuk adanya keterkaitan makna teori dan praktek, sehingga menciptakan tafsiran berbeda dari beberapa ahli. Dikutip oleh Indradi (2006:114) pada "*Public Administration Dictionary*" bahwa penjelasan administrasi publik menurut Chandler dan Plano ialah proses dimana sumberdaya dan anggota publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk kegiatan memformulasi, mengimplementasi, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Adapun menurut Henry dalam Indradi (2006:116), bahwa administrasi publik ialah suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mendapatkan pemahaman terhadap hubungan lembaga pemerintah yang diperintah dengan masyarakat dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, seperti berupaya melembagakan kegiatan pelaksanaan manajemen agar efektif, efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat lebih baik.

Definisi lain muncul dari penjelasan Simon pada kutipan Indradi (2006:117) bahwa administrasi publik sebagai kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, menurut Waldo disadur oleh Syafri (2012:21) menjelaskan administrasi publik

ialah organisasi dan manajemen manusia dan peralatan maupun perlengkapannya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Berdasarkan pemahaman dari ketiga pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah serangkaian kegiatan kerjasama sekelompok manusia yang terorganisir dan terkoordinasi sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik secara bersama untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang bertujuan dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi publik dalam pelaksanaannya berkaitan dengan ruang lingkup agar kinerjanya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara yang dikutip oleh Syafri (2012:115), dijelaskan bahwa administrasi publik sebagai suatu disiplin dan sistem memiliki ruang lingkup, antara lain:

- a. Tata nilai, yang mencakup nilai kultural, spiritual, etika, falsafah hidup yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan berperilaku dalam administrasi publik.
- b. Organisasi pemerintahan negara, meliputi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peralihan), dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dibutuhkan serta saling berkaitan dalam penyelenggaraan negara.

- c. Manajemen pemerintahan negara, mencakup kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang dan wilayah pemerintahan, ialah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang terdiri dari pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Sumberdaya aparatur yaitu sumberdaya manusia sebagai unsur utama yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, maka dibutuhkan pengelolaan dan pembinaannya pada seluruh aspek dan dimensinya, seperti recruitment, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan kesejahteraan serta pensiun.
- e. Sistem dan proses kebijakan negara, dimana peran administrasi publik terletak pada fungsi dan proses, yaitu: 1) perumusan kebijakan; 2) penetapan kebijakan; 3) pelaksanaan kebijakan; 4) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan; 5) penilaian hasil (evaluasi kinerja) pelaksanaan berbagai kebijakan dalam berbagai bidang (sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, lingkungan hidup, dan lain sebagainya).
- f. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara, yang dimaknai bahwa pemilik kedaulatan seutuhnya ialah rakyat dan negara tercipta oleh rakyat. Lembaga dan manajemen pemerintahan tidak dapat mengabaikan aspirasi dan peran rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

- g. Hukum administrasi publik, mencakup aspek hukum yang berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, menyangkut eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, keterkaitan antara satu lembaga dengan yang lembaga lain agar tersusun dan terselenggara secara efisien, proporsional, efektif, dan *legitimate*.

Sementara itu, Dimock & Dimock (1992:26) menjelaskan terdapat empat

(4) komponen administrasi publik, yaitu:

- a. Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan administratis yang bersifat ke dalam dan rencana-rencana.
- b. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya: struktur administrasi dari segi formalnya.
- c. Bagaimana para administrastor mewujudkan kerja sama (*teamwork*). Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pimpinan, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moril, hubungan masyarakat dan sebagainya.
- d. pengawasan dalam badan-badan eksekutif itu sendiri, dan yang penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif, dan berbagai badan lainnya

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kegiatan dalam administrasi publik memiliki kesinambungan berarti dengan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Administrasi publik mencakup proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintah guna memberikan arah dan tujuan suatu kebijakan publik. Terlepas

dari hal tersebut, Kartasmita dalam kutipan Widodo (2009:12-13) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Definisi tersebut merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. Disadur oleh Suharto (2008:7) bahwa Titmuss menguraikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Artinya kebijakan selalu berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Disisi lain, Turner dan Hulme dalam Keban (2008:60) mendefinisikan kebijakan sebagai proses yang meliputi proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Kebijakan Publik (*public policy*) menurut Eyestone dikutip oleh Abdul Wahab (2012:13) ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*” atau yang didefinisikan sebagai antar hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Definsi lain menurut Dye dalam Abdul Wahab (2012:14) kebijakan publik diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang artinya kebijakan publik adalah pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan Agustino (2008:7), hal ini dimaknai bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga Agustino (2008:8)

menguraikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat dan dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Berbeda dengan beberapa pendapat yang telah dijelaskan di atas, Easton dalam saduran Agustino (2008:8) mengatakan kebijakan publik tidak terlepas dari karakteristik khusus. Karakteristik khusus dari kebijakan publik yang diuraikan tersebut ialah keputusan politik yang dirumuskan oleh suatu “otoritas” dalam sistem politik yaitu oleh “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Easton juga mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki otoritas sistem politik merupakan orang-orang yang terlibat kegiatan sistem politik, salah satunya dalam memformulasikan kebijakan publik. Selain itu, orang-orang tersebut memiliki tanggungjawab, dimana pada suatu ketika kegiatan mereka patut untuk dipertanggungjawabkan dan dalam mengambil keputusan yang dapat diterima serta bersifat mengatur atau mengikat masyarakat luas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu ketetapan pemerintah yang memuat kepentingan rakyat, seperti prinsip-prinsip, aturan, pedoman, keleluasaan tertentu untuk mengarahkan cara-cara bertindak seluruh warga negara secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan kearah yang lebih baik, terencana dan konsisten.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Jones dalam kutipan Widodo (2009:86) menguraikan implementasi sebagai makna yang sederhana yaitu *“getting the job done, and doing it”*. Hal ini mengandung makna yang dalam, suatu implementasi menuntut adanya beberapa syarat, seperti pelaksana atau orang, uang, dan kemampuan organisasional, atau yang disebut sumberdaya. Jones juga menambahkan implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Sehingga disimpulkan bahwa implementasi merupakan tahap kebijakan yang berdasarkan pada perumusan tindakan yang akan dilakukan dan pelaksanaan tindakan yang sebelumnya telah dirumuskan. Berbeda dengan pendapat Jones, Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Abdul Wahab (2012:135) merumuskan proses implementasi sebagai *“those actions by publicor private individuals (or groups) that are directed of the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*. Artinya bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kebijakan akan berjalan dengan baik dan benar apabila sudah diimplementasikan secara baik, terarah dan terencana. Menurut Gordon yang disadur oleh Keban (2008:76) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dimaknai bahwa administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Mengorganisir yang dimaksud adalah mengatur sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berarti menerjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan layak dijalankan. Menerapkan yaitu menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan-tujuan program (Keban, 2008:77). Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam suatu kebijakan secara baik, terarah dan terencana serta bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat.

Untuk memudahkan suatu implementasi kebijakan maka dibutuhkan model implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang pertama adalah model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Model Van Metter dan Van Horn dijelaskan dalam Agustino (2008:141-144) merupakan model pendekatan *top-down* dan disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Van Metter dan Van Horn mengemukakan bahwa terdapat enam (6) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, antara lain:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kegiatan implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang dipandang realistis dengan sosio-kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Manusia adalah sumberdaya yang utama. Dalam hal ini manusia dituntut berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumberdaya manusia yang diperhitungkan adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Anggaran yang direalisasikan hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan dan perlunya dalam memanfaatkan waktu secara baik.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian agen pelaksana dalam keterlibatan pengimplementasian kebijakan publik meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Sebab kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Di sisi lain, cakupan wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan jika menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan wilayah implementasi kebijakan maka semakin banyak agen yang terlibat.

d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kinerja implementasi publik. Sebab kebijakan dilaksanakan bukan hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi kebijakan yang dilaksanakan agen pelaksana adalah kebijakan *top-down*

yang sangat mungkin pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan warga.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme terpenting dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi maka semakin baik pula komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi dan kesalahan akan sangat minim terjadi begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal juga merupakan faktor pendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat mengagalkan pengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Sejalan dengan pendapat Van Metter dan Van Horn, menurut Witaradya (2010) yang merujuk pada enam (6) variabel Van Metter dan Van Horn tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran kebijakan/Ukuran dan Tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Apabila ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan dengan menegaskan

standar dan sasaran yang telah ditentukan harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Sebab kinerja kebijakan pada dasarnya ialah penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

b. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan tersedia. Manusia merupakan sumberdaya utama dan terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap-tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di emban dan di porsikan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumberdaya lainnya yang perlu diperhatikan ialah sumberdaya finansial dan waktu yang dapat menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Sebab kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sifat dan perilaku yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang dilaksanakan pada beberapa kebijakan maka menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Di konteks lainnya dibutuhkan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Di sisi lain, cakupan atau luas wilayah menjadi perhitungan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individunya. Standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan karena mereka yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman suatu standar dan tujuan kebijakan, maka sulit tercapai. Oleh karenanya dengan adanya kejelasan maka para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan. Koordinasi sebagai mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, begitupula sebaliknya.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap penerimaan maupun penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sebab kebijakan yang dilaksanakan sesungguhnya bukan hasil formulasi warga setempat yang benar-benar mengetahui permasalahan dan persoalan yang dirasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang memungkinkan para pengambil

keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang mestinya diselesaikan. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap kepentingan-kepentingan organisasi maupun pribadi. Van Mater dan Van Horn menjelaskan sikap kecenderungan terhadap implementasi kebijakan dimulai dari penyaringan terlebih dahulu akan persepsi pelaksana dalam batas dimana kebijakan dapat dilaksanakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang penting untuk diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan ialah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung dapat mempengaruhi dan menjadi sumber masalah dalam mengagalkan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya implementasi kebijakan dipengaruhi kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Kedua adalah Model Edward III yang termuat dalam kutipan Widodo (2009:96), terdapat empat (4) faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya suatu implementasi kebijakan, yaitu:

a. Faktor komunikasi

Faktor komunikasi digunakan sebagai upaya penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan untuk dapat mengetahui dan memahami isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran

kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan baik dan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Faktor komunikasi memiliki tiga dimensi, yaitu transformasi, kejelasan, dan konsistensi.

b. Sumberdaya

Untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien, maka perlu memperhatikan ketentuan atau aturan yang ada. Jika pelaku kebijakan tidak memperhatikan sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak efektif dan efisien. Dalam model Edward III, sumber daya dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Sumber daya dalam model ini harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Selain itu, sumber daya manusia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus memiliki ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

Kedua, sumber daya keuangan atau anggaran yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Apabila terjadi keterbatasan dana dan peralatan, menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Banyak permasalahan baik dalam tubuh organisasi maupun

program yang akan dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan sistem akuntabilitas dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Ketiga, sumber daya peralatan sebagai sarana untuk operasional dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan saat memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Namun apabila terbatasnya fasilitas yang tersedia, maka hal tersebut kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

Dan keempat, sumber daya informasi dan kewenangan. Informasi yang relevan dan cukup tentang keterkaitan antara bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki atau diharapkan.

c. Disposisi

Disposisi akan muncul di antara para pelaku kebijakan jika suatu saat menguntungkan, tidak hanya organisasinya tetapi juga dirinya. Kebijakan akan menguntungkan organisasi dan pelaku kebijakan, jika mereka memiliki pengetahuan dan mendalami serta memahaminya. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman ini akan memunculkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan. Sikap tersebut yang akan memunculkan disposisi pada pelaku kebijakan.

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi juga dipengaruhi oleh sikap implementor dalam mendukung suatu implelementasi kebijakan, seperti tindakan implementor yang bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh wewenang yang dimilikinya.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan tidak cukup mencakup para pelaksana kebijakan. Akan tetapi lebih efektif jika memperhatikan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga yang terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Model selanjutnya ialah Model Merilee S. Grindle. Model Grindle dalam Agustino (2008: 154-157) ialah model pendekatan *top-down* yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Dijelaskan bahwa

terdapat dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari hasil yang didapatkan, seperti hasil yang tercapai dan hasil yang tidak tercapai atau gagal. Pengukuran keberhasilan dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Dalam proses, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai, diukur dengan dua faktor, yaitu: a) dampak atau efek pada masyarakat baik individu dan kelompok; b) tingkat perubahan yang terjadi seperti *feedback* kelompok sasaran.

Selain itu Grindle juga menjelaskan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh *implementability* kebijakan itu sendiri, yang dibagikan menjadi dua (2) macam *Content of Policy* dan *Context of Policy*, yaitu:

- a. *Content of Policy*, meliputi:
 - 1) *Interested Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi dan sejauhmana memberikan pengaruh bagi implementasi kebijakan.
 - 2) *Type of Benefits* (tipe manfaat), berupaya menunjukkan atau menjelaskan dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan implementasi kebijakan.
 - 3) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), berkaitan dengan target yang akan dicapai dan menjelaskan seberapa besar perubahan yang akan dicapai tersebut dengan skala yang jelas.

- 4) *Site of decision Making* (letak pengambilan keputusan), berkaitan dengan kejelasan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - 5) *Program Implementor* (pelaksana program), berkaitan dengan adanya pelaksana kebijakan yang berkompeten dan berkapabel demi keberhasilan suatu kebijakan, serta terdata atau terpapar secara baik.
 - 6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan), mencakup terwujudnya keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tentu membutuhkan sumberdaya-sumberdaya yang mendukung pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik.
- b. *Context of Policy*, meliputi:
- a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), meliputi kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang diperhitungkan dan digunakan para aktor yang terlibat demi kelancaran pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
 - b) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), mencakup lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dan penjelasan mengenai karakteristik suatu lembaga yang turut mempengaruhi kebijakan.

- c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), meliputi faktor penting yaitu kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Model keempat diuraikan sebagai *A Framework for Policy Implementation Analysis* atau disebut juga dengan Model Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:144-149). Dijelaskan bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik ialah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut dibagi menjadi tiga kategori besar, antara lain:

- a. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Dikerjakan, meliputi:
 - 1) Kesukaran-kesukaran teknis, meliputi tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis. Selain itu dipengaruhi oleh tersedia atau telah dikembangkan teknik-teknik tertentu.
 - 2) Keberagaman perilaku yang diatur, mencakup semakin beragam perilaku yang diatur, semakin beragam pelayanan yang diberikan, maka semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Sehingga semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikendalikan oleh para pejabat pada implementasi di lapangan.
 - 3) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, artinya semakin kecil dan jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah melalui implementasi kebijakan, maka

semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

- 4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, artinya semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil.

b. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat
Pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui:

- 1) Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, artinya semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar kemungkinan output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.
- 2) Keandalan teori kausalitas yang diperlukan, mencakup suatu teori kausalitas yang menjelaskan tujuan usaha pembaruan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.
- 3) Ketetapan alokasi sumberdana, yang artinya tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

4) Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan dimana lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, artinya salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuan untuk memadukan hierarki badan-badan pelaksana.

5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, artinya selain memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

c. Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi

1) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, faktor eksternal menjadi utama untuk diperhatikan guna keberhasilan upaya penerapan suatu kebijakan publik.

2) Dukungan publik

Untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya dukungan dari warga. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan berhasil jika dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat. seperti adanya kearifan lokal yang dimiliki oleh warga dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik.

4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi ialah fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui proses seleksi institusi-institusi dan pejabat-pejabatnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antar lembaga maupun individu di dalamnya menjadi faktor penting dalam keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Terlepas dari model-model implementasi kebijakan diatas, salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah adalah sebuah program. Pengertian program termuat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi. Definisi Program menurut Arikunto (1988:1) adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program juga merupakan kegiatan yang direncanakan secara terarah pada pencapaian suatu tujuan. Di sisi lain, pengertian program datang dari pendapat dua orang tokoh yaitu Hogwood & Gunn dan Tjokroamidjoyo yang dijelaskan dalam Juniar (2013), yaitu:

- a. Menurut pendapat Hogwood dan Gunn, Program yaitu suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legitimasi, pengorganisasian dan pengarahan atau penyediaan sumber-sumber yang diperlukan.
- b. Sedangkan menurut Tjokroamidjoyo, program merupakan suatu aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas.

Jones mengemukakan (1996:295) *“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving avarral policy objectives”* atau yang diterjemahkan bahwa suatu program merupakan sekumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan berintegrasi mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan suatu program tersebut terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, Jones (1996:294) menjelaskan terdapat lima (5) macam aspek, yaitu:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e. Strategi pelaksanaan

Selain beberapa aspek diatas, suatu program dalam mencapai tujuan juga dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik tertentu (Jones, 1996:295), antara lain:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Namun hal yang paling terpenting bahwa program yang terbaik ialah program yang berdasarkan model teoritis yang jelas. Dimaknai bahwa sebelum menentukan permasalahan sosial yang ingin diatasi dan melakukan intervensi, maka diperlukan pola pikir serius terhadap apa, bagaimana, dan mengapa permasalahan tersebut terjadi serta apa solusi terbaiknya (Jones, 1996:295). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana kegiatan pelaksanaannya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Suatu program dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari indikator atau tolak ukur kinerja. Nur (2012) menjelaskan bahwa program terdiri dari satu kesatuan dari beberapa bagian komponen yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komponen tersebut adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terdiri atas beberapa sub komponen dan masing-masing sub komponen terdapat beberapa indikator. Komponen-komponen program tersebut antara lain seperti sasaran program, pelaksana program, uraian pekerjaan, tata cara pelaksanaan (prosedur pelaksanaan), anggaran yang dibutuhkan dan waktu pelaksanaan program.

Selain itu, Arikunto (1988:2) menjelaskan program sebuah hasil kebijakan pemerintah wujudnya bermacam-macam jika ditinjau berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

- a. Tujuan, ada program yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan dan bertujuan sukarela atau kegiatan sosial. Ukurannya ditinjau seberapa banyak memberikan keuntungan atau bermanfaat bagi orang lain.
- b. Jenis, program yang diklarifikasikan berdasarkan isi kegiatan program seperti program kesehatan, program pendidikan dan sebagainya.
- c. Jangka waktu, ada program berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- d. Keluasannya, ada program yang sempit mencakup variabel yang terbatas dan program yang luas mencakup banyak variabel.
- e. Pelaksana, ada program kecil yang dilaksanakan beberapa orang dan program besar yang pelaksanaannya banyak orang.
- f. Sifatnya, ada program yang bersifat penting mengenai hal utama yang menyangkut nasib orang banyak dan ada program yang bersifat kurang penting berdampak tidak luas.

Pada dasarnya program pemerintah merupakan sebuah hasil dari implementasi kebijakan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sukardi (2014:4) bahwa program merupakan salah satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui proses panjang dan disepakati oleh para pengelolanya untuk dilaksanakan oleh unsur-unsur pelaksana program. Herry (2005:35) juga mengartikan program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Menurut Jones (1996:36) terdapat tiga (3) pilar utama dalam pengoperasian program, yaitu:

a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas dibutuhkan dalam pelaksanaan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumberdaya manusia yang berkompeten dan berkualitas.

b. Interpretasi

Pelaksana program harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan guna dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Penerapan atau aplikasi

Pentingnya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan program lainnya.

Sedangkan menurut Abdullah (1987:398) terdapat tiga (3) unsur utama dalam proses pelaksanaan program, antara lain:

a. Adanya program (kebijakan) yang dilakukan;

b. Target grup, ialah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat serta *feedback* dari adanya program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan *mindset* dan perilaku;

- c. Unsur pelaksana (implementor) organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi program tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dalam menjalankan suatu program yang ditujukan terhadap sekelompok sasaran masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai harapan dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, Udoji dalam kutipan Abdul Wahab (2012:126) menguraikan bahwa pelaksanaan (implementasi) kebijakan ialah suatu hal yang lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan.

Berbicara mengenai implementasi program, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor – faktor yang mempengaruhi didalamnya. Hal ini dimaksudkan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, baik dalam cakupan internal maupun eksternal. Menurut Soenarko (2005:186-187) terdapat enam (6) faktor pendukung implementasi kebijakan agar berhasil sesuai yang diharapkan, antara lain:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari rakyat.
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas lebih dulu.
- c. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai dengan kebijakan itu
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini berarti diferensiasi kegiatan secara horizontal dan secara vertikal.
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang (*decentralization*) yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban (*deconcentration*) yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, Soenarko (2005:1850) menjelaskan ada delapan (8) faktor penghambat, antara lain:

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e. Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor ekstern
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
- h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang dan sumber daya manusia)

Sementara itu, Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Abdul Wahab (2012:167-176) berpendapat bahwa dalam pengimplementasian kebijakan agar berjalan secara berhasil terdapat syarat-syarat didalamnya, antara lain:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijkasanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Disisi lain, menurut Hogwood dan Gunn dalam kutipan Abdul Wahab (2012:128-129) dijelaskan bahwa kegagalan implementasi dibagi menjadi dua (2), yaitu:

- a. *Non-implementation* (tidak terimplementasikan), implementasi yang tidak sesuai dengan rencana disebabkan pihak-pihak terkait tidak mau bekerjasama, atau bekerja tidak secara efisien, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahannya diluar jangkauan sehingga hambatan-hambatan tersebut tidak mampu mereka atasi.
- b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil), implementasi sudah sesuai dengan rencana namun kondisi eksternal tidak menguntungkan seperti terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan lain sebagainya.

Sebaliknya menurut Sunggono (1994:140-143) faktor-faktor keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Para pelaksana harus memusatkan perhatian pada problematika bagaimana mencapai konstitusi tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Misalnya mereka harus berusaha untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang diharapkan menerima manfaat dari kebijakan tersebut.
- b. Para pelaksana tersebut harus mampu mengubah sikap menentang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari adanya kebijakan tersebut.
- c. Daya tanggap. Lembaga-lembaga publik harus tanggap terhadap perkembangan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan. Menciptakan dan menjamin adanya daya tanggap yang memadai guna memungkinkan fleksibilitas, dukungan dan umpan balik selama proses implementasi suatu kebijakan publik.
- d. Tetap mengusahakan control yang memadai atas distribusi sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik.
- e. Kecakapan dalam “seni politik”. Keleluasaan wawasan dan kejelian politik dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan tanggapan yang muncul dari para aktor yang terlibat.
- f. Pemahaman yang baik mengenai lingkungan dimana para pelaksana berusaha mewujudkan kebijakan publik.

C. Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup

1. Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan berhubungan dengan kebijaksanaan pengembangan lingkungan yang selalu bersentuhan dengan

berbagai segi kepentingan manusia. Menurut Salim (1986:37-38) kebijaksanaan pengembangan lingkungan ditujukan berdasarkan empat sasaran, antara lain:

- a. Membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan, hal ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan untuk membina manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri keselarasan:
 - 1) Antara manusia dengan masyarakat
 - 2) Antara manusia dengan lingkungan
 - 3) Antara manusia dengan Tuhan Penciptanya
- b. Melestarikan sumber-sumber alam agar bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh generasi demi generasi. Usaha membangun masyarakat adil dan makmur membutuhkan waktu panjang dan karena itu pelestarian sumber-sumber alam sangat penting.
- c. Mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia. pembangunan industri, pertambangan, pertanian dan kegiatan sektoral lainnya perlu dilaksanakan melalui cara yang sekaligus mengindahkan mutu lingkungan.
- d. Membimbing manusia dari posisi “perusak lingkungan” menjadi “pembina lingkungan”.

Keempat sasaran tersebut dapat tercapai jika diimplementasikan secara berkelanjutan. Hal ini tentu didukung oleh “proses kesadaran lingkungan” yang meluas mencakup lapisan masyarakat dan membawa pemahaman permasalahan lingkungan menjadi penghayatan, sehingga mampu menghasilkan sikap, kebiasaan dan kelakuan yang menegakkan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan (Salim, 1986:35).

Salah satu kegiatan sektoral dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang dimaksud ialah di bidang pendidikan. Pendidikan berwawasan lingkungan hidup sebagai kajian dalam prospek pembangunan berkelanjutan yang diciptakan oleh pemerintah memiliki manfaat dan tujuan bagi masyarakat agar kehidupan dimasa mendatang lebih terarah dan lebih baik. Pendidikan berwawasan lingkungan hidup masing – masing memiliki konsep dan makna tertentu

didalamnya. Makna Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Definisi pendidikan menurut Suryosubroto (1990:11) merupakan upaya sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya di masa depan sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan berdasarkan kurikulum yang sesuai. Sementara itu, Nawawi (1984:8) menjelaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, baik di dalam maupun di luar sekolah. Usaha tersebut diselenggarakan dalam berbagai bentuk antara lain:

- a. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis melalui suatu lembaga disebut “pendidikan formal”.
- b. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis di lingkungan keluarga disebut “pendidikan informal”.
- c. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis di luar lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan formal disebut “pendidikan non formal”.

Selain itu, dalam tercapainya pelaksanaan pendidikan dibutuhkan lima (5) pendekatan menurut Superka dijelaskan dalam Hidayat (2012:11), antara lain:

- a. Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*);
- b. Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitif moral development approach*);
- c. Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*);

- d. Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*); dan
- e. Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*).

Salah satu wujud pendidikan adalah berkomunikasi langsung dengan alam atau berinteraksi langsung dengan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup yang berada di dalam sekolah maupun diluar sekolah. Istilah lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah kesatuan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa lingkungan hidup mempengaruhi makhluk hidup, termasuk di dalamnya yaitu manusia. Manusia hendaknya selalu menyadari bahwa alam yang memberi kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini seperti yang diungkapkan Soemarwoto (1994:54), manusia selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungan hidupnya seperti mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup, serta membentuk dan dibentuk oleh lingkungan hidup.

Disisi lain, definisi lingkungan hidup juga muncul dari beberapa ahli. Salah satunya datang dari pendapat seorang ahli yang mendorong banyak ahli untuk lebih memperdalam konsep tentang lingkungan hidup. Ernest Heckel dikutip oleh Sridianti (2014) pada tahun 1860 memunculkan pemikiran lingkungan hidup dengan sebutan 'ekologi'. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos ialah rumah dan logos ialah ilmu. Menurut Salim dalam kutipan Sridianti (2014) lingkungan hidup disebut sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan

mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pengertian lingkungan hidup ini dikatakan cukup luas, jika batasan disederhanakan maka ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat menjangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.

Lingkungan hidup seperti yang dijelaskan oleh Soemarwoto (1994:51-52) merupakan sebuah wilayah atau ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup (manusia, tumbuhan dan hewan) dan tak hidup di dalamnya. Soemarwoto (1994:52-53) menguraikan lingkungan hidup memiliki sifat, sifat lingkungan hidup tersebut ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu: pertama, jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut; kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu; ketiga, perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup; dan keempat, faktor non-materiil seperti suhu, cahaya dan kebisingan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa definisi lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan tempat atau wilayah di bumi yang berisikan lingkungan alam dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan; dan makhluk tak hidup atau disebut juga dengan benda mati; serta terdapat interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya.

Terlepas dari berbagai definisi pendidikan dan definisi lingkungan hidup di atas, kembali pada konsep pendidikan berwawasan lingkungan hidup di Indonesia dalam pelaksanaannya di berbagai sekolah disebut juga dengan pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup menurut Soeriaatmadja (1999:117) ialah suatu proses yang bertujuan untuk

mengembangkan kesadaran umat manusia akan lingkungan hidupnya dengan seluruh permasalahan yang terdapat di dalamnya. Dengan kesadaran tersebut maka setiap individu akan mampu mengembangkan pengetahuan, sikap, motivasi, ketrampilan dan kesungguhan untuk baik secara pribadi atau bersama dalam mencari pemecahan masalah dan mencoba mencegah timbulnya masalah lingkungan hidup yang ada maupun yang baru. Widaningsih disadur oleh Landriany (2014) menjelaskan secara formal pendidikan lingkungan hidup menjadi salah satu alternatif yang rasional untuk memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum.

Pratomo (2008:26) menekankan bahwa pendidikan hidup sangatlah penting. Dengan diberikan pendidikan ini, maka diharapkan mampu menciptakan kesadaran dan merubah *mindset* serta perilaku akan pentingnya lingkungan hidup. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan hidup bersifat penting dan harus diberikan untuk semua jenjang sekolah maupun tingkatan umur, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Di sisi lain, pendidikan lingkungan bertujuan meningkatkan kesadaran, pertanggungjawaban dan rasa peka terhadap lingkungan dan segala permasalahan yang terjadi. Hal ini juga diperkuat oleh Karim (2003:46), bahwa tujuan pendidikan lingkungan hidup ialah menjadikan masyarakat sadar dan sensitif terhadap lingkungan dan berbagai masalahnya, serta memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, motivasi, dan kesediaan untuk bekerja secara perorangan atau kelompok ke arah pemecahan dan pencegahan masalah-masalah lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Stapp et. al. (1997:34), *“Environmental education is aimed at producing a citizenry that is knowledgeable concerning the biophysical environment and its associated problems, aware of how to help solve these problems, and motivated to work toward their solution”*. Pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan sebuah warga yang memiliki pengetahuan mengenai lingkungan biofisik dan permasalahan yang terkait, mengetahui bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, dan termotivasi untuk bekerja menuju solusi mereka.

Keseluruhan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan lingkungan hidup adalah kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan dengan menciptakan upaya dan tindakan yang melahirkan pengetahuan lingkungan seperti kesadaran, pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dalam mindset dan penerapannya yang dilakukan oleh individu yaitu siswa baik dikawasan lingkungan sekolah dan luar sekolah. Dalam pendidikan lingkungan hidup sebagai perwujudan penerapannya juga dibutuhkan beberapa aspek, Nurjhani dan Widodo dalam kutipan Landriany (2014) menjelaskan empat (4) aspek, antara lain:

- a. Aspek kognitif, pendidikan lingkungan hidup mempunyai fungsi untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan lingkungan, juga mampu meningkatkan daya ingat, penerapan, analisis, dan evaluasi.
- b. Aspek afektif, pendidikan lingkungan hidup berfungsi meningkatkan penerimaan, penilaian, pengorganisasian dan karakteristik kepribadian dalam menata kehidupan dalam keselarasan dengan alam.
- c. Aspek psikomotorik, pendidikan lingkungan hidup berperan dalam meniru, memanipulasi dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya dalam upaya meningkatkan budaya mencintai lingkungan.
- d. Aspek minat, pendidikan lingkungan hidup berfungsi meningkatkan minat dalam diri anak.

2. Program Adiwiyata

Salah satu wujud program pendidikan lingkungan hidup di Indonesia adalah Program Adiwiyata. Adiwiyata merupakan suatu bentuk dari program pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan di lembaga pendidikan sekolah setara SD, SMP, SMA, dan MTS/MA. Program pendidikan suatu sekolah ini mewakili keseluruhan sistem pengaruh yang membangun lingkungan belajar bagi murid-murid (Sutisna, 1983:39). Pendidikan lingkungan hidup dewasa ini menjadi keharusan dalam mata pelajaran di berbagai tingkat sekolah. Seperti yang diuraikan Widaningsih dalam kutipan Landriany (2014) bahwa pendidikan lingkungan hidup secara formal menjadi alternatif yang rasional dengan cara memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum. Diartikan pula pendidikan lingkungan hidup ialah salah satu faktor penting dalam keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga menjadi sarana yang sangat penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adiwiyata menurut Monalisa (2013), berasal dari kata Sansekerta “Adi” yang bermakna besar, agung, baik dan sempurna; sedangkan “Wiyata” yang bermakna tempat dimana seseorang mendapat ilmu pengetahuan dan norma. Berdasarkan definisi yang dijelaskan Tim Adiwiyata (2011), bahwa Adiwiyata diartikan sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Disimpulkan bahwa Adiwiyata merupakan suatu

bentuk program yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk menerapkan pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perilaku individu yang menciptakan pola pikir pendidikan berwawasan lingkungan dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup.

Program Adiwiyata merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013, dan merupakan penyempurnaan dari peraturan menteri sebelumnya yaitu implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2009. Program ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup (Anonim, 2012). Agar program Adiwiyata berjalan sebagaimana mestinya mencapai tujuan dan keberhasilannya, maka dibutuhkan prinsip-prinsip program Adiwiyata. Prinsip-prinsip kebijakan pada umumnya berlaku untuk jangka panjang, tetapi kebijakan umumnya tidak sempit, tidak kaku dan bersifat lentur sehingga mampu beradaptasi pada perubahan kondisi sosial-budaya, ekonomi dan biofisik (Asdak, 2012:77). Program Adiwiyata dalam pelaksanaannya dilandaskan tiga (3) prinsip utama, yaitu:

- a. Edukatif
Program adiwiyata harus merupakan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah menjadi sumber belajar (Adli, 2012).
- b. Partisipatif
Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran.
- c. Berkelanjutan
Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif (Tim Adiwiyata, 2011:3-4).

Selain prinsip-prinsip tersebut, Program Adiwiyata dalam mencapai tujuannya membutuhkan empat (4) komponen penting, yaitu:

- a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan
- b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan
- c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif
- d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan (Tim Adiwiyata, 2011:4)

Dengan adanya prinsip-prinsip dan komponen-komponen tersebut, diharapkan program Adiwiyata dalam pengimplementasian pendidikan lingkungan hidup di sekolah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dan guna, khususnya memberikan *mindset* dan praktek individu dalam menerapkan kegiatan keseharian yang tidak hanya dalam lingkup lingkungan sekolah tetapi lingkungan sekitarnya berdasarkan perilaku berwawasan lingkungan.

Program pemerintah dalam implementasinya kedepan tentu akan mengalami suatu pengembangan. Tidak hanya evaluasi terhadap suatu program yang diperoleh, tetapi pengembangan program juga akan tercipta. Menurut Glynn (2011:72) bahwa tahap dasar dalam pengembangan program adalah dasar konseptual. Hakikatnya dalam pelaksanaannya program dapat digunakan untuk mengembangkan hasil dan ditengah tujuan program. Pengembangan suatu program tidak langsung tercipta begitu saja dan dalam pelaksanaannya tidak serta merta mengalami keberhasilan tetapi juga kegagalan. Seperti layaknya kebijakan, pengembangan program juga melewati tahap suatu pemikiran, perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pengimplementasian serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat dipahami bahwa pengembangan program merupakan upaya terciptanya pola pikir atau pemikiran inovatif dalam pelaksanaan suatu program seperti usaha menciptakan dan membangun sebuah

ide pengembangan karya bertujuan mengembangkan dan meningkatkan program untuk pemenuhan kebutuhan publik serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Program adiwiyata yang sudah lama dibuat oleh pemerintah ini menjadi dasar dalam pelaksanaan dan penilaian penerapan adiwiyata diberbagai sekolah di Indonesia. Pengembangan program Adiwiyata berkaitan dengan upaya pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan lingkungan hidup yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk manajemen lingkungan hidup dengan tindakan pengembangan. Hal ini diperkuat dengan adanya definisi yang termuat dalam Undang – Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengelolaan lingkungan hidup dimaknai sebagai berbagai upaya terpadu menjadi satu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang terdiri dari kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Disisi lain Soemarwoto (1994:85) menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat tercapai dengan baik. Pengelolaan lingkungan hidup dalam pengembangannya memiliki ruang lingkup yang luas dengan beranekaragam cara, yaitu: pertama, pengelolaan lingkungan secara rutin; kedua, perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan; ketiga, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan; keempat, perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki

lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia (Soemarwoto, 1994:89).

Pengembangan dalam bentuk perencanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu terus dikembangkan secara dini. Hal ini dapat ditunjukkan melalui inovasi dan kreatifitas atas tuntutan jaman bahwa penting terciptanya pengembangan program yang lain selain program adiwiyata. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan bahwa program Adiwiyata mengalami pengembangan. Diharapkan kemungkinan tersebut dapat menciptakan suatu program lain yang tetap berpegang pada pendidikan berwawasan lingkungan hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini memberikan dan menjelaskan gambaran secara rinci mengenai keadaan dan gejala individu tenaga pendidik dan peserta didik maupun pihak luar. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada realita sosial yang ada dan hubungan gejala bersifat interaktif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui dan memahami data empiris serta mendalami interaksi komunikasi dan dampak yang terjadi baik bagi tenaga pendidik, peserta didik, dan pihak luar serta masyarakat terhadap lingkungan hidup sekitar yang ada di kawasan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Penelitian berupa data hasil penelitian yang lebih berkenaan dengan penjabaran terhadap data yang ditemukan di lapangan. Sehingga penginterpretasian data tersebut melalui pemahaman dan penyajian dalam bentuk kalimat, tabel dan gambar pada laporan penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang), beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dengan cakupan internal dan eksternalnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan faktor terpenting dalam mempertajam penelitian dan menjawab perumusan masalah. Dengan memusatkan pokok permasalahan yang terjadi dilapangan, seperti penelitian yang dilakukan dengan menentukan batasan-batasan dan menciptakan pemahaman yang baik serta dapat dimengerti. Penelitian kualitatif bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan, selain menetapkan penelitian berdasarkan variabel penelitian tetapi juga meliputi aspek keseluruhan dari situasi sosial yang diteliti seperti tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian pada Bab I, maka fokus penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang), antara lain:

1. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang), yang dalam hal ini merujuk pada teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, antara lain:
 - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - b. Sumberdaya
 - c. Karakteristik Agen Pelaksana
 - d. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang), yang meliputi:

a. Faktor Internal

b. Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian merupakan tempat objek peneliti yang akan diteliti dan diobservasi dalam melakukan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota yang mendapatkan gelar sebagai kota pendidikan dan memprioritaskan bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup di lingkungan sekolah dengan diantaranya keberhasilan dalam melaksanakan program sekolah Adiwiyata.

Sedangkan situs penelitian ialah tempat peneliti dalam melakukan penelitian yang mengacu pada kegiatan mendapatkan data secara langsung dan informasi yang diperlukan, menangkap kondisi yang sebenarnya sesuai fakta dan memilah data, serta berupaya untuk menyimpulkan. Situs penelitian ini dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang ialah salah satu sekolah yang telah melaksanakan program Adiwiyata hingga ke

tingkat Adiwiyata Mandiri. Berangkat dari hal tersebut untuk mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan maka peneliti merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 yang ditinjau dari lima variabel pada model implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn dan.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dengan mengamati objek penelitian di lapangan dan wawancara kepada narasumber. Sumber data primer tersebut berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu perangkat Badan Lingkungan Hidup Kota Malang yang berwenang dalam menangani pelaksanaan program sekolah Adiwiyata, wakil kepala sekolah bagian Kurikulum dan bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang; Ketua/Koordinator dan Tim Pokja (Kelompok Kerja) pelaksana program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang; siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dan salah satu warga Kelurahan Pandanwangi.

Sedangkan data sekunder ialah sumber yang secara tidak langsung didapatkan oleh peneliti, seperti dokumen, arsip, peraturan-peraturan (regulasi) dan referensi melalui media cetak maupun media elektronik dari berbagai sumber. Sumber data sekunder tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program sekolah Adiwiyata berupa dokumen-dokumen berupa gambar dan tabel, serta referensi tulisan-tulisan ilmiah peneliti terdahulu seperti jurnal dan *ebook online* yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5

Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.

Selain itu, peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu informan, dokumen dan fenomena atau peristiwa. Informan tersebut yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program sekolah Adiwiyata. Informan tersebut antara lain: Ibu Ila Meimuna selaku bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, Ibu Khusnul Khotimah selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum, Bapak Suseno selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Ibu Sri Wahyu Nastiti selaku Ketua dan Koordinator Panitia Program Adiwiyata serta Tim Pokja Bidang Kebijakan, Ibu Lina Herlina selaku Tim Pokja Bidang Kurikulum Program Adiwiyata, Ibu Rimtha Zalsalina selaku Tim Pokja Bidang Sarana Prasarana dan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang, antara lain Katon Prayogo P. (IX.7), Rifky A. (IX.4), Tri Indah (IX.6), dan Amanda Dwira A. (IX.5); serta Ibu Yayuk yang merupakan salah satu warga Kelurahan Pandanwangi.

Sumber data berupa dokumen diantaranya seperti tulisan atau keterangan, laporan kegiatan, arsip, gambar dan tabel, peraturan-peraturan (regulasi) yang berisikan standar dan komponen program serta media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Data dokumen ini diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Data berupa dokumen diharapkan dapat mendukung datum yang diperoleh sehingga menghasilkan datum yang valid.

Dan sumber data berupa fenomena atau peristiwa merupakan bukti dan hasil dari pengamatan peneliti akan gambaran fenomena yang ada dan sedang terjadi di lapangan. Pengamatan yang dilakukan peneliti berupa mengamati, mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan program sekolah Adiwiyata dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan internal dan eksternal yang ada di lapangan serta mempengaruhi pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti kepada informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan jawaban diperoleh melalui pencatatan dan perekaman serta adanya bantuan alat-alat seperti buku catatan, *audio recorder*, dan *camera*. Data tersebut merupakan data mentah dan nantinya akan melewati proses pengolahan dan penganalisaan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada perangkat Badan Lingkungan Hidup Kota Malang seperti pada bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga berperan sebagai panitia yang menangani pelaksanaan Program Adiwiyata. Sedangkan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang wawancara pada Wakil Kepala Sekolah, Tim atau Panitia pelaksanaan program sekolah Adiwiyata dan

siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang serta salah satu warga Kelurahan Pandanwangi.

2. Observasi/Survey

Observasi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dengan mengamati fakta dan subyek di lapangan secara langsung, perilaku subyek, interaksi subyek, situasi dan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati perilaku dan tindakan tenaga pendidik, peserta didik dan warga sekitar serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi dan sudah berlalu berupa tulisan, tabel, gambar, atau keterangan spesifik lainnya. Dokumentasi menjadi pelengkap dalam metode wawancara dan. Dokumen yang dibutuhkan berupa dokumen dari Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang meliputi catatan atau dokumen, perekam suara, foto yang membuktikan fakta dilapangan yang mendukung dan melengkapi data selama melaksanakan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh dan siap dalam melakukan penelitian serta terjun ke lapangan. Upaya validasi dengan pemahaman

metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Peneliti sebagai instrumen utama yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013:222). Selain itu, pendukung instrumen penelitian lainnya berupa alat-alat dokumentasi seperti perekam suara dan dokumen sebagai penguat argumen peneliti.

G. Analisis Data

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:14). Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data tersebut terdiri dari empat (4) tahap yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi antara lain:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti dalam pengumpulan data penelitian menggunakan tiga (3) teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilakukan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan pada Wakil Kepala Sekolah, Tim atau Panitia pelaksanaan program sekolah Adiwiyata dan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang

serta salah satu warga Kelurahan Pandanwangi. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan peneliti terhadap fenomena atau peristiwa yang ada dan terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang. Dan dokumentasi berupa catatan atau dokumen, perekam suara, foto yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Setelah tahapan pengumpulan data, selanjutnya data yang terkumpul tersebut melalui proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi data yang utuh berupa rangkuman, tabel, dan gambar. Kondensasi data meliputi analisis berupa bentuk-bentuk, terdiri dari bagian-bagian tertentu, fokus, membuang data yang tidak berkaitan, dan mengorganisasikan data sehingga tercapai keputusan akhir yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dan terverifikasi. Kondensasi data bertujuan menciptakan data yang valid sesuai dengan fakta dan membatasi data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini data tersebut disesuaikan dengan keperluan peneliti berdasarkan keterkaitan terhadap masalah dan fokus penelitian dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.

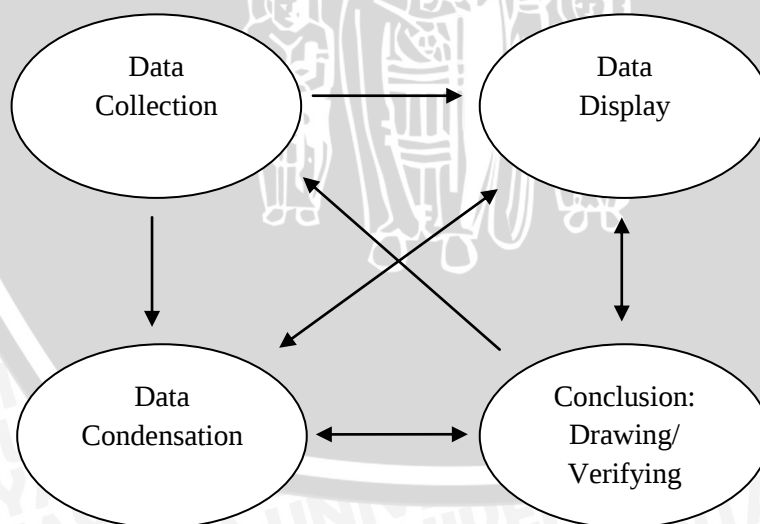
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya tahap penyajian data berupa uraian bersifat naratif, matrik, tabel, dan *network* (jejaring kerja). Data yang di analisis disajikan, ditelaah dan diperbandingkan dengan dasar empirik atau teori yang mendasari serta peraturan yang terkait dengan perumusan masalah dan fokus penelitian dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang.

Selain itu dalam penyajian data untuk memudahkan penelitian, maka data disusun berdasarkan urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan/verifikasi yang diartikan sebagai pencatatan pola, penjelasan, dan alur sebab-akibat. Penarikan kesimpulan dengan menyatukan keseluruhan data dan menginterpretasi data untuk menjadi semakin eksplisit dan menjadi pokok dalam penelitian. Dalam hal ini didukung dengan penemuan bukti-bukti lapangan dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang yang menjadikan kesimpulan dapat tercipta dan kredibel. Oleh karena itu kesimpulan menjawab rumusan masalah dan fokus penelitian yang dirancang sebelumnya.



Gambar 1.
Analisis Data Model Interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana
 Sumber: Miles, Huberman & Saldana (2014:14)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Kota Malang

Kota Malang merupakan wilayah cekungan yang terbentuk sejak masa purbakala telah menjadi kawasan pemukiman. Adanya berbagai sungai yang mengalir di jadikan sebagai kawasan pemukiman warga, seperti wilayah Dinoyo dan Tlogomas merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selain itu, berbagai prasasti salah satunya seperti Prasasti Dinoyo, bangunan candi dan arca, bekas-bekas fondasi batu bata, bekas saluran drainase, dan berbagai macam gerabah ditemukan tidak jauh dan berdekatan dari periode akhir zaman Kerajaan Kanjuruhan yang berjaya pada abad ke-8 dan ke-9.

Istilah nama “Malang” hingga saat ini masih dilakukan penelitian darimana asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih menggali sumber-sumber dan peninggalan yang ada untuk memperoleh jawaban tepat atas asal-usul nama “Malang”. Menurut beberapa hipotesa bahwa nama tersebut diartikan sebagai sebuah bangunan suci. Bangunan tersebut diantaranya berbentuk dua prasasti, yaitu Prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah merupakan Prasasti Mantyasih pada tahun 907, dan yang kedua prasasti pada tahun 908 yang ditemukan di wilayah antara Surabaya-Malang. Tetapi letak bangunan suci tersebut sesungguhnya masih belum didapatkan kepastian dan kesepakatan bersama oleh peneliti dan para ahli.

Salah satu pihak beropini bahwa letaknya berada di daerah gunung Buring dan pihak lain beropini berada di daerah Tumpang. Daerah tersebut terdapat sebuah desa bernama Malangsuka, oleh beberapa para ahli sejarah dianggap berasal dari kata Malangkuca yang bila diucapkan terbalik. Disisi lain, pendapat-pendapat tersebut diperkuat dengan banyaknya bangunan purbakala yang berserakan didaerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal merupakan bagian peninggalan zaman Kerajaan Singosari. Tentunya opini-opini tersebut masih tetap dibutuhkan pembuktian dan kebenaran akan pentingnya keterkaitan bangunan suci Malangkecewara dengan nama Malang. Namun berdasarkan temuan prasasti tembaga pada akhir tahun 1974 di perkebunan Bantaran, Wlingi yang terletak di sebelah barat daya Malang, menjadi salah satu bukti dan diketahui pemakaian nama Malang telah ada kurang lebih sejak abad 12 Masehi.

Para ahli sejarah menganggap bahwa timbulnya Kerajaan Kanjuruhan dipandang sebagai awal pertumbuhan pusat pemerintahan hingga saat ini yang berselang selama 12 abad telah berkembang menjadi Kota Malang. Seperti layaknya kehidupan kota-kota di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah “Gemente” (Kota). Sebelum tahun 1964, dalam lambang kota Malang terdapat tulisan “Malang namaku, maju tujuanku” yang merupakan terjemahan dari “Malang nominor, sursum moveor”. Ketika kota Malang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50

pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi “Malangkucecwara”. Semboyan baru ini diusulkan oleh Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, sebab kata tersebut sangat erat kaitannya dengan asal usul kota Malang pada masa Ken Arok sekitar 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar atau dekat candi yang bernama Malangkucecwara.

Setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, kota Malang mulai tumbuh dan berkembang terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai macam kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan adanya ruang gerak untuk melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan dan tidak terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan yang sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian berubah menjadi lahan perumahan dan industri.

b. Makna Lambang Kota Malang

Lambang yang berbentuk persegi bersudut lima membawakan bentuk “GUNUNG”, sedangkan dalam cerita pewayangan berbingkai merah putih Bintang bersudut lima (segilima) sama halnya dengan bintang pada perisai dalam lambang Negara Republik Indonesia yang dimaknai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugu adalah bangunan tugu yang terletak di alun-alun di depan balai kota Malang, yang berisikan:

- 1) Lima lingga menjulang ke atas membawakan lima sila dari Pancasila.

- 2) Bambu runcing di tengah-tengah lingga melambangkan kekuatan dan kesatuan, keperintisan dan kepahlawanan.
- 3) Tiga lingga yang nampak di depan membawakan arah tujuan perkembangan kota Malang menjadi kota Pendidikan, Industri dan Pariwisata

Untuk makna warna merah putih lambang bendera dan kemerdekaan Republik Indonesia, merah lambang keberanian dan putih lambang kesucian dan kebersihan. Kuning lambang keluhuran dan kebesaran, hijau lambang kesuburan, kemakmuran, kedamaian, harapan, kelangsungan dan kelanggengan. Biru muda lambang kesetiaan pada Tuhan Yang Maha Esa, tanah air dan bangsa.

Semboyan pada lambang kota malang ialah “MALANGKUCECWARA” (dibaca Malangkusyesywara) yang bermakna Tuhan Yang Maha Esa Menghancurkan yang Bathil, Menegakkan yang Benar. Semboyan tersebut pendek, padat dan jelas mengandung makna yang dalam dan berarti. Semboyan yang diusulkan oleh Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka diperoleh dari kata-kata sanskerta yang sangat erat kaitannya dengan asal mula kota Malang pada zaman Ken Arok, yang dibentuk dari tiga kata, yaitu:

- 1) MALA yang berarti segala sesuatu yang kotor, kecurangan, kepalsuan, kebatilan dan akibat buruk (dalam bahasa jawa sekarang orang mengartikan dan mengatakan sebagai “golek molo”);

- 2) ANGKUCA (dibaca: angkusya) yang berarti menghancurkan atau membinasakan;
- 3) ICWARA (dibaca: isywara) yang berarti Tuhan yang Maha Esa.

c. Keadaan Geografis Kota Malang

Kota Malang merupakan kota besar kedua setelah Kota Surabaya yang menjadi ibukota Jawa Timur. Letak astronomis wilayah kota Malang berada pada posisi 112.06° - 12.07° Bujur Timur dan 7.06° - 8.02° Lintang Selatan. Luas wilayah kota Malang adalah $110,06 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang (38.89 km^2), Sukun (20.97 km^2), Klojen (8.83 km^2), Blimbing (17.77 km^2) dan Lowokwaru (22.6 km^2). Adapun batas wilayah kota Malang, sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Ketinggian kota Malang terletak pada 440 – 667 meter diatas permukaan laut. Hal ini menjadikan kota Malang sebagai tujuan wisatawan luar kota dan wisatawan luar negeri dengan kelebihan iklim yang sejuk dan banyak potensi alam yang dimiliki. Lokasi paling tinggi ialah Pegunungan

Buring yang letaknya berada di sebelah timur kota Malang. Selain itu kota Malang dikelilingi oleh gunung – gunung, antara lain:

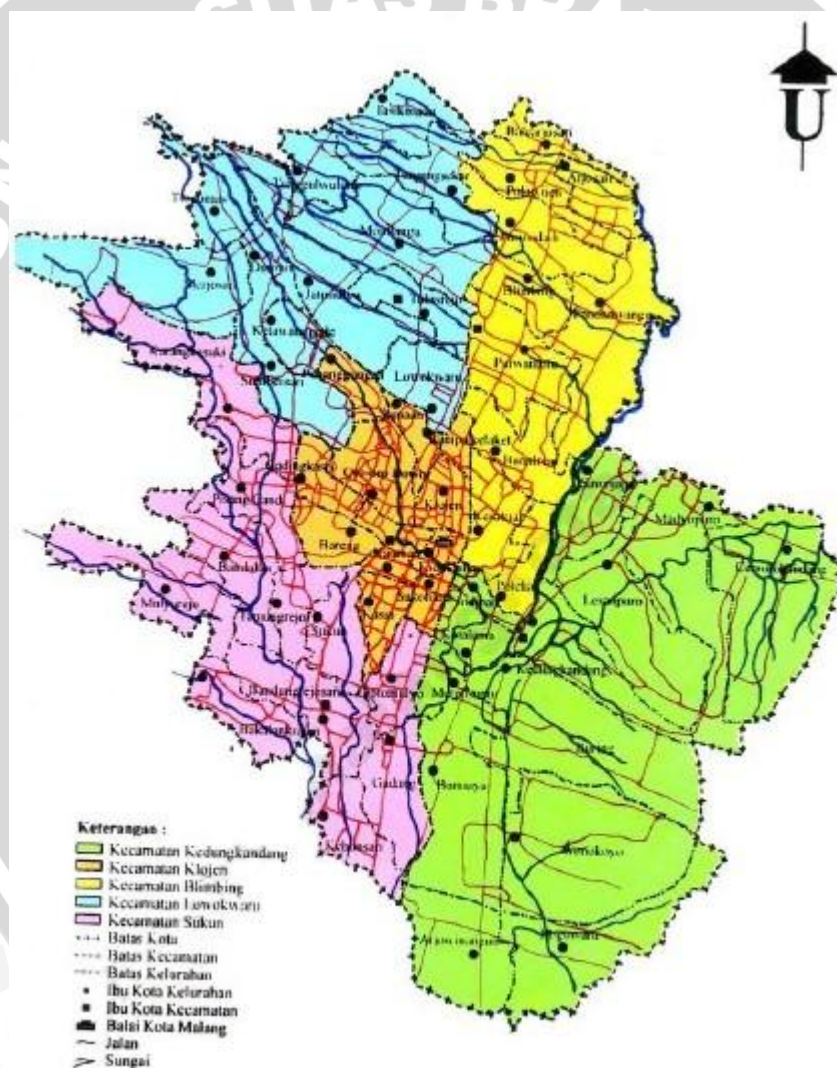
- 1) Sebelah Utara: Gunung Arjuno
- 2) Sebelah Timur: Gunung Semeru
- 3) Sebelah Barat: Gunung Panderman dan Gunung Kawi
- 4) Sebelah Selatan: Gunung Kelud

d. Keadaan Administratif Kota Malang

Secara administratif pemerintahan kota Malang diketuai oleh Walikota dan memiliki wakil yaitu Wakil Walikota, yang keduanya dipilih langsung oleh warga kota Malang dalam pemilihan Walikota setiap lima tahun sekali. Pimpinan kota Malang tersebut memiliki koordinasi bawahan atas pembagian wilayah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Kemudian kecamatan membawahi koordinasi kelurahan-kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah. Seluruh perwakilan kecamatan dan kelurahan, yaitu camat dan lurah tersebut merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Malang yang diberi mandat fungsi dan tugasnya masing-masing. Kelurahan di kota Malang tergolong dalam kategori kelurahan swasembada yang berarti telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri. Kota Malang terdiri atas lima (5) kecamatan, antara lain:

- 1) Kecamatan Kedungkandang, memiliki 12 Kelurahan, 114 RW dan 859 RT.
- 2) Kecamatan Sukun, memiliki 11 Kelurahan, 94 RW dan 862 RT.

- 3) Kecamatan Klojen, memiliki 11 Kelurahan, 89 RW dan 675 RT.
- 4) Kecamatan Blimbing, memiliki 11 Kelurahan, 127 RW dan 914 RT.
- 5) Kecamatan Lowokwaru, memiliki 12 Kelurahan, 120 RW dan 771 RT.



Gambar 2.
Peta Kota Malang
Sumber: Malang dalam Angka Tahun 2014

e. Keadaan Demografis Kota Malang

Kota Malang yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 820.243 jiwa di tahun 2010 dengan 404.533 jiwa penduduk laki-laki dan 415.690 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 5 kecamatan yang terdiri dari 57 kelurahan. Kepadatan penduduk mencapai sekitar 7.453 jiwa per km yang tersebar pada Kecamatan Kedungkandang sebanyak 174.477 jiwa, Kecamatan Sukun sebanyak 181.513 jiwa, Kecamatan Klojen sebanyak 105.907 jiwa, Kecamatan Blimbing sebanyak 172.333 jiwa, dan Kecamatan Lowokwaru sebanyak 186.013 jiwa. Perbandingan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000 dimana laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 lalu yaitu sebesar 0,80 persen. Sedangkan jumlah penduduk kota Malang berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2013 yaitu mencapai 840.8033 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,80 persen.

Penduduk kota Malang sebagian besar adalah suku Jawa, dan suku-suku minoritas yaitu seperti Madura, Arab, Tionghoa dan lain-lain. Agama yang dianut penduduk mayoritas kota Malang adalah Islam, selain itu juga Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Kota Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan Islam dengan banyaknya keberadaan Pesantren, dan juga sebagai pusat pendidikan agama Kristen. Selain itu, bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ialah Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran, yang memiliki dan menjadikan ciri khas yaitu Bahasa Walikan.

f. Visi dan Misi Kota Malang

Berdasarkan Undang – Undang No. 25 tahun 2011 pasal 1 angka 12 bahwa definisi visi ialah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi kota Malang tercantum dalam RPJMD kota Malang, yang mana harus dicapai pada tahun 2018. Di tahun 2013 – 2018 kota Malang memiliki visi “Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”. Disisi lain yang lebih penting ialah menentukan Peduli Wong Cilik (masyarakat kecil) sebagai dorongan dan semangat untuk pembangunan kota Malang. Bentuk kepedulian terhadap wong cilik merupakan jiwa dari terwujudnya pencapaian visi, bahwa seluruh kegiatan dan program pembangunan di Kota Malang harus membawa dampak yang positif dan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi wong cilik.

Semboyan visi Kota Malang ialah ‘BERMARTABAT’, yang mana jika diuraikan akronimnya yaitu BERSih, Makmur, Adil, Religius toleran, Terkemukan, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik. Visi ‘BERMARTABAT’ diharapkan dapat mewujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, asri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta mempunyai nilai religius yang tinggi berlandaskan sikap toleransi terhadap perbedaan yang terdapat di tengah masyarakat. Pemerintah mengharapkan adanya bersih dan meminimalisir dari KKN serta lebih meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan berdaya saing,

serta menjadikan Kota Malang sebagai kota berprestasi di berbagai bidang dan menjadikan kota yang terkemuka di Indonesia.

Makna kata ‘bersih’ dan ‘asri’ dalam visi yang berarti menunjukkan bahwa pemerintah dalam kegiatan pembangunan memiliki perhatian terhadap lingkungan, seperti menyertakan keindahan, kesegaran dan keharmonian lingkungan kota Malang. Seperti upaya pembangunan lingkungan kota yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan upaya agar terbebas dari sampah dan limbah, serta bersih dalam arti lain yang dapat menjadikan ciri sebuah kota yaitu bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk kata ‘makmur’ dijelaskan dalam visi bahwa kota Malang memiliki cita-cita yaitu masyarakat yang makmur dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara layak dan menjadikan masyarakat yang makmur yaitu masyarakat yang mandiri. Hal itu juga dimaknai serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah merupakan suatu bentuk perwakilan dan kepercayaan masyarakat secara langsung (melalui pemilu) akan kemakmuran hidup masyarakat kedepannya.

Kata ‘adil’ dalam visi dijelaskan bahwa pemerintah kota Malang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan prinsip adil yang merupakan upaya keadilan dalam pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Selain itu, kata ‘adil’ dimaksudkan untuk terciptanya kondisi yang adil dalam kehidupan masyarakat, seperti siapapun memiliki hak dan memiliki posisi yang setara dimata hukum dalam pelayanan publik yang diberikan pemerintahan kota Malang yang merupakan salah satu bentuk

penyelenggaraan pemerintahan. Visi yang lain yaitu ‘religius-toleran’ bermakna upaya terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran baik dalam sifat maupun sikap, serta menghargai perbedaan yang ada dan menjadikannya sebagai pendukung dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya makna kata ‘terkemuka’ yang berarti menjadikan kota Malang terkemuka dibandingkan kota-kota yang lainnya dengan memiliki daya saing tinggi dalam menciptakan banyak prestasi yang nantinya dapat diakui hingga dunia internasional dan menjadi pelopor dalam upaya pembangunan daerah. Disisi lain, terdapat kata ‘aman’ yang berarti kota Malang menciptakan dan menjaga ketentraman masyarakat dengan mewujudkan situasi dan kondisi kota yang aman, tertib dan terbebas dari segala tindakan negatif maupun gangguan lainnya, serta menjamin situasi yang aman dan kondusif dengan upaya awal mewujudkan ketertiban masyarakat.

Visi kata ‘berbudaya’ diartikan bahwa masyarakat menjunjung nilai, norma dan perilaku yang luhur berdasarkan adat istiadat dan peraturan negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari, serta makna berbudaya dalam arti lain sebagai upaya pelestarian terhadap warisan budaya masa lalu dengan menjaga dan menerapkan budaya tersebut hingga di masa mendatang. Dan kata terakhir ialah ‘terdidik’ yang berarti bahwa masyarakat layak untuk mendapatkan pendidikan berdasarkan peraturan perundangan dan sesuai dengan hak yaitu sesuai pilihan hidup bahkan

profesi yang dimiliki, serta diharapkan nanti hasilnya dapat menggerakkan pembangunan kota Malang.

Untuk mewujudkan visi-visi kota Malang dalam upaya pembangunan periode 2013-2018, maka misi kota Malang antara lain:

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota Malang sehingga bisa bersaing di Era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
- 6) Membangun kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
- 8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.
- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Gambaran Umum Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang

a. Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang

Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang merupakan salah satu sekolah yang berada di Kota Malang. Sekolah ini didirikan pada tahun 1985 dan awalnya merupakan filial Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Malang. Namun dua tahun kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang menempati gedung sendiri yaitu di Jalan Teluk Bayur No. 2 Malang. Status bangunan yang dimiliki ialah milik pemerintah, sebagaimana sekolah negeri pada umumnya merupakan milik pemerintah secara keseluruhan. Akreditasi yang disandang Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang ialah Akreditasi A.

Dalam perjalanannya Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pernah meraih juara 1 pada lomba Wawasan Wiyatamandala tingkat Provinsi Jawa Timur. Wawasan wiyatamandala ialah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kriteria keamanan/kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan dan ketertiban. Pada tahun pelajaran 2012/2013 Sekolah Pertama Negeri 14 Malang berhasil masuk sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi dan kemudian lolos seleksi penilaian Adiwiyata tingkat Nasional. Namun kegigihan Sekolah Menengah Pertama 14 Malang tidak berhenti pada Adiwiyata tingkat Nasional tetapi juga merambah hingga Adiwiyata Mandiri.



Gambar 3.
SMP Negeri 14 Kota Malang tampak depan
Sumber: Olahan Peneliti, 2015

Sekolah ini memiliki siswa sejumlah 785 orang dan secara keseluruhan memiliki 27 kelas, serta 256 siswa baru. Seperti sekolah-sekolah di kota Malang pada umumnya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang kegiatan belajarnya dilaksanakan pada pagi hari. Pelaksanaan kegiatan belajar dengan menggunakan metode ‘Moving Class’ atau berpindah kelas. Disisi lain, keunggulan sebagai fungsi pembelajaran lingkungan hidup di sekolah ini dengan adanya ketersediaan salah satu sarana prasarana sekolah yaitu seluruh kelas di sekolah ini dilengkapi dengan penggunaan LCD, proyektor, TV, CD Player dan Hotspot atau Wifi

di dalam kelas. Juga sebagai fungsi keefektivitasan pengawas lingkungan dan pembelajaran di lingkungan sekolah terpasang pula CCTV yang masing-masing tersebar pada 11 titik.

Alamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang terletak di Jalan Teluk Bayur No. 2 kelurahan Pandanwangi kecamatan Blimbing kota Malang, kode pos 65424 dan telepon 0341-479232, 474458. Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang strategis, sebab berada di antara pemukiman warga kelurahan pandanwangi dengan pemukiman perumahan Araya. Akses untuk menuju Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang sangat mudah dengan di dukung jarak ke pusat kelurahan Pandanwangi hanya 1 kilometer dan kecamatan Blimbing hanya 2 kilometer serta jarak ke pusat kota $\pm$ 6 kilometer. Selain itu, lokasi sekolah ini menjadi strategis sebab berada tidak jauh dari sekolah-sekolah tetangga lainnya, yaitu SDN Al-Kautsar Malang; SDN Pandanwangi 2 Malang; SDN Pandanwangi 3 Malang; SDN Pandanwangi 5 Malang; SMPN 16 Malang dan SMPN 24 Malang.

b. Visi dan Misi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang

Untuk menerapkan program sekolah Adiwiyata, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang memiliki visi yang berbeda dengan sekolah lainnya, yaitu:

“Terwujudnya Sekolah Unggul Yang Berkarakter Berdasarkan IMTAQ, IPTEK, Peduli dan Berbudaya Lingkungan.”

Dalam mewujudkan dan mencapai visi tersebut, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang menerapkan misi, antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi peserta didik yang cerdas, terampil, beriman, menguasai TI dan bahasa Internasional yang memiliki daya saing tinggi.
- 2) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik ditingkat Regional, Nasional, dan Internasional.
- 3) Meningkatkan kelengkapan perangkat kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan berwawasan kedepan.
- 4) Meningkatkan pengembangan proses belajar dengan metode dan strategi yang berpusat pada siswa dan berbasis TI.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan berwawasan lingkungan.
- 6) Meningkatkan pengelolaan manajemen sekolah yang profesional, transparan, akuntabel dan berbasis TI.
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem penilaian dan perangkat sekolah secara lengkap.
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan sekolah yang transparan dan akuntabel.
- 9) Menumbuhkembangkan rasa kepekaan siswa terhadap kerusakan lingkungan.
- 10) Membangun warga sekolah yang dapat melestarikan lingkungan.
- 11) Mengembangkan pembiasaan pada warga sekolah dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

- 12) Melaksanakan pembelajaran berkarakter yang berbasis religi, berbudi pekerti luhur, mandiri, disiplin, tanggung jawab dan menguasai bahasa Internasional.

Selain Visi dan Misi tersebut, adapula Tujuan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang dalam 4 tahun ke depan, yaitu:

- 1) Mewujudkan lulusan yang cerdas, beriman dan kompetitif dalam kemajuan IPTEK.
- 2) Mewujudkan prestasi akademik dan non akademik.
- 3) Mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif.
- 4) Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 5) Mewujudkan prasarana dan sarana pendidikan.
- 6) Mewujudkan manajemen sekolah yang profesional, transparan, akuntabel dan berbasis TI.
- 7) Mewujudkan pengembangan sistem penilaian secara lengkap.
- 8) Mewujudkan sistem pembiayaan sekolah yang transparan dan akuntabel.
- 9) Mewujudkan lingkungan sekolah dan masyarakat sekolah yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.
- 10) Mewujudkan pembelajaran berkarakter berbasis religi.

c. Struktur Organisasi

Untuk mewujudkan visi dan tujuan diatas tentu dilaksanakan oleh sumberdaya manusia atau perangkat didalamnya. Adapun data pegawai yang terdapat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang, yaitu:

Tabel 2. Data Pegawai SMPN 14 Malang

No	Nama Guru	Tugas	Pendidikan
1	Drs. Budi Santoso, M.M	Guru Penjas	S3
2	Siti Romelah, M.Pd	Guru IPS	S2
3	Siti Choirul Waroh, S.Pd	Guru Matematika	S1
4	Sri Utami, S.Pd	Guru B. Indonesia	S1
5	Mardiani, S.Pd	Guru IPA	S1
6	Renny Widi Puspita, M.Pd	Guru B. Inggris	S2
7	Pudji Achmad, S.Pd	Guru B. Inggris	S1
8	Tyas Tutik	Guru	
9	Murtini, S.Pd	Guru B. Indonesia	S1
10	Widayatiningsih, S.Pd	Guru PKn	S1
		Guru Ketrampilan	
11	Eny Masitah, S.Pd	Guru Seni Budaya	S1
		Guru IPS	
12	Moch. Syafii, S.Pd	Guru Akuntansi	S1
		Guru Seni Budaya	
13	Endang Widyastuti	Guru B. Daerah	
14	Dra. Endang Susilowati	Guru IPS	S3
15	Surasmo, S.Pd	Guru TIK	S1
		Guru PKn	
		Guru Seni Budaya	
16	Anastasia Yuniar A., S.Pd	Guru Matematika	S1
17	Suripto, S.Pd	Guru Penjas	S1
18	Dra. Sri Wahyu Nastiti	Guru IPA	S3
19	Riyanto, S.Pd	Guru IPS	S1
		Guru PKn	
20	Sugiarto, S.Pd	Guru Penjas	S1
21	Sugihartono, S.Pd	Guru Matematika	S1
22	Monica Werdi Lestari, S.Pd	Guru B. Indonesia	S1
23	Djuni Hariyanto, S.Pd	Guru Matematika	S1
24	Rini wahyuni, S.Pd	Guru Seni Budaya	S1
		Guru B. Daerah	
25	Indah Kurniawati, S.Pd	Guru IPS	S1
26	Suseno, S.Pd	Guru B. Indonesia	S1
27	Siti Aminah, S.Pd	Guru B. Inggris	S1
28	Dra. Lilik Fadilah	Guru PAI	S3
29	Eko Wardoyo, S.Pd	Guru IPA	S1
30	Drs. Himawan Darmo S.	Guru IPA	S3
31	Drs. Suhartono	Guru BK	S3
32	Dyah Puspito Rini, S.S	Guru B. Daerah	S1
33	Khusnul Khotimah, S.Pd	Guru BK	S1
34	Mamik Karyawati, S.Pd	Guru IPS	S1
35	Mahmudi, S.Pd	Guru PKn	S1
36	Dra. Tri Luwisih	Guru B. Indonesia	S3
37	Drs. Suprayitno, M.Pd	Guru IPS	S3
		Guru PKn	

No	Nama Guru	Tugas	Pendidikan
38	Asri Wahyu Utami, S.Pd	Guru B. Indonesia	S1
39	Rimtha Zalsalina P., S.Si	Guru IPA	S1
40	Lina Herlina, S.Pd	Guru Prakarya	S1
41	Driasmo, S.Pd	Guru Seni Budaya	S1
42	Harianto, S.Pd	Guru B. Inggris	S1
		Guru TIK	
43	Titik Masfufah, S.Pd	Guru Matematika	S1
44	Ridwan, S.Pd	Guru IPA	S1
45	Endrat Saechoni, S.Pd	Guru B. Inggris	S1
46	Simon Sinurat, S.Th	Guru Agama Kristen	S1
47	Wawan Markus	Guru Agama Katholik	
48	Lilis Indah S., S.Pd	Guru PLH	S1
		Guru B. Inggris	
49	Maratus Sholikhah, S.Pd	Guru Prakarya	S1
		Guru PLH	
50	Titin Budiastuti, S.Pd	Guru Seni Budaya	S1
		Guru PLH	
51	Rachmad Agung Basuki, S.Pd	Guru BK	S1
52	Faisol Kusuma, S.Pdi	Guru Agama Islam	S1
53	Imam Syafi'i, S.Pdi	Guru Agama Islam	S1
54	Marthinna Ratna Sari, S.Pd	Guru Penjas	S1
55	Enny Kusumaningsih, BcKn	Bag. TU	
56	Didik Wihardo	Bag. TU	
57	Eko Budi Rahayu	Bag. TU	
58	Rita Rihayu	Perpustakaan	
59	Tri Nurdiana	Lab. IPA & Dapur	
60	Mochamad Andre Setiawan	Security	
61	Agus Setiono	Security	
62	Mochammad Siswanto	Adm. Tatib	
63	Mochamad Hidayah	Kurir, pembantu Perpustakaan	
64	Sri Rejeki Handayani	Agendaris	
65	Mochamad Nafian	Pembantu Pelaksana	
66	Siyono	Pembantu Pelaksana	
67	Syaiful Mahfud	Pembantu Pelaksana	
68	Mujianto	Pembantu Pelaksana	

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Selain data pegawai tersebut, adapun masing-masing pembagian tugas guru dan karyawan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang secara lebih rinci, antara lain:

Tabel 3. Pembagian Tugas Guru dan Karyawan SMPN 14 Malang

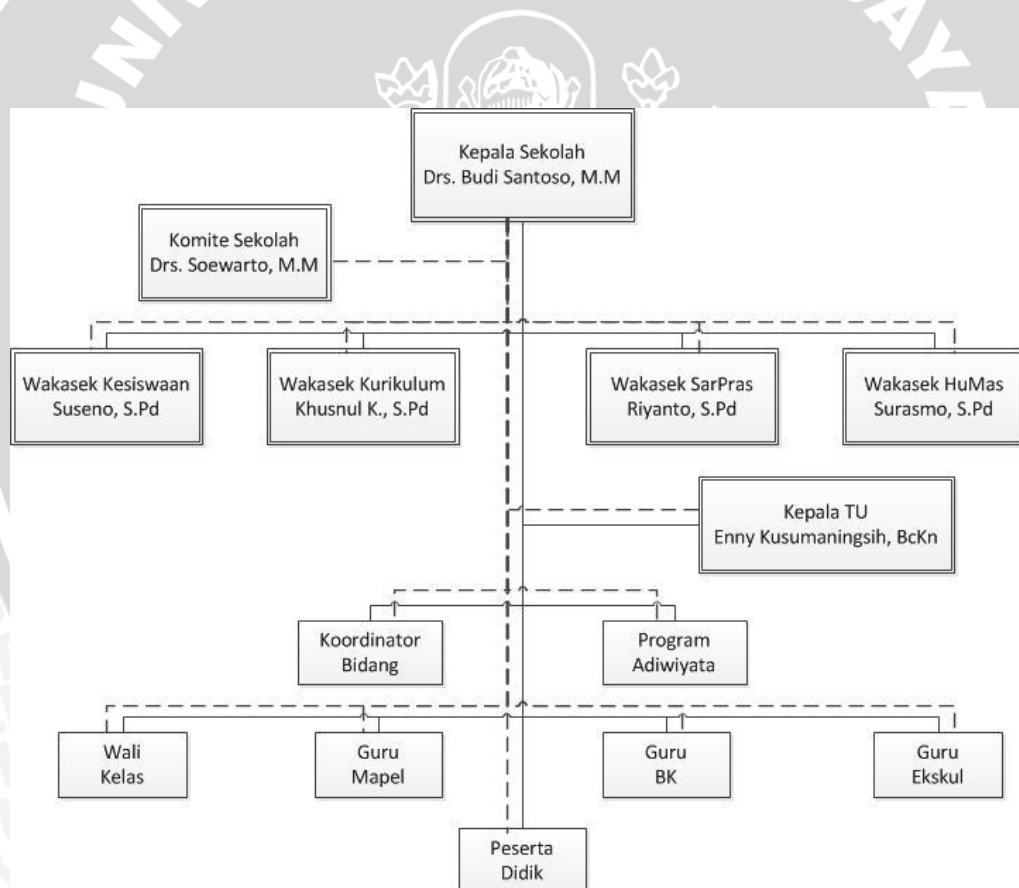
No.	Jenis Tugas / Jabatan	Nama
1.	Kepala Sekolah	Drs. Budi Santoso, M.M
2.	Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan	Suseno, S.Pd
2.1	Pembina OSIS	Hariyanto, S.Pd
2.1.1	Sie Ketaqwaan terhadap Tuhan YME	Asri Wahyu U., S.Pd
	Sie Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur	Dra. Hj. Lilik Fadillah
2.1.2	Sie Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Faisol Kusuma, S.PdI
	Sie Pendidikan dan Bela Negara	
	Sie Berorganisasi Politik dan Kepemimpinan	
2.1.3	Sie Ketrampilan dan Kewirausahaan	Rini Wahyuni, S.Pd;
	Sie Keamanan dan Kerindangan	Dra. Tri Luwisi
2.1.4	Sie Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi	A. Y. Andriani, S.Pd
	Sie Persepsi, Apresiasi dan Kreasi Seni	
2.2	Sie Tata Tertib	
2.2.1	Koordinator	Sugiarto, S.Pd
2.2.2	Anggota	Mahmudi, S.Pd
2.3	Pembina UKS	Dyah Puspito Rini, S.S
2.4	Pembiasaan Character Building	
2.4.1	PBB	Rahmad Agung B., S.Pd
2.4.2	Istighosah, Doa Pagi, Sholat, Tartil	1. Imam Syafi'i, S.PdI
		2. Dra. Hj. Lilik Fadillah
		3. Faisol Kusuma, S.PdI
2.4.3	Senam Pagi	Khusnul Khotimah, S.Pd
3.	Wakil Kepala Sekolah Kurikulum	Khusnul Khotimah, S.Pd
3.1	Sie Pembelajaran	Mamik Karyawati, S.Pd
3.2	Sie Evaluasi	Sugihartono, S.Pd
3.3	Sie Peningkatan Mutu	Mardiani, S.Pd
4.	Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana	Riyanto, S.Pd
4.1	Perbelanjaan	Enny Kusumaningsih
4.2	Pemeliharaan Lingkungan / Taman dan Gedung	Sri Utami, S.Pd
4.3	Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air	Suripto, S.Pd
4.4	Rumah Tangga	Widayatiningsih, S.Pd
4.5	Kepala Laboratorium	Drs. Suprayitno, M.Pd
5.	Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat	Surasmo, S.Pd
5.1	Administrasi, Absensi, Notula	Dra. Hj. Lilik Fadillah
5.2	Kesejahteraan, Kekeluargaan	Eny Masitah, S.Pd
5.3	Kantin Sekolah	Indah Kurniawati, S.Pd
5.4	Dharma Wanita	Titik Masfufah, S.Pd
5.5	KORPRI, PGRI	Asri Wahyu U., S.Pd

No.	Jenis Tugas / Jabatan	Nama
6.	Kepala Tata Usaha	Enny Kusumaningsih, BcKn
6.1	Kepegawaian, Perlengkapan, Inventaris, dan Gudang	Didik Wihardo
6.2	Kesiswaan dan Administrasi Umum	Eko Budi Rahayu
6.3	Perpustakaan	Rita rihayu
6.4	Laboratorium IPA dan Dapur	Tri Nurdiana
6.5	Keamanan / Satpam	1. Mochamad Andre S. 2. Agus Setiono
6.6	Administrasi Tatib	Mochammad Siswanto
	Kurir, Pembantu Perpustakaan	Mochamad Hidayah
6.7	Agendaris	Sri Rejeki Handayani
6.8	Pembantu Pelaksana	1. Mochamad Nafian 2. Siyono 3. Syaiful Mahfud 4. Mujianto
6.9	Bendahara	
6.9.1	BOSNAS	Dra. Endang Susilowati
6.9.2	BOSDA	Hj. Siti Romelah, M.Pd
6.9.3	BOS SMP Terbuka 03	Driasmoro, S.Pd
7.	Adiwiyata	
7.1	Ketua	Dra. Sri Wahyu Nastiti
7.2	Anggota	1. Lina Herlina, S.Pd 2. Rhimta Z. P. S.Si 3. Siti Aminah, S.Pd
8.	Dapodik, NUPTK, Padamu Negeri	
8.1	Koordinator	Surasmo, S.Pd
8.2	Anggota	Didik Wihardo
9.	P K G	
9.1	Koordinator	Moch. Syafi'i, S.Pd
9.2	Anggota	1. Siti Romelah, M.Pd 2. Renny Widi P., M.Pd 3. Drs. Suhartono 4. Surasmo, S.Pd

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Terdapat pula struktur kepengurusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang yang menjelaskan bahwa kepala sekolah membawahi wakil kepala sekolah dan bagian tata usaha. Dalam keberhasilan pelaksanaan program sekolah adiwiyata, terdapat empat wakil kepala

sekolah yang terbagi melaksanakan masing-masing tugas dan fungsi, yaitu: bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana prasarana dan bidang hubungan masyarakat. Di sisi lain dalam pelaksanaan tugasnya di sekolah, kepala sekolah bekerja bersama dan secara timbal balik dibantu oleh komite sekolah. Selain itu, kepala sekolah dalam pelaksanaan tugasnya di sekolah juga dibantu oleh bagian koordinator bidang, bagian program adiwiyata, bagian wali kelas, bagian guru mata pelajaran, bagian guru BK dan bagian guru ekstrakurikuler.



Gambar 4.
Struktur Kepengurusan SMP Negeri 14 Malang
Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Untuk kelancaran pelaksanaan program sekolah adiwiyata, terdapat susunan tim pengembang program adiwiyata, yaitu:

Tabel 4. Panitia Pengembang Program Adiwiyata SMP Negeri 14 Malang

No.	Jabatan / Tugas	Nama
1.	Pembina	Drs. Budi Santoso, M.M
2.	Koordinator	Dra. Sri Wahyu Nastiti
3.	Sekretaris	Khusnul Khotimah, S.Pd
4.	Bendahara	Dra. Endang Susilowati
5.	Tim Teknis:	
	a. Pokja Bidang Kebijakan	Dra. Sri Wahyu Nastiti
	b. Pokja Bidang Kurikulum	Lina Herlina, S.Pd
	c. Pokja Bidang Kegiatan Partisipatif	Siti Aminah, S.Pd
	d. Pokja Bidang Sarana Prasarana	Rimtha Zalsalina P., S.Si

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

B. Penyajian Data

1. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang

Penelitian berjudul Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 ini didasarkan pada aksi sadar dan peduli terhadap lingkungan sekolah berwujud menciptakan sekolah berbudaya lingkungan yang diikuti dan diterapkan oleh sekolah negeri dan sekolah swasta. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 pasal 4 (empat) dijelaskan bahwa sekolah-sekolah berjenjang tersebut, antara lain: Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI); Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs); Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Sekolah-sekolah tersebut terdapat di masing-masing provinsi yang tersebar di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Salah satu kota yang melaksanakan program Adiwiyata adalah kota Malang. Kota Malang merupakan kota besar kedua setelah Kota Surabaya yang berada di provinsi Jawa Timur. Salah satu semboyan dalam lambang yang dimiliki kota Malang adalah sebagai Kota Pendidikan, yang setiap tahunnya menjadi daya tarik pelajar luar kota, provinsi bahkan luar pulau untuk menempuh dan melanjutkan kegiatan studinya di kota Malang. Kota Malang dengan jumlah kurang lebih 562 sekolah negeri maupun swasta yang terdiri dari 322 SD/MI, 125 SMP/MTs, 62 SMA/MA, dan 53 SMK. Oleh karena itu, pada tahun 2010 pemerintah kota Malang bersama Badan Lingkungan Hidup menerapkan program Adiwiyata. Adanya program sekolah Adiwiyata bertujuan menciptakan tingkat kesadaran peserta didik terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di kota Malang. Hal ini dilakukan dengan menyertakan upaya sadar dan peduli terhadap lingkungan yang ditanamkan sejak dini bagi warga sekolah, baik peserta didik maupun tenaga pendidik terhadap lingkungan hidup baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Program Adiwiyata yang bertujuan menjadikan sekolah berbudaya lingkungan dengan upaya sadar dan peduli warga sekolah terhadap lingkungan hidup ini merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Program Adiwiyata terdiri dari empat kategori penghargaan yaitu

Adiwiyata Kota/Kabupaten, Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional, dan Adiwiyata Mandiri. Sekolah yang mendapat nilai 56 maka mendapatkan gelar sebagai Adiwiyata Kota/Kabupaten. Sekolah tersebut dapat diajukan ke Adiwiyata Provinsi dengan syarat nilai 64. Setelah Adiwiyata Provinsi, sekolah tersebut dapat diusulkan ke tingkat Adiwiyata Nasional dengan syarat nilai 72. Dan jika sekolah tersebut dapat diajukan ke tingkat Mandiri maka sekolah tersebut harus mengimbas pada sepuluh sekolah yang tentunya berkriteria Adiwiyata Kota/Kabupaten selama satu tahun. Disisi lain apabila terdapat kehabisan sekolah di wilayah kota, maka diperbolehkan mengimbas pada sekolah.

Penilaian sekolah Adiwiyata didasarkan pada komponen dan standar Program Adiwiyata yang terdiri dari empat komponen dan delapan standar. Selain itu dalam menunjang pelaksanaan program Adiwiyata, Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, Departemen Agama, Perguruan Tinggi dan instansi serta organisasi atau LSM lembaga sekitar lainnya. Penilaian Adiwiyata selain dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Malang juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Badan Lingkungan Hidup Kota Malang melakukan penilaian pada komponen ketiga dan keempat, yaitu Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ramah Lingkungan. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Malang melakukan penilaian pada komponen kesatu dan kedua, yaitu Kebijakan Berwawasan Lingkungan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Partisipatif. Berikut penuturan Ibu Ila Meimuna:

“Untuk pelaksanaan Adiwiyata ini kita bekerjasama dengan Diknas, Dinkes, Depag, LSM yang mengurus tentang permasalahan lingkungan hidup dan

instansi maupun pihak swasta sekitar lainnya. Kita menyesuaikan dan mengikuti prosedur peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerja bersama instansi dan swasta. Makanya dalam penilaian Adiwiyata itu Dinas Pendidikan Kota Malang menilai pada komponen satu dan dua tentang Kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sedangkan BLH menilai pada komponen tiga dan empat tentang Partisipatif dan Sarana Prasarana.” (Wawancara dengan Ibu Ila Meimuna, SE selaku bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 09.15 WIB).

Berdasarkan data pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang pada tahun 2010 hingga tahun 2014 terdapat 40 sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata, baik Adiwiyata Kota, Adiwiyata Propinsi, Adiwiyata Nasional maupun Adiwiyata Mandiri. Dan salah satu sekolah yang menerapkan program Adiwiyata adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tahun ini telah mampu menerapkan program Adiwiyata. Sebelum mengikuti seleksi sekolah Adiwiyata Mandiri, sekolah harus memenuhi persyaratan melakukan pembinaan atau mengimbas terhadap sepuluh sekolah yang telah mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Kota selama satu tahun.

Implementasi program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang sudah merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013. Selain itu, terdapat alasan yang melatarbelakangi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang menerapkan program sekolah Adiwiyata yaitu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan yang terjadi sekarang seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, perubahan iklim, global warming dan sebagainya. Hal tersebut menciptakan adanya keinginan, keyakinan dan tekad untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Disisi lain,

alasan yang mendasari yaitu sekolah merupakan tempat yang paling mudah untuk memberikan pengaruh baik dalam merubah dan menciptakan pola pikir dan perilaku warga sekolah agar peduli terhadap lingkungan, serta dapat menciptakan kerjasama dengan pihak luar. Hal ini seperti yang diuraikan oleh Ibu Khusnul Khotimah:

“Iya mbak, tentu pelaksanaan Program Adiwiyata di SMPN 14 Malang berpedoman pada Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013. Alasan kita ada dua, pertama melihat situasi dan kondisi lingkungan yang terjadi sekarang seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, perubahan iklim, global warming dan sebagainya. Sehingga kita punya keyakinan dan tekad untuk punya program peduli dan berbudaya lingkungan. Kedua, sekolah adalah tempat yang paling mudah untuk memberikan pengaruh baik karena jumlah siswanya banyak, langsung tepat sasaran, bisa langsung kerjasama dengan wali murid, lingkungan sekitar dan pihak-pihak terkait.” (Wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB).

Upaya keberhasilan menciptakan sekolah berbudaya lingkungan yang diterapkan oleh warga sekolah yang secara sadar dan peduli terhadap lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang ditunjukkan dengan gelar yang diperolehnya sebagai sekolah yang menyandang Adiwiyata Mandiri tahun 2015. Untuk menjadikan tolak ukur pengamatan keberhasilan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dalam menerapkan program Adiwiyata, maka peneliti menggunakan lima variabel pada model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, yaitu: 1.) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; 2.) Sumberdaya; 3.) Karakteristik Agen Pelaksana; 4.) Sikap/Kecenderungan para Pelaksana; dan 5.) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada variabel ini yang menjadikan ukuran kinerja implementasi Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang ialah komponen Kebijakan Berwawasan Lingkungan. Hal ini diukur melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada standar yang pertama yaitu KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memaparkan visi, misi dan tujuan sekolah yang memuat upaya pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal ini juga terdapat dalam susunan visi, misi dan tujuan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/atau mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti, untuk visi sekolah termuat satu upaya pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Berikut penuturan Ibu Sri Wahyu Nastiti:

“Visi sekolah kita memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mewujudkan sekolah yang unggul yang berkarakter berdasarkan IMTAQ, IPTEK, peduli dan berbudaya lingkungan. Yang mana visi mewujudkan sekolah unggul di setiap bidangnya yang memiliki karakter; kemudian warga sekolah yang memiliki pola pikir dan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada kedepannya. Dan juga mewujudkan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan dengan upaya pelestarian dan pertanggung jawaban terhadap lingkungan hidup sekitar. Adanya pelaksanaan Adiwiyata ini menjadikan warga sekolah lebih memahami dan menerapkan dalam kesehariannya.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 12.10 WIB).

Sedangkan Misi sekolah memuat tiga upaya pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Yaitu terdapat pada poin 9, 10 dan 11, antara lain:

Menumbuhkembangkan rasa kepekaan siswa terhadap kerusakan lingkungan; Membangun warga sekolah yang dapat melestarikan lingkungan; dan Mengembangkan pembiasaan pada warga sekolah dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk tujuan sekolah dalam 4 tahun kedepan memuat satu upaya pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, yang terdapat pada poin 9 yaitu mewujudkan lingkungan sekolah dan masyarakat sekolah yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. Keseluruhan visi, misi dan tujuan sekolah tersebut telah dipahami dan diterapkan oleh warga sekolah.

Berikutnya struktur kurikulum yang memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri. Selain itu, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang juga menetapkan kebijakan untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Peraturan Kepala Sekolah seperti SK Penetapan Program Adiwiyata; SK Pembiasaan dan Kebudayaan; SK Tim Pengembang Adiwiyata; SK Tim Kajian Lingkungan; SK Penghematan Sumberdaya Alam (SDA); SK Pemeliharaan Lingkungan dan Sarana dan Prasarana; SK Kader Lingkungan; SK Polisi Hijau; SK Peraturan kantin ramah lingkungan; SK Kegiatan rutin tahunan bertema lingkungan hidup dan sebagainya.

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang, kegiatan mengembangkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup (PLH), melalui menetapkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran

monolitik dan terintegrasi; dan menetapkan kegiatan sekolah yang mendukung terlaksananya pendidikan lingkungan hidup melalui pembiasaan dan pengembangan diri. Hal ini diterapkan dan dintegrasikan materi lingkungan hidup pada sepuluh mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Daerah, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Untuk kegiatan pengembangan diri melalui budaya atau pembiasaan yaitu Sejenak/Semenit Memungut Sampah (SEMUT), Green & Clean, Sentuhan Kasih Sayang, Ketaqwaan, Healthy, kegiatan ekstrakurikuler seperti kader lingkungan. Kader-kader lingkungan sekolah antara lain Toga, Holtikultura, Kantin, Kompos, Biopori, Taman, *Green House* dan Anggrek, Satwa, Sampah, Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Daur Ulang, Kamar Mandi Putera, Kamar Mandi Puteri, dan UKS serta Polisi hijau.

Penerapan yang ketiga ialah adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Materi lingkungan hidup pada sepuluh mata pelajaran diatas masing-masing memiliki ketuntasan minimal belajar yaitu standar ketuntasan minimal 75. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suseno bahwa semua mata pelajaran memiliki ketuntasan minimal belajar yang sama yaitu 75. Disisi lain apabila terdapat nilai yang kurang atau dibawah dari 75, maka siswa diharuskan melakukan remidi untuk memperbaiki ulang nilai mata pelajaran tersebut.

“Kalau Bahasa Indonesia ketuntasan minimalnya 75. Standar nasionalnya kan 75, rata rata 75, sekarang semua mata pelajaran itu 75. Walaupun sebenarnya diperbolehkan, tapi kalau terlalu tinggi, khawatirnya kita tidak bisa mencapai diatas itu, jadi kita mengikuti standar nasional 75.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.45 WIB).



Gambar 5.
Wawancara peneliti dengan Bapak Suseno
Sumber: Olahan Peneliti, 2015

Penerapan yang ketiga ialah adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Materi lingkungan hidup pada sepuluh mata pelajaran diatas masing-masing memiliki ketuntasan minimal belajar yaitu standar ketuntasan minimal 75. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suseno bahwa semua mata pelajaran memiliki ketuntasan minimal belajar yang sama yaitu 75. Disisi lain apabila terdapat nilai yang kurang atau dibawah dari 75, maka siswa diharuskan melakukan remidi untuk memperbaiki ulang nilai mata pelajaran tersebut.

b. Sumberdaya

Selanjutnya variabel ini memuat sumberdaya manusia (SDM), waktu, dan sumberdaya finansial atau keuangan serta sumberdaya sarana dan prasarana. Sumberdaya manusia yang dimaksud yaitu tenaga pendidik yang bertindak sebagai agen pelaksana dan peserta didik sebagai pelaksananya dalam pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Hal ini diukur melalui apakah tenaga pendidik dan peserta didik sering atau berpengalaman dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai penjelasan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti, sebagai berikut:

“Pelatihan bisa pelatihan oleh tim kami sendiri atau pelatihan dari instansi lain. Tujuannya selain mengajarkan masing-masing bagian tugas kader-kader, utamanya kita mengajak anak-anak untuk mengikuti pembelajaran lingkungan hidup di luar sekolah. Pelatihan yang disediakan oleh pihak luar ada koordinirnya, begitu juga dengan pelatihan kita sendiri. Kalau kita menginginkan pelatihan dari pihak luar maka kita mengajukan proposal, membuat MoU antara kita dengan mereka, kita meminta materinya yang disajikan apa. Kemudian untuk jumlah siswa itu tergantung kapasitas yang disediakan pihak luar kepada kita.

Kegiatan pendidikan atau pelatihan itu ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Oleh karena itu kita memperhatikan dari segi materi pembelajaran lingkungan hidup, seperti materi untuk kelas VII itu tentang sampah maka kita pergi ke TPA Supit Urang. Contoh lain seperti Badan Lingkungan Hidup, BALITJESTRO di daerah Tlekung – Batu, BPTP dan di Beji – Batu tempat pelatihan pembuatan pabrik keju” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan penjelasan Ibu Sri Wahyu Nastiti dikatakan bahwa tenaga pendidik dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pihak luar maupun pihak sekolah sendiri. Setiap pendidikan atau pelatihan baik yang diadakan oleh pihak luar maupun pihak sekolah sendiri terdapat koordinator pelaksanaannya.

Persyaratan untuk mengajukan pendidikan atau pelatihan pihak luar yang diadakan sekolah sendiri yaitu pihak sekolah mengajukan proposal kepada pihak luar, membuat MoU antara pihak sekolah dengan pihak luar tersebut, meminta materi pembelajaran lingkungan hidup dan materi yang disajikan tersebut dipilah berdasarkan materi pelajaran yang diajarkan pada masing-masing tingkat kelas, serta memperhitungkan jumlah kapasitas siswa yang dapat disediakan atau ditampung oleh pihak luar. Beberapa pendidikan atau pelatihan yang dilakukan antara lain Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, TPA Supit Urang; pabrik keju Beji di Batu; BALITJESTRO dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kota Malang (BPTP).



Gambar 6.
Pelatihan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Malang
Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Selain diukur melalui pendidikan atau pelatihan juga diukur melalui kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Mengenai apakah kompetensi yang

dimiliki tenaga pendidik sudah memenuhi standar dan kualifikasi akademik dalam menunjang pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang serta bagaimana dengan peserta didiknya sendiri?, Ibu Sri Wahyu Nastiti menuturkan sebagai berikut:

“Ya, saya kira semua tenaga pendidik sudah memenuhi. Nah, pada umumnya yang mengajar dalam pembelajaran lingkungan hidup itu guru IPA. Tetapi karena kemarin bertabrakan dengan jam mengajar, maka ada beberapa guru yang tidak bisa. Sehingga kita beri konsekuensi pelatihan, jadi itu meningkatkan kompetensi guru. Materi dengan menyesuaikan standar Kementrian Pendidikan kita berikan kepada siswa secara terkoordinir. Kita membekali dan menyediakan LKS, biasanya kita mencari materi untuk LKS sendiri. Dengan pembelajaran yang kita berikan seperti itu membuat siswa berperan aktif mengikuti pembelajaran.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 14.00 WIB).

Penuturan Ibu Sri Wahyu Nastiti tersebut mengartikan bahwa kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang sudah memenuhi standar dan kualifikasi akademik dalam pembelajaran lingkungan hidup di sekolah. Dengan adanya pelatihan atau pendidikan tersebut menjadi keharusan untuk diikuti oleh tenaga pendidik yang secara tidak langsung meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Materi pengajaran yang diberikan tenaga pendidik kepada peserta didik menyesuaikan standar Kementrian Pendidikan dan tenaga pendidik membekali peserta didik dengan menyediakan LKS dan materi pembelajaran yang sendiri dan hal ini menciptakan keikutsertaan peserta didik dalam pembelajaran yang diberikan.

Kemudian pertanyaan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dalam melaksanakan Program

Adiwiyata untuk menuju sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, Ibu Sri Wahyu

Nastiti menerangkan bahwa:

“Pelaksanaan Adiwiyata membutuhkan waktu selama 3 tahun. Untuk Adiwiyata Kota, Provinsi dan Nasional sekitar 2 tahun, persiapannya 1 tahun untuk pengimbasan 10 sekolah, kemudian sampai ke Adiwiyata Mandiri 3 tahun. Jadi sekolah kita pada tahun 2013 langsung dapat Adiwiyata Kota, Provinsi dan Nasional, dan tahun ini sebagai Adiwiyata Mandiri. Sebenarnya sekolah kita paling cepat dari sekian sekolahan. Karena Tim Sekolah bekerja cepat dan berpedoman pada dokumen 1-4 dari komponen dan standar Adiwiyata. Itu menjadikan dasar kita untuk langsung bekerja dan menggerakkan semua pokja sekolah. Semua pokja dalam Tim Sekolah bekerjasama dan bersinergi satu sama lain. Masing-masing tim menggerakkan perangkat dan dibantu oleh staf. Semuanya saling membantu satu sama lain seperti staf Humas membantu di bagian Kebijakan, Staf Kurikulum membantu di bagian Kurikulum, dan Staf Kesiswaan membantu di bagian Partisipasi.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 14.05 WIB).

Dijelaskan bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang membutuhkan waktu selama tiga tahun menuju sekolah Adiwiyata Mandiri. Pencapaian ini tentu melalui penilaian tahap awal yaitu Adiwiyata Kota, Provinsi dan Nasional selama dua tahun yaitu 2013-2014. Dan membutuhkan waktu selama satu tahun untuk memperoleh Adiwiyata Mandiri dengan mengimbankan kepada 10 sekolah. Hal tersebut tercapai dengan kerjasama dan sinergi yang tercipta secara baik antara satu sama lain, dimana kelompok kerja (Pokja) secara cepat bergerak berupa pengelompokkan tim yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, namun tetap membantu satu sama lain.

Selain mengenai waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan Program Adiwiyata untuk menuju sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, Ibu Sri Wahyu Nastiti juga menguraikan bahwa tidak terdapat batas waktu dalam menerapkan

program Adiwiyata. Sebab hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup dan menghindari tindakan manusia yang mengabaikan lingkungan sekitar serta untuk tetap peduli dan melestarikan lingkungan hidup di sekolah. Disisi lain hal tersebut menjadi suatu keharusan untuk evaluasi bagi sekolah yang telah menyandang sebagai sekolah Adiwiyata. Evaluasi tersebut dilakukan dua tahun sekali oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang. Berikut penuturan Ibu Sri Wahyu Nastiti:

“Tidak ada batasan waktunya, karena kita akan tetap melaksanakannya. Sebab setiap dua tahun sekali itu ada evaluasi, masih layak atau tidak kita menyandang sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri. Evaluasi itu dilakukan oleh KLH dan BLH. Karena dari pengalaman sebelumnya, sekolah-sekolah yang telah menjadi sekolah Adiwiyata ternyata terabaikan, lingkungannya rusak dan tidak diperhatikan. Itu banyak, contoh waktu kami di Gresik, ada sekolah yang kondisinya terbengkalai.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 14.05 WIB).

Selanjutnya sumberdaya keuangan diukur pada komponen Kebijakan Berwawasan Lingkungan melalui standar kedua yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada standar ini terdapat dua poin penting yang menjadi keharusan untuk diterapkan. Poin pertama, sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20% dari total anggaran sekolah. Dalam hal ini Sekolah Menengah Negeri 14 Malang telah melakukan penganggaran khusus dengan menyisihkan terhadap pembiayaan kegiatan-kegiatan terkait program sekolah Adiwiyata.

**Tabel 5. Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)
Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang Tahun Pelajaran 2014/2015**

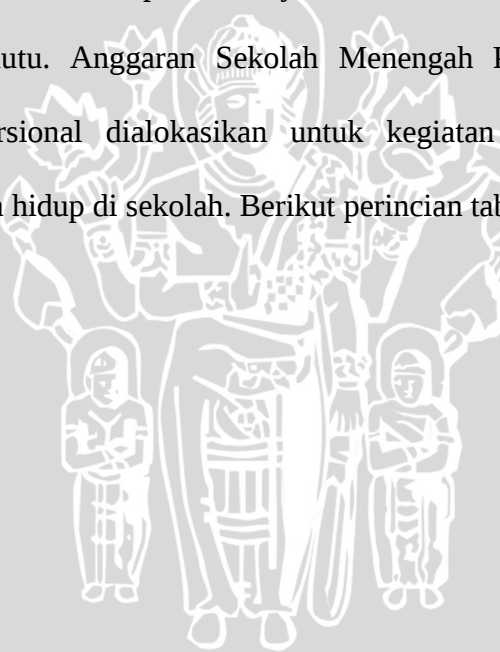
No.	Program Sekolah	BOSNAS	BOSDA	Jumlah BOS	Anggaran Adiwiyata
1.	Pengembangan Standar Kelulusan (SKL)	10.000.000	416.154.400	426.154.400	85.253.200
2.	Pengembangan Standar Isi (Kurikulum)	14.408.000	-	14.408.000	3.743.000
3.	Pengembangan Standar Proses Pembelajaran	81.530.000	187.969.500	269.499.500	83.349.000
4.	Pengembangan Pes. didik dan Tenaga Pendidik	146.560.640	180.231.256	326.791.896	15.997.500
5.	Pengembangan Sarana dan Prasarana	-	92.700.000	92.700.000	93.600.000
6.	Pengembangan Standar Pengelolaan	31.110.000	45.244.500	76.354.500	11.400.000
7.	Pengembangan Standar Pembiayaan	119.088.860	35.370.344	154.459.204	16.077.500
8.	Pengembangan Standar Penilaian	180.332.500	18.170.000	198.502.500	5.100.000
	Jumlah	583.030.000	975.840.000	1.558.870.000	314.520.200
	Prosentasi Anggaran Adiwiyata 20,18%				

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Tabel 5 menjelaskan bahwa rekapitulasi rencana kerja dan anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah Rp. 314.520.200,- sedangkan dana keseluruhan bantuan operasional sekolah berjumlah Rp. 1.558.870.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan program sekolah Adiwiyata. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa dana diperoleh dari bantuan operasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan prosentasi anggaran Adiwiyata dari total anggaran sekolah ialah 20,18%. Di sisi lain terlihat bahwa dana bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah pusat (BOSNAS) dan daerah (BOSDA) dapat mencukupi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah.

“RKAS tahun pelajaran 2014/2015 hanya bersumber dari dana BOSNAS dan BOSDA yang besarnya tidak sama pada setiap daerah. Tahun 2014/2015 tidak ada *Block Grant* yang diterima sekolah kita, jadi semua anggaran dalam RKAS bersumber dari dana BOS saja mbak. Selain itu, ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk anggaran sekolah Adiwiyata itu 20% dari RKAS lengkap dan dirinci dalam 8 standar. Sehingga 20,18% itu jumlah dari prosentasi dari 8 standar yang ada dalam RKAS.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 12.20 WIB).

Poin kedua, anggaran sekolah di alokasikan secara proporsional untuk kegiatan kesiswaan, kurikulum dan kegiatan kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu. Anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang secara proporsional dialokasikan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah. Berikut perincian tabel tersebut:



Tabel 6. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang Tahun Pelajaran 2014/2015

No.	Program dan Kegiatan	Volume per Tahun	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana	
					BOSNAS	BOSDA
A.	Program Sekolah					
1.	Standar Kelulusan (SKL)					
1.1	Meningkatkan rata-rata nilai Ujian Nasional:					
	Kegiatan Pengayaan Materi untuk peningkatan nilai UN			125.384.000		125.384.000
1.2	Workshop penyusunan KKM, Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan			3.650.000		3.650.000
1.3	Melaksanakan program unggulan:					
1.3.1	Pembinaan Karakter Building					
	a. Kegiatan Berbasis Religi					
	1. Pengadaan alat hadrah dan transport ustad			8.000.000		8.000.000
	2. Kegiatan wajib ekstrakurikuler Baca tulis Al Qur'an			25.700.000		25.700.000
	b. Kegiatan Berbasis kedisiplinan dan Budi pekerti Luhur					
	1. Konsumsi budaya salim sbg cinta kasih pada siswa, senam dan budaya jum'at bersih			14.000.000		14.000.000
	2. Kegiatan pembiasaan Baris berbaris			3.700.000		3.700.000
	c. Kegiatan Berbasis era global					
	1. Kegiatan wajib Conversation Bahasa Inggris kls 7 & 8			111.500.000		111.500.000
	2. Kegiatan ekstra animasi, internet dan TI lainnya			6.500.000		6.500.000
1.3.2	Penyelenggaraan pembelajaran moving class			22.500.000		22.500.000
1.3.3	Penyelenggaraan Program Kelas Khusus			PM		
1.3.4	Kegiatan paska ujian akhir semester			25.000.000		25.000.000
1.3.5	Pembinaan dan mengikuti lomba siswa berprestasi			2.000.000		2.000.000
1.4	Kegiatan Keagamaan dari Hari Besar Nasional:					
1.4.1	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW			780.000		780.000
1.4.2	Peringatan Isro' Miroj			780.000		780.000

No.	Program dan Kegiatan	Volume per Tahun	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana	
					BOSNAS	BOSDA
	1.4.3 Pondok Romadhon			11.502.200		11.502.200
	1.4.4 Peringatan Nuzulul Qur'an			2.070.000		2.070.000
	1.4.5 Hari raya Idul Adha			2.070.000		2.070.000
	1.4.6 Peringatan Hari Kartini			1.300.000		1.300.000
	1.4.7 Peringatan Hari Pendidikan Nasional			2.225.000		2.225.000
	1.4.8 Peringatan Hari Kemerdekaan RI			2.610.000		2.610.000
	1.5 Pelaksanaan Program UKS			10.000.000	10.000.000	
	1.6 Budaya dan Lingkungan Sekolah:					
	1.6.1 Pelaksanaan program akhlak mulia			6000.000		6.000.000
	1.6.2 Kegiatan Sosial					
	1.6.3 Penilaian Kelas Terbaik			4.893.600		4.893.600
	1.6.4 Kegiatan program Adiwiyata			33.989.600		33.989.600
	Jumlah Standar Kelulusan			426.154.400	10.000.000	416.154.400
2.	Standar Isi (Kurikulum)					
	2.1 Penyusunan Perangkat Kurikulum 2013:					
	2.1.1 Workshop Sosialisasi kurikulum 2013			7.395.000	7.395.000	
	2.1.2 Workshop Peny. Pengembangan SK, KD dan Silabus dan RPP PLH			3.743.000	3.743.000	
	2.2 Workshop Pengembangan Kurikulum 2013			3.270.000	3.270.000	
	Jumlah Standar Isi			14.408.000	14.408.000	
3.	Standar Proses Pembelajaran					
	3.1 Workshop Penyusunan Perangkat Mengajar			10.403.500	10.403.500	
	3.1.1					
	3.1.2 Pengadaan dan penyusunan lembar kerja siswa			69.004.000	69.004.000	69.004.000
	3.1.3 Workshop pengembangan model pembelajaran inovatif			7.549.000		7.549.000
	3.2 Pengadaan Alat dan bahan Praktikum IPA			4.707.500		4.707.500
	3.2.1					
	3.2.2 Pengadaan Alat Olahraga			6.752.000	6.752.000	

No.	Program dan Kegiatan	Volume per Tahun	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana	
					BOSNAS	BOSDA
	3.2.3 Pengadaan Alat dan Bahan Praktik Seni Budaya dan Kesenian			1.690.000	1.690.000	
	3.2.4 Pengadaan Bahan dan Alat Pembelajaran Matematika			505.000	505.000	
	3.2.5 Pengadaan Bahan dan Alat Pembelajaran IPS			8.250.000	8.250.000	
	3.2.6 Pengadaan Bahan dan Alat Pembelajaran Pendidikan Agama			3.000.000		3.000.000
	3.2.7 Pengadaan Bahan dan Alat Pembelajaran Bahasa Indonesia			3.000.000		3.000.000
	3.2.8 Pengadaan Bahan dan Alat Pembelajaran PKn			3.000.000		3.000.000
	3.2.9 Pengadaan Bahan dan Alat Pembelajaran PLH			14.625.000		14.625.000
	3.2.10 Kegiatan Pembelajaran Remedial			3.138.000		3.138.000
	3.2.11 Kegiatan Pembelajaran Pengayaan			3.138.000		3.138.000
	3.2.12 Penyelenggaraan Perpustakaan			48.829.500	48.829.500	
	3.3 Kegiatan Ekstrakurikuler:					
	3.3.1 Kegiatan ekskul Olahraga (Basket, Volly, Sepak Bola)			7.600.000		7.600.000
	3.3.2 Kegiatan ekskul Kesenian (Tari, Kulintang, Lukis)			7.050.000		7.050.000
	3.3.3 Kegiatan ekskul Paskibra			9.100.000		9.100.000
	3.3.4 Kegiatan ekskul Pramuka			7.100.000		7.100.000
	3.3.5 Kegiatan ekskul PMR			7.100.000		7.100.000
	3.3.6 Kegiatan ekskul KIR			5.900.000		5.900.000
	3.3.7 Kegiatan ekskul Kader lingkungan & polisi hijau			4.900.000		4.900.000
	3.3.8 Kegiatan ekskul Samroh			8.750.000		8.750.000
	3.3.9 Kegiatan Perkemahan Pramuka, LDK & Diklatpim OSIS			9.648.000		9.648.000
	3.3.10 Kegiatan ekskul Olimpiade MIPA			2.800.000		2.800.000
	3.4 Kegiatan Pertandingan dan Perlombaan:					
	3.4.1 Kegiatan lomba Olahraga tingkat Kota, Provinsi dan Nasional			2.880.000		2.880.000
	3.4.2 Mengikuti kegiatan dan Lomba Seni tingkat Kota, Provinsi			1.350.000	1.350.000	

No.	Program dan Kegiatan	Volume per Tahun	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana	
					BOSNAS	BOSDA
	dan Nasional					
	3.4.3 Mengikuti Olimpiade MIPA tingkat Kota, Provinsi, dan Nasional			2.000.000		2.000.000
	3.4.4 Mengikuti Lomba O2SN tingkat Kota, Provinsi, dan Nasional			1.980.000		1.980.000
	3.4.5 Mengikuti kegiatan lomba akademik dan non akademik lainnya			2.080.000	2.080.000	
	3.5 Pengawasan Proses Pembelajaran (SPM_IP 24):					
	3.5.1 Supervisi oleh Kepala Sekolah			1.270.000	1.270.000	
	3.5.2 Supervisi oleh Pengawas			400.000	400.000	
	Jumlah Standar Proses Pembelajaran			269.499.500	81.530.000	187.969.500
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
	4.1 Kepala Sekolah			5.500.000		5.500.000
	4.2 Pendidik:					
	4.2.1 Diklat ITC dan lesson study			2.360.000		2.360.000
	4.2.2 Melaksanakan/mengikuti kegiatan ESQ dan Out Bond			PM		
	4.2.3 Pelatihan PPLH (PTK/KTI)			3.997.500		3.997.500
	4.2.4 Mengikuti Diklat/workshop di instansi terkait			6.600.000		6.600.000
	4.2.5 Kegiatan MGMP			6.520.000		6.520.000
	4.2.6 Seleksi gutu berprestasi dan promosi jabatan			1.000.000	1.000.000	
	4.2.7 Pembinaan Kompetensi Guru			16.000.000	16.000.000	
	4.2.8 Melaksanakan program Penilaian Kinerja Guru			3.000.000	3.000.000	
	4.3 Tenaga Kependidikan			2.700.000		2.700.000
	4.4 Belanja Pegawai:					
	4.4.1 Gaji PTT	12 bln	14.708.533	176.502.396	121.060.640	55.441.7756
	4.4.2 Gaji GTT	12 bln	4.950.000	59.400.000		59.400.000
	4.4.3 Hr Tugas Tambahan	6 bln	7.050.000	42.300.000		42.300.000
	4.4.4 Lauk Pauk GTT dan PTT	6 bln	1.152.000	6.912.000		6.912.000

No.	Program dan Kegiatan	Volume per Tahun	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana	
					BOSNAS	BOSDA
	Jumlah			285.114.396		
	Jumlah Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik			332.791.896	152.560.640	180.231.256
5.	Standar Sarana dan Prasarana					
	5.1 Perbaikan taman dan penghijauan	12 bln	1.000.000	12.000.000		12.000.000
	5.2 Pembelian printer kantor	4 unit	750.000	3.000.000		3.000.000
	5.3 Pemeliharaan gedung-gedung/ruang kelas, dll	500 m2	50.000	25.000.000		25.000.000
	5.4 Pemeliharaan/pembelian instalasi listrik dan lampu	1 tahun	3.700.000	3.700.000		3.700.000
	5.5 Pemeliharaan instalasi air dan fasilitas PDAM	12 bln	450.000	2.700.000		2.700.000
	5.6 Perbaikan meubeler siswa dan kantor	1 kali	5.000.000	5.000.000		5.000.000
	5.7 Perbaikan peralatan kantor	4 kali	1.500.000	6.000.000		6.000.000
	5.8 Pengadaan komputer kantor	1 unit	6.500.000	6.500.000		6.500.000
	5.9 Pemeliharaan LCD, Screen, dll di masing-masing kelas	29 unit	150.000	4.350.000		4.350.000
	5.10 Pemeliharaan dan perbaikan Sarana Laboratorium Komputer	35 unit	250.000	8.750.000		8.750.000
	5.11 Pemeliharaan dan perbaikan Sarana Laboratorium Bahasa	42 unit	100.000	4.200.000		4.200.000
	5.12 Pemeliharaan dan perbaikan Sarana Multi Media	6 unit	500.000	3.000.000		3.000.000
	5.13 Pemeliharaan Telepon dan PABX	1 unit	500.000	500.000		500.000
	5.14 Pemeliharaan fasilitas elektro dan Sound System	12 bln	200.000	2.400.000		2.400.000
	5.15 Pemeliharaan peralatan Olahraga	12 bln	100.000	1.200.000		1.200.000
	5.16 Pemeliharaan peralatan kebersihan	12 bln	150.000	1.800.000		1.800.000
	5.17 Pengadaan Papan Struktur Organisasi	1 unit	500.000	500.000		500.000
	5.18 Pengadaan Papan DUK	1 unit	800.000	800.000		800.000
	5.19 Pengadaan Papan Data TU dan ruang data	2 unit	650.000	1.300.000		1.300.000
	Jumlah Standar Sarana dan Prasarana			269.499.500		92.700.000
6.	Standar Pengelolaan					
	6.1 Workshop Penyusunan RKS dan Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah			6.842.500		6.842.500
	6.2 Pembagian tugas Guru dan karyawan sesuai tupoksinya			780.000		780.000

No.	Program dan Kegiatan	Volume per Tahun	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana	
					BOSNAS	BOSDA
	6.3 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)			24.110.000		24.110.000
	6.4 Meningkatkan Hubungan Kerja dengan Komite Sekolah:					
	6.4.1 Kegiatan Komite Sekolah			12.032.000		12.032.000
	6.5 Meningkatkan Hubungan dengan Masyarakat/Orang Tua:					
	6.5.1 Rapat koordinasi dengan orang tua peserta didik			1.400.000		1.400.000
	6.5.2 Membangun dan mengikat kerjasama dengan instansi terkait (puskesmas, perbankan, lembaga kursus, sekolah, dll)			1.000.000		1.000.000
	6.6 Kegiatan Kesiswaan			13.000.000		13.000.000
	6.7 Meningkatkan kegiatan supervisi:					
	6.7.1 Rapat Dinas: Guru, Staf TU			15.690.000		15.690.000
	6.7.2 Supervisi berkala disemua bidang manajemen sekolah			1.500.000		1.500.000
	6.8 Mengelola sistem informasi manajemen (padamu)					
	Jumlah Standar Pengelolaan			76.354.500	31.110.000	45.244.500
7.	Standar Pembiayaan					
	7.1 Koordinasi dengan instansi lain			8.000.000		8.000.000
	7.2 Bantuan Biaya Transportasi siswa miskin			PM		
	7.3 Pembiayaan perjalanan dinas			12.178.900		12.178.900
	7.4 Biaya Pengelolaan Dana BOSNAS, BOSDA dan WAJAR DIKDAS			6.373.944	3.312.500	3.061.444
	7.5 Belanja Barang dan Jasa:					
	7.5.1 Rekening-rekening (listrik, air, sampah)			59.440.110	51.760.110	7.680.000
	7.6 Belanja Barang:					
	7.6.1 Rumah tangga sekolah			4.450.000		4.450.000
	7.7 Administrasi dan Umum:					
	7.7.1 ATK			46.077.750	46.077.750	
	7.7.2 Alat dan Bahan Kebersihan			12.477.500	12.477.500	
	7.8 Konsumsi Harian:					

No.	Program dan Kegiatan	Volume per Tahun	Harga per Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Sumber Dana	
					BOSNAS	BOSDA
	a. Gas	6 kali	76.000	456.000	456.000	
	b. Air Galon	8 x 6	12.000	576.000	576.000	
	c. Gula Pasir	40 x 6 bln	12.000	2.880.000	2.880.000	
	d. Teh	3 x 26	7.000	3.276.000	3.276.000	
	e. Air Minum Botol (untuk tamu)	6 x 4	20.000	480.000	480.000	
	f. Konsumsi (untuk tamu)	6 kali	150.000	900.000	900.000	
	Jumlah			8.568.000		
	Jumlah Standar Pembiayaan			156.459.204	119.088.860	35.370.344
8.	Standar Penilaian					
	8.1 Ulangan Harian			8.289.300	8.289.300	
	8.2 Ulangan Tengah Sememster			59.298.000	59.298.000	
	8.3 Ujian Akhir Semester			60.158.000	60.158.000	
	8.4 Kegiatan nominasi Ujian			4.450.000	4.450.000	
	8.5 Ujian Akhir Sekolah (UAS)			30.060.200	30.060.200	
	8.6 Ujian Praktek			15.359.000	15.359.000	
	8.7 Ujian Nasional (UN)			23.338.000	5.118.000	18.170.000
	Jumlah Standar Penilaian			200.952.500	182.732.500	18.170.000
	Jumlah Pengeluaran Program Sekolah			1.567.270.000	591.430.000	975.840.000

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang telah dirincikan secara transparansi dan dipublikasikan dalam media majalah dinding sekolah. Dan untuk menutupi pengeluaran anggaran tersebut maka dana yang diperoleh adalah bantuan operasional pemerintah pusat (BOSNAS) dan pemerintah daerah (BOSDA), yang secara keseluruhan di alokasikan untuk menunjang kegiatan Adiwiyata. Anggaran tersebut masing-masing diuraikan dalam 8 standar program dan kegiatan sekolah, antara lain: 1) Standar Kelulusan (SKL) berjumlah Rp. 426.154.400,- dana BOSNAS Rp. 10.000.000,- dan BOSDA Rp. 416.154.400,-; 2) Standar Isi (Kurikulum) berjumlah Rp. 14.408.000,- dan dana BOSNAS Rp. 14.408.000,-; 3) Standar Proses Pembelajaran berjumlah Rp. 269.499.500,- dana BOSNAS Rp. 81.530.000,- dan BOSDA Rp. 187.969.500,-; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berjumlah Rp. 332.791.896,- dana BOSNAS Rp. 152.560.640,- dan BOSDA Rp. 180.231.256,-; 5) Standar Sarana dan Prasarana berjumlah Rp. 269.499.500,- dan dana BOSDA 92.700.000,-; 6) Standar Pengelolaan berjumlah Rp. 76.354.500,- dana BOSNAS Rp. 31.110.000,- dan BOSDA Rp. 45.244.500,-; 7) Standar Pembiayaan Rp. 154.458.204,- dana BOSNAS Rp. 119.088.860,- dan BOSDA Rp. 35.370.344,-; dan 8) Standar Penilaian berjumlah Rp. 200.952.500,- dana BOSNAS Rp.182.732.500,- dan BOSDA 18.170.000.

Selanjutnya sumberdaya sarana dan prasarana diukur melalui komponen Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan yang terdapat pada standar pertama Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan dan standar kedua Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan

prasarana yang ramah lingkungan. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan yaitu menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah; dan menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah. Sedangkan Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan ialah memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan; meningkatkan pengelollan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah; memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien; serta meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan.

Ketersediaan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang seperti pemanfaatan penggunaan air wudhu yang dialirkan ke dalam kolam ikan, pemilahan sampah berdasarkan warna tempat sampah (warna biru untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah anorganik seperti kertas, dan warna putih untuk sampah anorganik seperti plastik), adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjadi biogas, adanya ruang terbuka hijau yang berukuran dua per tiga dari luas tanah sekolah keseluruhan, adanya tanaman peneduh mengatasi radiasi, penggunaan air PDAM untuk kamar mandi guru dan air sumur untuk kamar mandi siswa, dan adanya tong komposter yang masing-masing 3 tong dari bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan 3 tong lainnya dari bantuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.



Gambar 7.

1) Pemakaian limbah air wudlu dialirkan ke kolam ikan; 2) Pemeliharaan kebun organik sekolah oleh peserta didik; 3) IPAL menjadi Biogas; dan 4) Tong sampah sebagai tempat komposter

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Kemudian ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di Sekolah Menengah Negeri 14 Malang antara lain pemanfaatan *green house*, pemeliharaan sanitasi dan drainase lingkungan sekolah melalui pembuangan air wudhu yang dialirkan ke dalam kolam ikan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjadi biogas, pengelolaan kebun organik, pengelolaan sampah menjadi kompos, pemanfaatan ruang terbuka hijau (seperti hutan, taman, kebun sekolah dan tanaman obat keluarga (TOGA)), pemanfaatan dan pengelolaan biopori, adanya sumur resapan, dan adanya tanaman peneduh.



Gambar 8.

1) Kolam ikan sebagai tempat pembuangan akhir pemanfaatan dan pengolahan limbah air wudlu; 2) Pengelolaan lubang biopori oleh salah satu peserta didik; 3) Salah satu sumur resapan sekolah; dan 4) Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Sedangkan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan yaitu memelihara sarana prasarana yang ramah lingkungan; meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah; memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan.



Gambar 9.

1&2) Taman sekolah; 3) Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara; 4) Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan; dan 5) Penggunaan paving block

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015



Gambar 10.

Kantin sehat dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang baik, menyediakan makanan sehat tanpa pengawet, pengenyal, pemanis, pewarna dan perasa buatan, dan dilengkapi dengan penyediaan wastafel dan tempat sampah

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Untuk pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor dijelaskan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti, bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang telah menerapkan efisiensi dalam memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor. Upaya yang dilakukan seperti menghemat pemakaian air wastafel dan kamar mandi seperlunya; menghemat pemakaian listrik dengan salah satunya mematikan lampu dan mematikan AC/kipas jika tidak dipergunakan lagi; dan menggunakan alat tulis kantor sesuai kebutuhan. Namun dalam penerapannya terkadang masih ditemukan peserta didik yang lupa untuk mematikan listrik dan air kamar mandi.

“Efisiensi yang kita lakukan menghemat penggunaan air, listrik, dan ATK sesuai kebutuhan dan seperlunya. Penggunaan air kran/wastafel dan kamar mandi itu seperlunya. Kita juga menghemat pemakaian listrik contohnya seperti mematikan lampu jika tidak dipakai lagi, mematikan AC/Kipas jika tidak dipergunakan. Kalau alat tulis kantor kita menggunakan sesuai kebutuhan. Tapi terkadang masih aja ada siswa yang lupa mematikan listrik dan air kamar mandi, mereka masih boros pemakaian. Ya wajar namanya juga anak-anak, itu juga tugas kita yang kembali mengingatkan mereka.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 13.50 WIB).

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Variabel ini diukur melalui karakteristik yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Hal tersebut seperti perhatian dan *feedback* yang diberikan tenaga pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Hal tersebut juga diukur melalui standar pertama dan kedua pada komponen kedua program Adiwiyata yaitu Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan yaitu Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dan

Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mengenai bagaimana perhatian dan *feedback* yang diberikan tenaga pendidik dan peserta didik atas keterlibatan dan pengaruhnya dalam pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang, Ibu Sri Wahyu Nastiti menjelaskan:

“Sejauh ini perhatian dan keterlibatan baik dari guru dan siswa sangat besar mbak. Kita semua ikut serta dan mendukung penuh Adiwiyata di sekolah ini. Karena pada dasarnya sekolah Adiwiyata adalah membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Sekolah menjadi tempat pembelajaran utama setelah lingkungan keluarga. Kita sebagai guru kan menjadi faktor utama membentuk karakter siswa untuk lebih peduli dan melestarikan lingkungan hidup lewat mata pelajaran yang kita berikan. Menciptakan pola pikir dan tindakan siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Itu yang akhirnya secara tidak langsung menjadikan kebiasaan bagi siswa kita. Sehingga kebiasaan siswa itu juga di praktekkan diluar lingkungan sekolah.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 26 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Tenaga pendidik melakukan tugas sebagai pendidik bagi peserta didik dengan menanamkan budaya dan kebiasaan untuk cinta dan peduli terhadap lingkungan hidup sekitarnya melalui pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran yang diberikan. Sebaliknya, peserta didik melalui pola pikir dan tindakannya menjadi terbentuk. Hal ini menjadikan kebiasaan dan budaya cinta dan peduli terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-harinya.

Kemudian diukur berdasarkan standar pertama pada komponen kedua program Adiwiyata Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan yaitu Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup. Hal tersebut terdiri dari Menerapkan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran; Mengembangkan isu lokal dan/ atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan; Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup; Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas; Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup; Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup; serta Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai bagaimana upaya tenaga pendidik melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran lingkungan hidup, Ibu Lina Herlina menjelaskan:

“Setiap guru memiliki dan menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada siswa. Contoh seperti pengenalan dan keindahan lingkungan sekolah di Bahasa Indonesia, siswa baca puisi dan cerita. Siswa juga bisa belajar budidaya tanaman sayuran, tanaman obat, dan membuat jamu tradisional, di Prakarya. Kemudian Seni Budaya seperti memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang punya nilai jual. Selain itu kita mewajibkan siswa mengikuti ekstrakurikuler Kader Lingkungan. Manfaatnya agar siswa mampu menjadi pelopor menjaga lingkungan sekolah. Juga siswa aktif mengikuti lomba-lomba di hari-hari lingkungan hidup.” (Wawancara dengan Ibu Lina Herlina, S.Pd selaku guru Prakarya dan Pokja Bidang Kurikulum Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 11.40 WIB).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa setiap guru memiliki dan menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada siswa yang bertujuan untuk melibatkan siswanya secara aktif dalam kegiatan pembelajaran lingkungan hidup. Seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia keterlibatan siswa membaca puisi dan cerita; dalam mata pelajaran Prakarya dengan membudidayakan tanaman sayuran, tanaman obat dan membuat jamu tradisional; sedangkan pada mata pelajaran Seni Budaya yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai jual.

Penuturan Ibu Lina Herlina tersebut juga sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suseno, yaitu:

“Di Bahasa Indonesia sendiri ada materi yang dikaitkan dengan lingkungan, contoh membuat puisi, cerpen, surat pembaca tentang lingkungan. Di surat pembaca, anak-anak diajak mengamati dan menulis lingkungan seperti melihat halaman, kelas, kamar mandi, mushola. Surat pembaca lingkungan itu berisi tentang saran, masukan terhadap pihak yang bersangkutan. Jadi misalnya saran terhadap temannya, pihak sekolah, petugas kebersihan. Contoh kalau masuk ke kamar mandi itu kotor dan bau, kalau habis buang air itu disiram. Kemudian juga piket kamar mandi itu harus secara rutin dibersihkan. Juga contoh lainnya membuat dialog, pidato yang dikaitkan dengan alam.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Kemudian metode pembelajaran lingkungan hidup apa yang sering digunakan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar serta apakah peserta didik dapat menerima pembelajaran, Bapak Suseno menguraikan:

“Metode pembelajarannya ya diskusi, pengamatan (observasi), tanya jawab, penemuan. Sejauh ini iya, karena kalau diajak keluar kelas atau *outdoor learning* anak-anak itu senang jalan-jalan sebagai *refreshing*. Kita ingin mencari suasana baru yang kondusif, juga menghilangkan bosan dan jenuh anak-anak. Karena kita sistemnya juga *moving class* yang secara tidak langsung membuat anak-anak menjadi aktif mencari gurunya.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil

Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Wawancara oleh Bapak Suseno tersebut menjelaskan bahwa upaya tenaga pendidik melibatkan peserta didik yaitu mengembangkan metode pengajaran dengan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah secara maksimal sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan. Hal ini melalui kegiatan membuat puisi, cerpen, surat bagi pembaca, dialog, pidato, diskusi, pengamatan (observasi), tanya jawab, dan penemuan. Kegiatan yang diberikan tenaga pendidik tersebut menciptakan penerimaan bagi peserta didik dengan secara aktif ikut serta dalam pembelajaran lingkungan hidup. Selain itu, adanya *moving class* bertujuan untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan menghilangkan kejenuhan serta membuat peserta didik menjadi aktif bersosialisasi dengan gurunya.

Upaya tenaga pendidik dalam mengembangkan isu lokal dan global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup dilaksanakan pada kegiatan bertema lingkungan. Ibu Lina Herlina mengatakan seperti membuat mading lingkungan dengan tema berbeda setiap kelasnya, lomba kebersihan dan lomba-lomba pada hari lingkungan hidup seperti lomba menciptakan puisi, cerpen dan gambar-gambar tentang lingkungan. Berikut penuturannya:

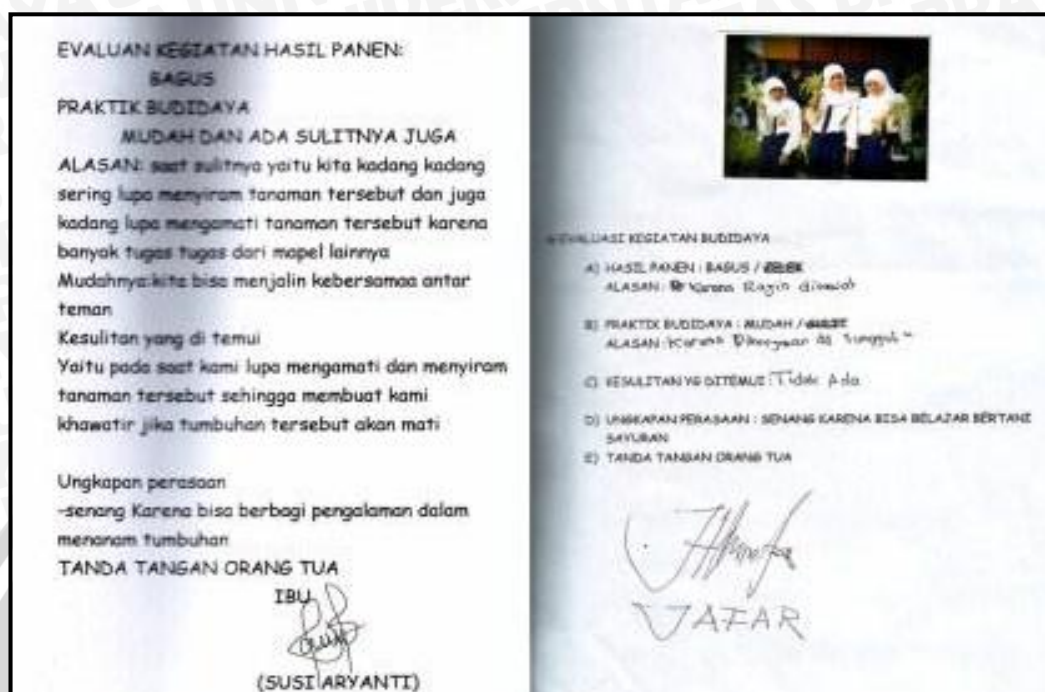
”Itu seperti membuat mading bertema lingkungan isu lokal dan global, itu juga tiap kelas beda tema. Trus lomba kebersihan dan lomba-lomba di hari lingkungan hidup. Misalnya lomba cipta puisi, cerpen, gambar-gambar tentang lingkungan.” (Wawancara dengan Ibu Lina Herlina, S.Pd selaku guru Prakarya dan Pokja Bidang Kurikulum Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 11.40 WIB).

Sedangkan menurut Bapak Suseno, upaya dalam mengembangkan isu lokal dan global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup salah satunya dengan mengkaitkan isu global warming pada materi pidato kelas IX, mengkaitkan dengan membuat lingkungan sekitar menjadi asri dan bersih, mengkaitkan permasalahan sampah dan lain sebagainya.

“Materi seperti global warming, misalnya pidato dikaitkan dengan global warming, contoh bagaimana mengatasinya, juga dikaitkan bagaimana membuat lingkungan kita itu bersih, asri dan sebagainya. Atau contohnya dikaitkan dengan masalah sampah pada materi pidato yang ada materi kelas IX.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya mengenai upaya peserta didik mengikutsertakan orang tua peserta didik dalam pembelajaran lingkungan hidup. Kegiatan tersebut meliputi keikutsertaan orang tua antara lain: menyediakan tanah atau pupuk dalam pembelajaran budidaya tanaman sayur dan obat; menyediakan peralatan untuk membuat kerajinan; mengajak peserta didik untuk kegiatan *outdoor learning* dengan orang tua peserta didik sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan; dan tugas yang telah dilakukan peserta didik seperti pekerjaan rumah (PR) atau laporan kegiatan yang terdapat tanda tangan orang tua. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lina Herlina:

“Mengikutsertakan orang tua siswa seperti menyediakan tanah atau pupuk dalam budidaya tanaman sayur dan tanaman obat. Lalu menyediakan peralatan untuk membuat kerajinan. Dan pada tugas-tugas siswa seperti pekerjaan rumah atau laporan kegiatan yang harus ada tanda tangan orang tuanya. Itu sebagai bukti kalau orang tua ikut mengawasi, orang tua telah membaca dan mengetahui tugas yang dikerjakan anaknya.” (Wawancara dengan Ibu Lina Herlina, S.Pd selaku guru Prakarya dan Pokja Bidang Kurikulum Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 11.40 WIB).



Gambar 11.
Evaluasi kegiatan peserta didik melibatkan orang tua
Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Pendapat Ibu Lina Herlina juga diperkuat dengan pendapat Bapak Suseno yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dalam tugas harian atau pekerjaan rumah (PR) yang dikerjakan oleh peserta didik dan rapat antara wali murid peserta didik dengan tenaga pendidik. Selain itu, upaya tenaga pendidik dalam mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup yaitu melalui majalah dinding, buletin sekolah (Majalah sekolah), dan pembelajaran yang dilakukan di website dan media sosial.

“Yaa seperti tugas-tugas yang dirumah untuk pekerjaan rumah siswa itu kan ada peran orang tua, orang tua mengawasi, orang tua mendukung. Trus juga pada awal tahun itu ada peran orang tua dalam rapat bersama kita.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Namun di sisi lain, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah masih ditemukan kendala kecil yang menjadikan penghambat internal. Seperti yang diutarakan Bapak Suseno bahwa terdapat kendala kecil yang menjadikan penghambat internal yaitu pada peserta didik yang masih belum berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dan memberikan *feedback* dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang.

“Setiap program pasti terdapat kendalanya. Kita sebagai guru berupaya secara maksimal menyalurkan ilmu, pengetahuan dan kedisiplinan yang kita punya kepada siswa. Di sekolah kita itu yang menjadikan kendala itu masih terdapat siswa yang malas, baik masih ada yang belum aktif dalam pembelajaran maupun untuk pelaksanaan Adiwiyata. Sebenarnya di sekolah manapun hal itu sudah biasa terjadi diantara sekian banyak siswa, yang hanya satu atau dua atau beberapa, itu wajar. Makanya itu juga tugas kita sebagai guru wajib untuk mengubah dan menanamkan *mindset* dan perilaku siswa.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.40 WIB)

Selain melalui pengukuran tersebut, juga diukur melalui standar kedua pada komponen kedua program Adiwiyata Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan yaitu Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut terdiri dari Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari; dan Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media.

Kegiatan peserta didik menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang meliputi karya nyata seperti laporan/makalah, puisi/sajak, artikel di mading, hasil penelitian, dan ketrampilan produk daur ulang. Terdapat pula kader-kader yang memiliki tugas, antara lain:

- 1) Kader Biopori, bertanggung jawab terhadap biopori/tempat resapan air yang ada di sekolah.
- 2) Kader Daur Ulang, bertanggung jawab terhadap limbah sekolah yang masih dapat diolah kembali dan dimanfaatkan menjadi barang bernilai.
- 3) Kader Anggrek, bertanggung jawab terhadap tanaman anggrek yang berada di depan Ruang Prakarya dan di *Green House*.
- 4) Kader Hortikultura, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan tanaman hortikultura di sekolah.
- 5) Kader Kantin, bertanggung jawab mengawasi pengelola kantin di sekolah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana prasarana yang ada di kantin seperti meja, kursi dan papan himbauan.
- 6) Kader Kamar Mandi Putra, bertanggung jawab dan mengawasi kebersihan kamar mandi putra.
- 7) Kader Kamar Mandi Putri, bertanggung jawab dan mengawasi kebersihan kamar mandi putri.
- 8) Kader Kompos, bertanggung jawab terhadap pengelolaan pupuk kompos di sekolah.

- 9) Kader Sampah, bertanggung jawab terhadap sampah dan pemilahan sampah di sekolah.
- 10) Kader IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan Satwa, bertanggung jawab terhadap IPAL dan satwa yang ada di sekolah termasuk kebersihan mereka.
- 11) Kader Taman, bertanggung jawab mengawasi dan memelihara kebersihan taman yang ada di sekolah. Bertindak hanya mengawasi dan membantu, karena untuk membersihkan taman sudah menjadi tanggung jawab kelas.
- 12) Kader TOGA, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan tanaman obat keluarga di sekolah.
- 13) Kader UKS, bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh warga sekolah dengan dibantu dari Puskesmas setempat.
- 14) Kader Polisi Hijau, bertanggung jawab mengawasi kegiatan masing-masing kader lingkungan dan mengawasi siswa-siswi yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan (seperti membuang sampah sembarangan).

Sedangkan penerapan pengetahuan lingkungan hidup peserta didik dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup seperti menciptakan energi alternatif yang diperoleh dari briket kertas (limbah kertas yang didaur ulang kembali) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) mengolah limbah yang diperoleh dari kamar mandi menjadi biogas; gerakan menanam seribu pohon; menggunakan air dengan memanfaatkan limbah air wudlu untuk kolam ikan;

memanfaatkan limbah kain perca dan plastik kemasan; penambahan tanaman penyerap racun dan karbondioksida (CO₂); pengelolaan pupuk kompos; pembudidayaan tanaman TOGA; dan sebagainya. Kemudian kegiatan mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup peserta didik yaitu melalui majalah dinding; buletin sekolah (majalah sekolah); pameran basar pada HUT Sekolah dan *Green School Festival* (GSF), kampanye, website dan media sosial.



Gambar 12.

1&2) Pembuatan energi alternatif dari briket kertas; 3&4) Pemanfaatan limbah kain perca dan plastik kemasan; 5) Mading karya siswa disepanjang depan kelas; 6) Kampanye salah satu calon ketua OSIS tentang lingkungan hidup

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

d. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana

Variabel ini diukur melalui sikap atau kecenderungan yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Hal tersebut seperti penerimaan atau penolakan dan kebutuhan atau keinginan tenaga pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Mengenai apakah adanya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang menciptakan penerimaan ataukah penolakan bagi tenaga pendidik dan peserta didik, Bapak Suseno mengatakan:

“Iya, menerima. Karena Adiwiyata ini kan membuahkan hasil yang baik, positif dan berkesinambungan. Saya rasa semuanya baik guru dan siswa menerima ya mbak. Kalau melihat dulu, sekolah kita berbeda jauh dibanding sekarang. Dulu kan sekolah kita pernah dianggap kumuh, banyak sampah berserakan dimana-mana, tidak ada tumbuhan hijaunya dan gersang. Tapi setelah kita adakan perubahan, dari mengikuti Adiwiyata mulai tingkat kabupaten/kota, nasional, provinsi dan akhirnya nasional semuanya berubah, semuanya mengikuti proses, nggak langsung jadi, yang akhirnya lambat laun perubahan pada sekolah dan warga sekolah menjadi lebih baik.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Pendapat Bapak Suseno tersebut, seperti halnya dengan pendapat Ibu Sri Wahyu Nastiti yang juga menjelaskan:

“Tentunya menerima, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita semua ikut serta dan mendukung penuh Adiwiyata di sekolah ini. Sekolah Adiwiyata ini kan untuk merubah sekolah menjadi lebih baik. Kalau untuk membangun sekolah ke arah yang lebih baik dan menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, mengapa tidak? Menjadi sekolah bersih, asri juga mampu membentuk generasi muda yang berbudaya dan berwawasan lingkungan mengapa tidak? Saya rasa tentu semua sekolah menginginkan perubahan itu mbak. Memang melihat sebelum kita laksanakan Adiwiyata itu tidak mudah bagi anak-anak, bukan tidak menerima, tetapi membutuhkan proses khususnya dalam kesehariannya di sekolah untuk masalah sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup itu masih minim, masih merasa malas dan harus diperintah dulu baru jalan. Makanya langkah kita bagaimana merubah kebiasaan anak-anak ini agar

sadar, peduli dan menjaga lingkungan hidup sekitar. Salah satu langkah seperti adanya pelanggaran dan mendapat sanksi berbentuk sanksi poin. Oleh karenanya ada sanksi itu, sekarang anak-anak menjadi awas pikirannya. Makanya kalau sekarang kan kita punya kader lingkungan hijau, itu tanpa diperingatkan kita, mereka sudah jalan dengan sendirinya.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 26 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Penjelasan Bapak Suseno dan Ibu Sri Wahyu Nastiti tersebut dapat disimpulkan bahwa baik tenaga pendidik dan peserta didik menerima adanya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Hal ini ditunjukkan bahwa adanya pelaksanaan Adiwiyata memberikan dampak yang positif dan menjadikan pembangunan yang berkelanjutan bagi warga sekolah. Namun perubahan yang dilakukan tidak langsung jadi begitu saja dan membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat, seperti merubah kebiasaan dalam kegiatan sehari-hari warga sekolah. Tenaga pendidik berupaya membangun sekolah menjadi lebih baik dan menunjang kegiatan belajar mengajar dengan mengaitkan pembelajaran lingkungan hidup dalam pelaksanaan Adiwiyata. Pembangunan tersebut dilaksanakan untuk merubah situasi dan kondisi sekolah yang memperhatikan lingkungan hidup sekitar dan menjadi lebih baik. Tenaga pendidik yang menjadi aktor utama yang bertugas merubah dan membentuk kebiasaan sehari-hari peserta didik melalui pola pikir dan tindakan yang sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini terbukti dengan perilaku peserta didik yang lebih sadar dan peduli dengan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan adanya sanksi pelanggaran yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Kemudian apakah adanya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang menjadi kebutuhan atau keinginan tenaga pendidik

dan peserta didik, Bapak Suseno dan Ibu Sri Wahyu Nastiti menuturkan bahwa hal tersebut menjadi keinginan sekaligus kebutuhan warga sekolah. Sebab dengan kata lain Adiwiyata menunjukkan kegiatan interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup sekitarnya yang menuntut manusia dalam kegiatan sehari-hari untuk lebih memperhatikan dengan melestarikan dan menjaganya. Secara tidak langsung hal tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif di lingkungan sekolah dan menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya minat dan belajar peserta didik yang tinggi. Minat tersebut juga terdapat pada masyarakat luar atau orang tua peserta untuk mendaftarkan anak-anaknya karena kondisi sekolah yang baik, sekolah yang hijau dan berwawasan serta berbudaya lingkungan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, meningkatkan prestasi akademik dan mendukung kegiatan bersosialisasi siswa. Berikut penuturan Bapak Suseno:

“Iya, itu menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Adiwiyata kan menciptakan sekolah hijau, tentu ada interaksi antara lingkungan hidup dan manusia. Karena manusia nggak bisa lepas dari alam, manusia hidup berdampingan dengan alam, lingkungan sekitarnya. Mereka juga makhluk seperti kita dan kita sebagai manusia wajib untuk melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar. Kewajiban ini yang menuntut manusia untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, jika sikap itu diterapkan sehari-hari, tidak hanya di sekolah tetapi di luar sekolah akan menjadi baik.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti, yaitu:

“Pada dasarnya iya, karena semua sekolah menginginkan sekolahnya menjadi peduli dan berbudaya lingkungan. Kalau lingkungan itu bersih, baik, asri, terawat tentu itu mempengaruhi minat siswa, belajar siswa, pembelajaran kita dan semuanya. Secara tidak langsung hal itu menjadi kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu membantu meningkatkan kegiatan belajar siswa, prestasi akademik dan partisipasi siswa.” (Wawancara dengan

Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 13.50 WIB).

Penuturan bapak Suseno dan Ibu Sri Wahyu Nastiti tersebut menjelaskan hal yang sama seperti yang diutarakan oleh beberapa siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Katon Prayogo mengutarakan pemahamannya terhadap sekolah Adiwiyata sebagai sekolah yang berbasis lingkungan hidup dan lingkungan merupakan makhluk hidup yang harus dilindungi oleh manusia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu kebiasaan anak-anak dalam membuang sampah pada tempatnya dan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup agar terjaga keasriannya. Mengenai pemahaman tentang Adiwiyata, penerimaan atau penolakan, dan kebutuhan atau keinginan serta seberapa penting pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang, berikut pendapat Katon Prayogo:

“Adiwiyata itu sekolah yang berbasis lingkungan hidup. Iya menerima kak, kan dapat berdampak baik bagi anak-anak seperti membiasakan anak-anak membuang sampah ditempatnya dan menjaga lingkungan tetap asri. Adiwiyata ini sangat penting soalnya tumbuhan itu kan juga seperti makhluk hidup yang harus dilindungi oleh kita.” (Wawancara dengan Katon Prayogo siswa Kelas IX.7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 12.05 WIB).

Pendapat Katon Prayogo juga diperkuat oleh pendapat Rifky A. yang mengatakan bahwa sekolah Adiwiyata sebagai sekolah yang menciptakan sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Tindakan tersebut berupa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan memaknai bahwa lingkungan hidup juga sebagai makhluk hidup yang patut untuk dilindungi oleh manusia.

“Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dengan lingkungan hidup. Iya menerima, karna dapat membuat sekolah dan lingkungan menjadi bersih,

terawat dan terlestarikan. Iya sangat penting, soalnya lingkungan sekitar jadi diperhatikan karena dijaga kebersihannya dan dirawat, trus kita jadi semakin peduli sama lingkungan.” (Wawancara dengan Rifky A. siswa Kelas IX.4 Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 12.05 WIB).



Gambar 13.
Wawancara peneliti dengan siswa-siswi SMP Negeri 14 Malang
Sumber: Olahan Peneliti, 2015

Sama halnya dengan penuturan Katon Prayogo dan Rifky A., siswi lainnya memahami sekolah Adiwiyata sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan hidup dan bertujuan menjaga lingkungan sekolah untuk menjadi lebih hijau.

Upaya yang dilakukan seperti kegiatan menyapu ruang kelas dan lapangan sekolah; merawat tanaman sekitar sekolah dengan menyiram; dan kegiatan yang dilakukan oleh kader lingkungan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pentingnya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang ini dapat mengurangi polusi udara dan sampah di lingkungan sekitar sekolah. Penuturan tersebut dijelaskan oleh Tri Indah:

“Adiwiyata itu sekolah yang berwawasan lingkungan hidup dan tujuannya menjaga lingkungan sekolah untuk lebih hijau. Iya menerima, kegiatannya seperti menyapu kelas dan lapangan, merawat tanaman sekitar sekolah, kayak menyiram mbak, trus kayak kader lingkungan itu yang punya tugas masing-masing. Adiwiyata sangat penting mbak, karena di lingkungan sini banyak polusi udara dan bisa mengurangi sampah.” (Wawancara dengan Tri Indah siswa Kelas IX.6 Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 7 Agustus 2015 pukul 09.20 WIB).

Pendapat Tri Indah juga diperkuat oleh pendapat Amanda Dwira yang mengutarakan bahwa sekolah Adiwiyata ialah sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan yang bertujuan membangun sekolah dengan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, seperti lebih terjaga kebersihannya dan lingkungan sekitar sekolah. Program ini menjadi penting sebab dapat menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang ada, seperti membersihkan kelas yang kotor dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

“Adiwiyata itu sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan. Iya menerima, karena dapat merubah sekolah menjadi lebih baik lagi kayak lebih bagus, bersih dan tumbuhannya banyak juga lingkungan sekolah jadi terjaga. Iya penting, karena bisa mengatasi masalah lingkungan sekitar, kayak ruang kelas yang kotor itu dibersihkan dan membuang sampah pada tempatnya.” (Wawancara dengan Amanda Dwira A. siswa Kelas IX.5 Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 12.05 WIB).

Kemudian mengenai adanya pelaksanaan Adiwiyata apakah menjadikan tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di sekolah, Bapak Suseno menjelaskan:

“Iya. Seperti mengatasi global warming. Di lingkungan lokal, itu dimulai dari hal terkecil saja, kalau untuk anak-anak seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air secukupnya, memakai tempat alas makanan berupa kertas. Secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.30 WIB).

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Seperti dalam konteks mata pelajaran yang diajarkan tentang mengatasi permasalahan lingkungan lokal. Meskipun kegiatan yang dilakukan merupakan hal paling kecil namun memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan lingkungan hidup kedepannya. Sama halnya dengan pendapat Bapak Suseno, Ibu Sri Wahyu Nastiti juga menjelaskan bahwa permasalahan yang ada seperti upaya dalam mengembangkan isu lokal dan global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup salah satunya dengan mengkaitkan isu global warming pada materi, mengkaitkan dengan membuat lingkungan sekitar menjadi asri dan bersih, seperti mengkaitkan permasalahan sampah. Berikut penjelasan Ibu Sri Wahyu Nastiti:

“Iya, contohnya sampah menjadi terkontrol. Sampah-sampah yang ada kita olah atau pilah terlebih dahulu, tidak semuanya di buang, tapi kita kreasi kan menjadi barang yang dapat di jual, dan hasilnya kita pakai kembali untuk kebutuhan sekolah. Namun kegiatan yang menjadi kegiatan anak-anak itu ada keterbatasan waktunya. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih ketrampilan anak-anak. Tapi tujuan utama kita sebenarnya bukan itu, tujuan kita sesuai pelaksanaan Adiwiyata ini mengatasi permasalahan lingkungan

yang mulai menglobal. Sekarang, kalau tidak kita mulai dari sekolah, darimana? Karena sekolah menciptakan perilaku atau kebiasaan siswa. Kementerian memandang bahwa lebih mudah memasukkan ilmu itu lewat sekolah dibandingkan di lingkungan sekitar atau masyarakat. Kenapa? Karena anak-anak lebih banyak memiliki waktu di sekolah dibandingkan di rumah dan lingkungan sekitar. Nah, jadi pembiasaan ilmu pengetahuan yang lainnya itu lebih banyak ditanamkan di sekolah supaya anak-anak tau atau melek terhadap lingkungan. Seperti apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang? Sehingga semua mata pelajaran sekarang menyelipkan materi lingkungan hidup.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 13.50 WIB).

Berdasarkan penjelasan Ibu Sri Wahyu Nastiti tersebut, disimpulkan bahwa adanya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang menjadikan tolak ukur peserta didik untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup melalui sikap peduli dan kesadaran diri masing-masing individu dalam kegiatan sehari-harinya. Ilmu yang diperoleh tersebut dapat menciptakan pola pikir dan perilaku siswa untuk lebih peka, sadar, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup sekitar mereka. Di sisi lain, penanaman mengenai pembelajaran lingkungan hidup juga melalui kegiatan meningkatkan ketrampilan masing-masing individu siswa. Salah satunya dengan sampah yang diperoleh yang sebelumnya telah dipilah. Ketrampilan tersebut menciptakan ide dan kreasi peserta didik seperti mengolah dan menciptakan barang bekas atau daur ulang yang diperoleh dari sampah menjadi barang yang bernilai tinggi. Dan hasil daur ulang akan dijual serta pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan sekolah.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Selanjutnya variabel ini diukur melalui komunikasi dan koordinasi yang tercipta antara tenaga pendidik, peserta didik, dan pihak luar. Bentuk pelaksanaan Adiwiyata tersebut diuraikan melalui komponen ketiga yaitu Kegiatan Lingkungan berbasis Partisipatif. Mengenai apakah adanya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang ini menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik antara tenaga pendidik, peserta didik, dan pihak luar, Ibu Sri Wahyu Nastiti menguraikan sebagai berikut:

“Tentu mbak. Saya rasa penjelasan saya di pertanyaan sebelum-sebelumnya membuktikan kalau komunikasi dan koordinasi kita tercipta baik. Secara horisontal kita saling membantu satu sama lain, seperti ketika kita belum menyelesaikan laporan sarana prasarana disini ada peran bagian partisipan yang ikut membantu. Begitu juga dengan yang dilakukan siswa, mereka memiliki tugas dan kewajiban sendiri. Seperti tugas masing-masing kader, jika ada yang lupa mengerjakan tugasnya, maka mereka saling mengingatkan kader lainnya. Disamping itu juga secara tidak langsung membentuk perilaku tenggang rasa dan membentuk kebiasaan yang baik. Secara vertikal itu contoh umumnya seperti waktu kita rapat. Melibatkan kepala sekolah, guru dan orang tua siswa dimana rapat mengenai visi misi untuk pelaksanaan Adiwiyata. Ada komunikasi saling-silang dari kepala sekolah ke guru kemudian guru ke orang tua peserta didik, begitu sebaliknya, dan kita ada sesi tanya jawab juga. Kemudian contoh lain seperti rapat kepala sekolah dengan Tim Adiwiyata sekolah. Sebenarnya tidak hanya itu saja, diluar rapat kita juga sering berkomunikasi secara intens. Contoh lainnya juga seperti penerimaan rapot, bentuk komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik. Kemudian pendidikan atau pelatihan dari pihak luar seperti BLH dan sebagainya.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 14.27 WIB).

Berdasarkan penjelasan Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa adanya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik antara tenaga pendidik, peserta didik, dan pihak luar. Komunikasi dan koordinasi tersebut membentuk menjadi dua arah

yaitu secara horisontal dan vertikal. Secara horisontal seperti Tim Partisipatif membantu menyelesaikan laporan Tim Sarana dan Prasarana. Kemudian contoh lain salah satunya seperti Kader membantu mengingatkan tugas yang dikerjakan Kader lainnya. Sedangkan secara vertikal seperti komunikasi dan koordinasi yang tercipta antara Kepala Sekolah dengan perangkatnya yaitu guru-guru dalam rapat, yang kemudian guru-guru memberikan informasi pada orang tua peserta didik. Contoh komunikasi dan koordinasi secara vertikal lainnya yaitu antara kepala sekolah dengan Tim Adiwiyata dalam rapat lain, antara guru-guru dengan orang tua peserta didik dalam pengambilan rapot, dan antara pihak luar dalam hal pendidikan atau pelatihan seperti BLH, instansi, dan lain-lain.

Pendapat Ibu Sri Wahyu Nastiti tersebut sama halnya dengan pendapat Bapak Suseno, bahwa adanya pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang ini menciptakan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dari sebelumnya diantara warga sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesadaran masing-masing individu akan lingkungan hidup, tim-tim khusus pelaksana program Adiwiyata yang bekerjasama dan membantu satu sama lain. Komunikasi dan koordinasi yang terjadi dari segala arah seperti tenaga pendidik dengan tenaga pendidik, tenaga pendidik dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, tenaga pendidik dengan orang tua peserta didik, tenaga pendidik dengan pihak luar, dan peserta didik dengan pihak luar. Kemudian komunikasi yang baik terjadi secara intens serta kerjasama perangkat tim yang nyata menghasilkan kinerja yang baik dan memuaskan.

“Iya, adanya pelaksanaan Adiwiyata di sekolah ini memang telah menciptakan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dari sebelumnya.

Karena berangkat dari lingkungan, setiap hari pula kita berhadapan dengan lingkungan. Dan dengan adanya tim-tim khusus pelaksana Adiwiyata, semuanya bekerja bersama membantu satu sama lain baik dari guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan orangtua siswa, guru dengan pihak luar, siswa dengan pihak luar. Itu karena interaksi yang sering, tindakan dan kerjasama yang nyata secara terus-menerus membuahkan hasil yang memuaskan seperti sekarang.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.40 WIB).

Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar sekolah dengan pihak luar dan warga sekolah sendiri dapat diukur pada komponen Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif melalui standar Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang terencana bagi warga sekolah; dan Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak. Pada standar pertama terdapat lima poin, antara lain: memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah; memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta mengikuti kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan oleh pihak luar.

Sedangkan pada standar kedua, terdiri dari lima poin antara lain: memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup; mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; menjadi

narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup; serta memberi dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada standar memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah, melalui kelompok kerja atau pokja yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi. Pemeliharaan dan perawatan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang ketrampilan, ruang kesenian, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ruang serbaguna (Aula), ruang Kasek (Kepala Sekolah), ruang Wakasek (Wakil Kepala Sekolah), ruang guru, ruang TU, ruang Tamu, gudang, ruang ketrampilan daur ulang, kamar mandi guru, kamar mandi siswa (puteri dan putera), ruang BK, ruang UKS, ruang OSIS, ruang Ibadah, koperasi, kantin sehat, taman, pos penjaga, lingkungan paving block dan rumput, tanaman peneduh (termasuk TOGA). Pemeliharaan dan perawatan gedung dan lingkungan sekolah tersebut selain merupakan tugas guru-guru juga merupakan tugas wajib yang dilakukan siswa-siswi dan pada kader-kader lingkungan serta polisi hijau. Selain melalui kegiatan tersebut juga terdapat budaya bersih-bersih yang menjadikan kegiatan pembiasaan bagi peserta didik. Adapun rincian bentuk kegiatan pembiasaan, sebagai berikut:

Tabel 7. Bentuk Kegiatan Budaya Pembiasaan SMP Negeri 14 Malang

No.	Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Petugas
1.	Green and Clean	a. Penanaman dan pemeliharaan penghijauan taman	Setiap hari Jum'at Pada jam ke 1:	- siswa kelas VII - siswa kelas

No.	Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Petugas
		sekitar masing-masing kelas dan di halaman	- Jumat ganjil - Jumat genap	VIII Didampingi wali kelas masing-masing
		b. Kebersihan kelas masing-masing dan halaman sekolah		
2.	Sentuhan Kasih Sayang	a. Budaya ramah dan cinta anak: Siswa datang masuk pintu gerbang sekolah disambut salim oleh Bapak/Ibu guru (5S: Salam, Salim, Senyum, Sopan dan Sampun)	Dilaksanakan setiap pagi saat siswa hadir disekolah mulai jam 06.00 s/d 06.30	Semua guru sesuai dengan jadwal
		b. Pemutaran lagu-lagu nasionalisme, lagu-lagu yang bernafaskan religi di Studio mini Broadcasting sekolah		
		c. Kegiatan mengaji dan doa pagi, meliputi pembacaan Surat Al Fatihah, Juz ammah, Asmaul Husna dan doa awal pelajaran dipandu dari Pusat Penyiaran		
3.	Ketaqwaan	Shalat Duha dan Istighosah	Setiap hari Jum'at Pada jam ke 1	Siswa kelas IX dengan dibimbing oleh guru Agama Islam
4.	Healthy	Senam Aerobik	Setiap hari Jum'at Pada jam ke 1	Bapak/Ibu guru selain yang bertugas dalam Green and Clean

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Pemanfaatan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Seperti pemanfaatan lahan kosong yang dipergunakan untuk menanam tumbuhan organik (seperti sayuran terong, sayur kol, dan bawang merah), pembelajaran yang dilakukan diluar kelas (*outdoor learning*) ketika pelajaran berlangsung (memanfaatkan taman dan kebun sekolah sebagai media

pembelajaran), halaman sekolah sebagai kegiatan upacara dan senam, lapangan basket digunakan sebagai tempat ekstrakurikuler dan kegiatan acara-acara lain (seperti shalat Idul Adha, *Green School Festival* (GSF), 17 Agustus, dan sebagainya); sedangkan pemanfaatan fasilitas seperti penggunaan papan tulis dan ATK, LCD, proyektor, TV, CD Player dan Hotspot atau Wifi di dalam kelas, pemanfaatan alat-alat laboratorium, penggunaan klompen ketika memasuki kamar mandi dan sebagainya.

Selanjutnya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui BDI (Badan Dakwah Islam), Wajib baca tulis Al Qur'an (Tartil), Paskibra, PMR (Palang Merah Remaja), Pramuka, Basket, Karya Seni & Budaya, Karya Tulis Ilmiah Remaja (KIR) dan PLH. Kemudian standar adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui pembelajaran lingkungan hidup warga sekolah menciptakan berbagai kreativitas dan inovasi, yaitu menciptakan air lindi atau cairan proses kompos yang digunakan sebagai sumber air; Mol dari kotoran sapi yang digunakan untuk pupuk dalam proses kompos dan sebagai pupuk tanaman.; Pestisida organik yang diperoleh dari sampah kulit buah dan sisa sayuran yang mengalami pelapukan dan diuraikan menjadi cairan; Shampoo dari daun binahong dan arang kelapa; Pencangkakan menggunakan gelas plastik minuman mineral bekas; Pot gantung dari sabut kelapa; Tempat tusuk gigi dari botol 'Yakult' bekas; Pemanfaatan limbah dari bungkus mie instan; Pembuatan batik jumput; Mading TOGA dari limbah kardus; Hiasan dinding dari limbah (tutup botol, kain perca,

koran bekas); Kerajinan dari kain perca (penjepit rambut, bandana, bantal kursi); Kerajinan dari limbah kerang; Lukisan dari bubur kertas; Baju daur ulang dari kerajinan limbah (koran, kresek, karung beras, baju dan rok yang tidak dipakai).



Gambar 14.

1) Air lindi sebagai sumber arus; 2) Mol dari kotoran sapi; 3) Pestisida organik; 4) Pot gantung sabut kelapa

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Selain itu mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar. Kegiatan aksi lingkungan oleh pihak luar bagi tenaga pendidik, antara lain Pembinaan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang dan Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai narasumber Program Adiwiyata; Pembinaan Tim *Green School Festival* (GSF) yang digelar Dinas Pendidikan Kota Malang bekerjasama dengan Jawa Pos Radar Malang dan lembaga Move Indonesia. Kegiatan pembinaan tersebut yaitu memetakan masalah dan potensi lingkungan

hidup di area sekolah. Serta pembinaan oleh Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah dan Subtropika (BALITJESTRO).



Gambar 15.
1) Pembinaan oleh Tim Green School Festival (GSF); 2) Penjelasan oleh Bapak Agus dari BALITJESTRO

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Sedangkan kegiatan aksi lingkungan oleh pihak luar bagi peserta didik, antara lain pembimbingan pembelajaran oleh Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah dan Subtropika (BALITJESTRO). Pembinaan yang dilakukan kepada peserta didik yaitu pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dengan cara penanaman dan perawatan tanaman seperti anggur, apel, jeruk dan kelengkeng; Pembinaan oleh TPA Supit Urang Kota Malang. TPA Supit Urang merupakan pusat tempat pembuangan sampah akhir di Kota Malang; dan Pembinaan oleh Tim Green School Festival (GSF).



Gambar 16.

1&2) Penjelasan mengenai alat berat yang digunakan dan gas metan dari sampah yang membusuk oleh Bapak Dedi dari TPA Supit Urang; 3&4) Penjelasan mengenai cara menanam dan merawat tanaman oleh Bapak Haryono dan Bapak Hasyim dari BALITJESTRO

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Pada standar kegiatan memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup yaitu melalui kegiatan cerdas cermat lingkungan yang diadakan oleh Nivea Cares; pembinaan Tim *Green School Festival* (GSF) sebagai juri sekaligus narasumber dalam kegiatan *Green School Festival* (GSF); Workshop penyusunan kajian lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang dan Dinas Pendidikan Kota Malang; dan Wali Murid sebagai narasumber pembelajaran pembuatan kerajinan dari rotan. Kemudian pihak luar yang mendukung materi pembelajaran lingkungan hidup yaitu Balai Penelitian Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BALITJESTRO), TPA Supit

Urang Kota Malang, Pabrik Keju Batu di Batu, Tim Move Indonesia pada kegiatan *Green School Festival* (GSF), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dan Nivea Cares.



Gambar 17.

- 1) Pembinaan kegiatan Cerdas Cermat Lingkungan oleh Nivea Cares; 2) Wali murid menjadi narasumber pembelajaran pembuatan kerajinan dari rotan; 3) Pembelajaran topik Bioteknologi oleh Pabrik Keju Batu; 4) Pembinaan oleh Bapak Saiful dari BPTP**

Sumber: Panitia Adiwiyata SMPN 14 Malang, 2015

Penerapan berikutnya kegiatan pembelajaran lingkungan hidup kepada pihak luar yang difasilitasi oleh komite sekolah yaitu pendanaan pada kunjungan TPA Supit Urang Kota Malang; kegiatan *outdoor learning* ke Pabrik Keju Batu di Batu; kunjungan ke Balai Penelitian Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BALITJESTRO); kunjungan ke Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP); kegiatan orang tua siswa sebagai narasumber dalam memberikan penyuluhan lingkungan hidup dan perbaikan kolam sekolah; serta alumni dalam

pembuatan taman sekolah. Selanjutnya standar menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup yaitu kepada sepuluh sekolah imbas, antara lain: SMPN 1 Malang, SMPN 11 Malang, SMPN 16 Malang, SMPN 17 Malang, SMPN 19 Malang, SMPN 26 Malang, SMPN 21 Malang, SMPN 22 Malang, SMPN 24 Malang, dan SMKN 12 Malang. Dan standar terakhir memberikan dukungan kepada pihak luar yaitu kepada masyarakat dan sekolah-sekolah imbas dalam meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti penjelasan oleh Ibu Yayuk (45 tahun) bahwa komunikasi yang terjalin berupa kegiatan bersih-bersih lingkungan luar sekolah oleh warga sekolah dengan masyarakat sekitar setiap hari jumat pagi.



Gambar 18.
Wawancara peneliti dengan Ibu Yayuk, salah satu responden
Sumber: Olahan Peneliti, 2015

Kegiatan lainnya juga dilakukan oleh kader-kader sekolah dalam membimbing, bertukar pikiran dan memberikan pembelajaran mengenai masing-

masing fungsi dan tugas yang dimiliki kader kepada sekolah imbas. Pada kegiatan mengimbaskan kepada sepuluh sekolah terpilih, dalam pelaksanaan implementasi program sekolah Adiwiyata dihadapkan kendala. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti, kendala tersebut yaitu timbal balik yang diterima Tenaga Pendidik dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dari sekolah imbas yang dibina. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku dan tindakan warga sekolah yang kurang termotivasi, peduli, berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup yang diberikan.

“Faktor penghambat dari sekolah imbas yang kita bina. Tidak semua sekolah imbas yang kita bina itu tertarik, ikut serta dan berpartisipasi dalam pembinaan yang kita lakukan. Kadang ada sekolah, guru dan siswanya yang bersikap kurang termotivasi, kurang berperan aktif, acuh tak acuh, dan hanya sekedar saja menerima arahan dan binaan yang kita berikan mbak. Kadang mereka hanya menerima kondisi sekolah mereka yang seperti itu saja, kadang alasannya karena dana yang diberikan pemerintah tidak mencukupi. Ya kayak nggak ada keinginan dan kemauan untuk mengembangkan sekolahnya ke taraf Adiwiyata yang lebih tinggi gitu mbak.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 14.35 WIB).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang

a. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Lingkungan Internal

Faktor pendukung dari lingkungan internal Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang adalah tenaga pendidik yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dan kompetensi yang dimiliki. Upaya tenaga pendidik dengan membentuk pola pikir dan menanamkan perilaku berbudaya lingkungan kepada peserta didik. Selain itu, tenaga pendidik berupaya

memberikan bimbingan, arahan dan motivasi terkait pembelajaran lingkungan hidup bagi peserta didik, sehingga hal ini mendorong dalam proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, peserta didik juga berperan aktif memberikan *feedback* dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Adiwiyata di sekolah. Faktor pendukung lainnya yaitu pemahaman akan visi, misi dan tujuan sekolah secara baik oleh warga sekolah, pengelolaan anggaran (RKAS) yang transparan dan diterapkan dengan baik serta fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia mampu menunjang kegiatan pembelajaran lingkungan hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang.

Faktor penghambat dari lingkungan internal Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang adalah dana yang dibutuhkan untuk implementasi program sekolah Adiwiyata sangat besar dan hanya bersumber dari dana bantuan operasional pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BOS/BOSDA).

“Pendukungnya guru-guru, siswa-siswi, semuanya berpartisipasi, semuanya berperan aktif. Sekarang fasilitas sarana dan prasarananya lengkap, anak-anak lebih termotivasi dan kebutuhan untuk anak-anak jadi tercukupi. Penghambatnya adalah dana. Dana untuk memelihara sangat besar. Karena kita nggak punya sumber lain lagi selain hanya dari bantuan operasional pemerintah. Jadi kalau kita mau maju berarti kita harus menyisihkan alokasi yang lain untuk kegiatan Adiwiyata.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 14.35 WIB).

Di sisi lain, Bapak Suseno mengatakan bahwa penghambat internal lainnya terdapat pada peserta didik yang masih belum berperan aktif dalam kegiatan belajar dan memberikan timbal balik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang.

“...kendala internal seperti masih terdapat siswa yang malas, baik masih ada yang belum aktif dalam pembelajaran maupun untuk pelaksanaan Adiwiyata. Sebenarnya di sekolah manapun hal itu sudah biasa terjadi diantara sekian banyak siswa, yang hanya satu atau dua atau beberapa, itu wajar. Oleh karena itu pula tugas kita sebagai guru wajib untuk mengubah dan menanamkan *mindset* dan perilaku siswa.” (Wawancara dengan Bapak Suseno, S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 10.40 WIB)

Selain itu, faktor penghambat lain terdapat pada sarana dan prasarana. Seperti diuraikan sebelumnya oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa dalam penerapan keseharian masih ditemukan peserta didik yang tidak memanfaatkan penggunaan listrik dan air secara efisien, semisal lupa untuk mematikan pemakaian listrik dan air kamar mandi.

“...terkadang masih aja ada siswa yang lupa mematikan listrik dan air kamar mandi mbak, mereka masih boros pemakaian. Ya wajar namanya juga anak-anak mbak, itu juga tugas kita yang kembali mengingatkan mereka.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 13.50 WIB).

Faktor lainnya yaitu masih belum mendukung pembelajaran lingkungan hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang seperti ada sebagian LCD yang rusak dan layar tidak dapat dipergunakan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh kedua siswi Tri Indah dan Amanda Dwira A.:

“Masih belum mbak, masih ada LCD yang rusak, trus layarnya ada beberapa yang nggak bisa dipake. Kayak di ruang IPS itu, layarnya nggak bisa ditarik. Trus ada yang nggak ada *screen*nya.” (Wawancara dengan Tri Indah siswi Kelas IX.6 dan Amanda Dwira A. siswi Kelas IX.5 Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 7 Agustus 2015 pukul 09.20 WIB).

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Lingkungan Eksternal

Faktor pendukung dari lingkungan eksternal Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang adalah pihak luar seperti wali murid, masyarakat sekitar, dan instansi terkait. Wali murid ikut serta dalam mendukung dan mengawasi anak-anaknya dalam kegiatan pembelajaran lingkungan hidup, tidak hanya sekolah tetapi juga dalam pekerjaan rumah. Selain itu terdapat keterlibatan masyarakat sekitar dan instansi terkait yang telah menjadi mitra dan narasumber untuk mendukung kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor pendukung dari lingkungan eksternal lainnya dalam implementasi program sekolah Adiwiyata adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BOS/BOSDA).

Disisi lain juga terdapat faktor penghambat dari lingkungan eksternal dalam implementasi program sekolah Adiwiyata yaitu timbal balik dari sekolah imbas yang dibina oleh Sekolah menengah Pertama Negeri 14 Malang kurang berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup yang diberikan.

“Faktor penghambat eksternalnya dari sekolah imbas yang kita bina. Tidak semua sekolah imbas yang kita bina itu tertarik, ikut serta dan berpartisipasi dalam pembinaan yang kita lakukan. Kadang ada sekolah, guru dan siswanya yang bersikap kurang termotivasi, kurang berperan aktif, acuh tak acuh, dan hanya sekedar saja menerima arahan dan binaan yang kita berikan mbak. Kadang mereka hanya menerima kondisi sekolah mereka yang seperti itu saja, kadang alasannya karena dana yang diberikan pemerintah tidak mencukupi. Ya kayak nggak ada keinginan dan kemauan untuk mengembangkan sekolahnya ke taraf Adiwiyata yang lebih tinggi gitu mbak.” (Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 14.35 WIB).

C. Pembahasan dan Analisis

1. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang

Program sekolah Adiwiyata merupakan wujud kebijakan pemerintah dalam suatu program untuk membentuk sekolah berbudaya lingkungan yang diterapkan pada sekolah-sekolah berjenjang dengan menanamkan pola pikir dan sikap peduli serta berbudaya lingkungan. Program ini dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dengan pemerintah daerah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia termasuk salah satunya pada tahun 2010 dicanangkan oleh Pemerintah Kota Malang yang bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang serta instansi dan pihak swasta terkait lainnya. Beberapa pihak instansi dan pihak swasta tersebut seperti Dinas Kesehatan Kota Malang, Departemen Agama, Perguruan Tinggi dan instansi serta organisasi atau LSM lembaga sekitar lainnya. Adanya program sekolah Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Pernyataan ini berkaitan dengan teori administrasi publik menurut Simon dalam Indradi (2006:117), bahwa administrasi publik sebagai kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan dalam administrasi publik ini memiliki kesinambungan dengan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain berkaitan dengan teori administrasi publik juga berkaitan dengan teori kebijakan oleh Kartasmita dalam kutipan Widodo (2009:12-13)

yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pada dasarnya semua program pemerintah merupakan sebuah hasil dari implementasi kebijakan, termasuk program sekolah Adiwiyata. Teori program yang diungkapkan Sukardi (2014:4) bahwa program merupakan salah satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui proses panjang dan disepakati oleh para pengelolanya untuk dilaksanakan oleh unsur-unsur pelaksana program.

Selain tujuan program sekolah Adiwiyata untuk menciptakan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan, juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah melalui pembelajaran lingkungan hidup yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik. Upaya yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik dengan menanamkan pola pikir, sikap peduli dan berbudaya lingkungan sedini mungkin. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 65 ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Kegiatan pembelajaran lingkungan hidup diterapkan dengan mengintegrasikan pada mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembiasaan atau budaya keseharian peserta didik. Pratomo (2008:26) menjelaskan bahwa pendidikan lingkungan hidup sangatlah penting. Dengan pemberian pembelajaran pendidikan lingkungan hidup ini, maka diharapkan mampu menciptakan kesadaran dan merubah mindset serta perilaku akan pentingnya lingkungan hidup. Penerapan program sekolah Adiwiyata tidak hanya ditujukan untuk peserta didik, namun juga melibatkan

warga sekolah dan pihak luar lainnya seperti tenaga pendidik, orang tua wali murid, masyarakat, instansi dan pihak swasta terkait.

Berdasarkan Lampiran II Poin C pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata bahwa terdapat komponen yang harus dilaksanakan dan menjadi sebagai standar penilaian program sekolah Adiwiyata. Penilaian Adiwiyata tersebut mencakup empat komponen dan delapan standar, yaitu Kebijakan Berwawasan Lingkungan, Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan, Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif dan Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan. Masing-masing komponen memiliki standar, antara lain: 1.) Kebijakan Berwawasan Lingkungan, terdiri dari standar yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2.) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan, terdiri dari standar yaitu Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup, dan Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3.) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif, terdiri dari standar yaitu Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah, dan Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, swasta, media dan sekolah lain; 4.) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan terdiri dari standar yaitu

Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan, dan Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.

Hasil wawancara dengan Ibu Ila Meimuna pada tanggal 22 Juni 2015 juga menjelaskan bahwa penilaian Adiwiyata dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Dinas Pendidikan Kota Malang. Badan Lingkungan Hidup Kota Malang menilai pada komponen ketiga dan keempat, yaitu Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ramah Lingkungan. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Malang menilai pada komponen kesatu dan kedua, yaitu Kebijakan Berwawasan Lingkungan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Partisipatif.

Badan Lingkungan Hidup Kota Malang menyatakan bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada tahun 2015 ini telah mampu menerapkan program Adiwiyata pada sekolahnya dan memperoleh gelar sebagai sekolah Adwiyata Mandiri. Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dalam pengimplementasiannya baik secara teori dan praktek telah merujuk pada peraturan perundang-undangan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013. Upaya yang dilakukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang berhasil dalam menciptakan sekolah berbudaya lingkungan tersebut diterapkan oleh perangkat beserta warga sekolah yang secara sadar dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Seperti hasil pendapat yang diuraikan oleh Ibu Khusnul Khotimah pada tanggal 5 Agustus 2015 kepada peneliti bahwa keberhasilan penerapan program sekolah Adiwiyata di latar belakang atas perhatian Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang terhadap

situasi dan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, bencana alam, perubahan iklim, global warming dan sebagainya. Hal ini dinilai sesuai dengan pendapat Karim (2003:46) yang menyatakan tujuan pendidikan lingkungan hidup menjadikan masyarakat sadar dan sensitif terhadap lingkungan dan berbagai masalahnya, serta memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, motivasi, dan kesediaan untuk bekerja secara perorangan atau kelompok ke arah pemecahan dan pencegahan permasalahan lingkungan hidup.

Selain itu, alasan mendasar lainnya karena sekolah merupakan tempat kedua setelah keluarga dalam memberikan pengaruh baik dengan merubah dan menciptakan pola pikir, perilaku dan tindakan warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan hidup sekitar. Sehingga menciptakan keinginan dan keyakinan atau tekad yang kuat untuk melakukan perubahan dan pembangunan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Mengamati upaya Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dalam menerapkan program Adiwiyata, maka peneliti berangkat dengan tolak ukur menggunakan lima variabel pada model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, yaitu: 1.) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; 2.) Sumberdaya; 3.) Karakteristik Agen Pelaksana; 4.) Sikap/Kecenderungan para Pelaksana; dan 5.) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. Selain itu, di dalam lima variabel tersebut masing-masing berisi komponen dan standar program sekolah Adiwiyata yang telah di klasifikan.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 pada Lampiran II Poin C diukur melalui komponen Kebijakan Berwawasan Lingkungan yang mencakup Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada standar KTSP termuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memaparkan visi, misi dan tujuan sekolah yang memuat upaya pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Pada kenyataannya seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti terdapat dalam susunan visi, misi dan tujuan sekolah serta telah diterapkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Artinya, pengukuran implementasi program Adiwiyata di Sekolah menengah Pertama Negeri 14 Malang yaitu melalui visi, misi dan tujuan sekolah yang jelas dan mampu dipahami serta diterapkan oleh warga sekolah. Seperti diuraikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-144) bahwa kegiatan implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang dipandang realistis dengan sosio-kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. Menyambung keberadaan teori tersebut, juga menurut Witaradya (2010) untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan dengan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Artinya para pelaksana tersebut yang utama dalam lingkup sekolah ialah tenaga pendidik dan peserta didik.

Selain itu, kegiatan pengembangan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup (PLH) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang telah terintegrasi dan dijadikan sebagai mata pelajaran monolitik. Disisi lain diperkuat oleh penjelasan Bapak Suseno mengenai standar ketuntasan minimal materi lingkungan hidup pada sepuluh mata pelajaran yang memiliki standar ketuntasan minimal 75 dan wajib untuk remidi atau memperbaiki nilai bagi peserta didik yang memiliki nilai dibawah 75. Kegiatan pengembangan PLH lainnya dengan menetapkan kegiatan sekolah yang mendukung seperti pembiasaan dan pengembangan diri bagi peserta didik. Hal ini membuktikan sejalan dengan tujuan program sekolah Adiwiyata bahwa pembelajaran PLH tidak hanya diterapkan dalam lingkungan sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sumberdaya

Pada variabel sumberdaya diukur berdasarkan sumberdaya manusia (SDM), waktu, finansial atau keuangan, dan sarana prasarana. Variabel tersebut seperti halnya dengan teori Jones dalam kutipan Widodo (2009:86) bahwa suatu implementasi menuntut adanya beberapa syarat yaitu pelaksana atau orang, uang dan kemampuan organisasional, atau yang disebut sumberdaya. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang ialah tenaga pendidik yang bertindak sebagai agen pelaksana dan peserta didik bertindak sebagai pelaksananya. Sejalan dengan pendapat model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-

144), manusia ialah sumberdaya yang utama dimana dituntut untuk berkualitas sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditetapkan.

Sebagai pengukuran kinerjanya dalam pelaksanaan Adiwiyata, tenaga pendidik dan peserta didik pada kenyataannya telah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Sri Wahyu Nastiti yang dikatakan bahwa tenaga pendidik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik kegiatan tersebut yang diadakan oleh pihak luar maupun pihak sekolah sendiri. Tenaga pendidik dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan mengikutsertakan peserta didik. Setiap kegiatan pendidikan atau pelatihan yang diadakan sekolah sendiri tersebut terdapat koordinator pelaksana, dengan mengajukan proposal kepada pihak luar, permintaan materi pembelajaran lingkungan hidup yang telah dipilih berdasarkan jenjang materi pelajaran peserta didik, serta ketersediaan pihak luar dalam menampung jumlah peserta didik.

Selain itu kualitas tenaga pendidik juga diukur melalui kompetensi yang dimiliki dan pengaruhnya bagi peserta didik. Penjelasan tersebut diperkuat oleh pendapat Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik sudah memenuhi standar dan kualifikasi akademik program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik tersebut bertujuan bagi peserta didik agar mampu memahami dan ikutserta dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Pada umumnya kompetensi yang dimiliki guru-guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran lingkungan hidup. Seperti

halnya dengan Ibu Sri Ibu Wahyu Nastiti merupakan selaku guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA).

Selanjutnya diukur melalui waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Adiwiyata yaitu selama tiga tahun. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang ini tidak membutuhkan waktu lama dan lebih cepat dibanding dengan sekolah lainnya. Hal ini tercapai sebab tim dan kelompok kerja (Pokja) sekolah yang terbentuk secara baik dan sinergi saling bekerja sama dan membantu satu sama lain serta mampu memanfaatkan waktu yang ada. Disisi lain dalam pelaksanaan Adiwiyata tidak terdapat batas waktunya dalam pengembangannya. Didukung oleh pendapat Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa Pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang tidak terdapat batas waktunya pengembangannya, sebab hal ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, membentuk dan mengembangkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan hidup, mempertahankan keberlangsungan lingkungan hidup, serta menghindari kerusakan akibat tindakan yang mengabaikan lingkungan hidup.

Kemudian sumberdaya finansial atau keuangan sesuai dengan komponen yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Lampiran II Poin C diukur melalui komponen Kebijakan Berwawasan Lingkungan yang mencakup standar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Standar ini menjelaskan mengenai program-program sekolah yang menunjang program Adiwiyata dan rencana anggaran mengenai kegiatan-

kegiatan sekolah yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Adiwiyata. Didukung oleh penjelasan Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa untuk dalam pelaksanaan Adiwiyata diperoleh dari dana bantuan operasional sekolah pemerintah pusat (BOSNA) dan daerah (BOSDA).

Kemudian, untuk rencana penganggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang telah dirincikan secara transparan dan tersusun. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh oleh peneliti dimana terdapat uraian penggunaan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan program Adiwiyata secara terperinci dan jelas serta pengeluaran yang ada sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Penjelasan mengenai sumberdaya waktu dan sumberdaya anggaran ini sesuai dengan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip dalam Agustino (2008:141-144) bahwa selain sumberdaya manusia yang diperhitungkan ialah sumberdaya keuangan dan sumberdaya waktu. Anggaran yang direalisasikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan perlunya dalam memanfaatkan waktu secara baik. Anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang telah diterapkan secara proporsional dialokasikan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah.

Selanjutnya sumberdaya sarana dan prasarana berdasarkan komponen yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Lampiran II Poin C melalui komponen Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan yang mencakup standar Ketersediaan sarana prasarana pendukung ramah lingkungan; dan Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana

dan prasarana yang ramah lingkungan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang pada kenyataannya telah melaksanakan kedua standar tersebut. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam penerapannya dalam pembelajaran lingkungan hidup yang menunjang pelaksanaan program Adiwiyata telah memadai dan diterapkan serta dipergunakan secara maksimal. Penjelasan ini didukung dengan adanya data lapangan yang diperoleh oleh peneliti.

Namun untuk standar peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah kenyataannya beberapa masih belum tersedia dan terpelihara dengan baik. Seperti hasil wawancara oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa masih terdapat peserta didik yang tidak memanfaatkan penggunaan listrik dan air secara efisien, yaitu lupa untuk mematikan listrik dan air kamar mandi. Kemudian terdapat pendapat lain yang diutarakan oleh siswi Tri Indah dan Amanda Dwira bahwa masih adanya sarana prasarana yang tidak maksimal seperti peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar LCD dan layar yang rusak dan tidak dapat dipergunakan. Hal ini menunjukkan sebagai faktor penghambat dalam menunjang pelaksanaan program Adiwiyata, seperti teori yang dijelaskan oleh Sunarko (2005:185) bahwa sarana prasana yang ada tersebut kemungkinan tidak atau kurang dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Variabel karakteristik agen pelaksana diukur melalui karakteristik yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Mengenai perhatian dan timbal balik yang diberikan tenaga pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan Adiwiyata. Pada kenyataannya, tenaga pendidik telah memberikan pengaruh yang

besar dalam pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Dijelaskan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-144) bahwa kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin (Witaradya, 2010).

Dalam pembelajaran lingkungan hidup tenaga pendidik telah menciptakan dan membentuk budaya dan kebiasaan peserta didik secara disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Kegiatan tenaga pendidik tersebut dilakukan melalui kegiatan proses belajar mengajar dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup didalamnya kepada peserta didik di sekolah. Sesuai dengan teori Nawawi (1984:8) yang menjelaskan bahwa pendidikan pada dasarnya upaya secara sadar dan terencana mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, baik di dalam maupun di luar sekolah. Begitu pula dengan peserta didik yang memberikan timbal balik dalam pembelajaran lingkungan hidup. Peserta didik dibentuk memiliki pola pikir dan tindakan yang cinta dan peduli terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menilai hal tersebut berdasarkan pendapat Nurjhani dan Widodo yang terdapat pada kutipan Landriany (2014) dimana sesuai dengan aspek perwujudan penerapan pendidikan lingkungan hidup, bahwa aspek afektif dalam penerapannya memandang pendidikan lingkungan hidup dapat berfungsi meningkatkan karakteristik kepribadian masing-masing individu dalam menata kehidupan dalam keselarasan dengan alam.

Selanjutnya diukur berdasarkan komponen yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Lampiran II Poin C melalui komponen Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan yang berisi dua standar yaitu tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fakta dilapangan, pada standar pertama dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dilaksanakan dengan baik. Tenaga pendidik telah berupaya mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dengan mengintegrasikan mata pelajaran yang ada dengan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup di sekolah. Hal ini didukung oleh hasil wawancara Ibu Lina Herlina pada tanggal 8 Juli 2015 menjelaskan setiap guru memiliki dan menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada siswa yang bertujuan untuk melibatkan siswanya secara aktif dalam kegiatan pembelajaran lingkungan hidup. Sama halnya dengan penjelasan tersebut, Bapak Suseno mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah mengikutsertakan peserta didik dan mengikutsertakan peran orang tua peserta didik dalam pembelajaran lingkungan hidup.

Selanjutnya standar kedua, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada kenyataanya, siswa-siswi Sekolah Menengah Negeri 14 Malang telah menerapkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup secara maksimal. Berdasarkan datum yang ada di penyajian data dimana di jelaskan dan di gambarkan kegiatan-kegiatan yang

dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan program Adiwiyata. Pada datum yang peneliti peroleh menunjukkan peserta didik telah berperan aktif dengan memahami dan melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah. Namun di sisi lain, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ditemukan kendala kecil yang menjadikan penghambat internal yaitu pada peserta didik sendiri. Hal ini didukung hasil wawancara peneliti oleh Bapak Suseno yang menjelaskan bahwa masih adanya peserta didik yang malas, belum berperan aktif dan memberikan timbal balik dalam kegiatan pembelajaran lingkungan hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang.

d. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana

Variabel selanjutnya ialah sikap atau kecenderungan para pelaksana dimana berisikan penerimaan atau penolakan dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata. Serta pelaksanaan program sekolah Adiwiyata dinilai menjadi kebutuhan atau keinginan bagi warga sekolah. Pada kenyataannya, tenaga pendidik dan peserta didik menerima pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Penerimaan warga sekolah yang pada akhirnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah yang dicanangkan bersama oleh tim atau kelompok kerja (Pokja) yang telah terbentuk dan mampu menempuh keberhasilan yang dicapai sekarang. Menilai hal tersebut, sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-144) dan pandangan Witaradaya (2010) bahwa sikap penerimaan maupun penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

Fakta tersebut di dorong dari adanya hasil wawancara oleh Bapak Suseno dan Ibu Sri Wahyu Nastiti. Penerimaan tersebut ditunjukkan dengan upaya perubahan yang membutuhkan waktu dan proses yang lama. Tenaga pendidik menjadi agen pelaksana atau aktor utama yang bertugas melalui kegiatan pembelajaran lingkungan hidup di sekolah. Tenaga pendidik telah berupaya membentuk dan menciptakan pola pikir, perilaku dan tindakan peserta didik. Hal ini menjadikan adanya timbal balik peserta didik yang berarti dengan keikutsertaan dan peran aktif dari peserta didik dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat teori Soemarwoto (1994:54) yang mengatakan manusia selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungan hidup seperti mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan, serta membentuk dan dibentuk oleh lingkungan hidup.

Selanjutnya melalui tolak ukur kebutuhan atau keinginan dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata. Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil wawancara Bapak Suseno dan Ibu Sri Wahyu Nastiti menjelaskan bahwa adanya pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah menengah Pertama Negeri 14 Malang telah menjadikan sebagai kebutuhan dan keinginan warga sekolah. Ini merupakan tuntutan warga sekolah dalam kegiatan keseharian yang berinteraksi langsung dengan alam menjadikan suatu kebutuhan yang khusus untuk lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan hidup sekitar. Kebutuhan dan keinginan memberikan dampak yang dirasakan berpengaruh positif khususnya bagi peserta didik dan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Senada dengan pernyataan Bapak Suseno dan Ibu Sri Wahyu Nastiti, peserta didik telah menerima secara baik pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Hal ini didukung dari hasil wawancara peserta didik oleh Katon Prayogo dan Tri Indah. Peneliti menilai penerimaan tersebut dipengaruhi karena peserta didik telah memahami program sekolah Adiwiyata dan pentingnya bagi keberlangsungan lingkungan hidup kedepannya. Mereka mampu membuktikan pemahaman mereka melalui pembelajaran yang ada di sekolah dan kegiatan-kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran lingkungan hidup di sekolah serta di kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pelaksanaan program sekolah Adiwiyata telah dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Melihat hasil wawancara Bapak Suseno dan Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang ada dan terjadi saat ini diselesaikan dengan cara mengintegrasikan konteks pembelajaran lingkungan hidup pada mata pelajaran yang telah ditentukan. Disisi lain dilakukan melalui pembelajaran lingkungan hidup dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik di sekolah sehari-hari. Tenaga pendidik menanamkan pola pikir, perilaku dan tindakan peserta didik untuk lebih peka, sadar, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup sekitar. Secara tidak langsung, hal ini membentuk peran aktif peserta didik dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah dengan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga sesuai dengan aspek perwujudan penerapan pendidikan lingkungan hidup oleh Nurjhani dan Widodo yang terdapat

pada kutipan Landriany (2014), bahwa aspek afektif dalam penerapannya memandang pendidikan lingkungan hidup dapat berfungsi meningkatkan penerimaan, penilaian, pengorganisasian dan karakteristik kepribadian dalam menata kehidupan dalam keselarasan dengan alam.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Variabel ini berisikan komunikasi dan koordinasi yang terbentuk antara tenaga pendidik, peserta didik, dan pihak luar serta dinilai berdasarkan komponen Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif. Pada kenyataannya, pelaksanaan program sekolah Adiwiyata menciptakan komunikasi dan koordinasi antara tenaga pendidik dan peserta didik dengan pihak luar yang secara baik dan terjaga. Hal ini didukung dengan hasil wawancara Ibu Sri Wahyu Nastiti dan Bapak Suseno bahwa, pelaksanaan program sekolah Adiwiyata menciptakan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dari sebelumnya. Adanya kesadaran masing-masing individu, komunikasi yang baik dan secara rutin serta adanya kerjasama nyata antara tim-tim yang membantu dan mempengaruhi satu sama lain. Ini membuktikan bahwa komunikasi tersebut menjadikan hal yang sangat penting yang membentuk koordinasi dan harus tetap dijaga demi berlangsungnya pembangunan sekolah kearah yang lebih baik yaitu melalui keberlanjutan sekolah yang berwawasan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn dalam kutipan Agustino (2008:141-144), koordinasi ialah mekanisme terpenting dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi yang terbentuk maka semakin baik pula komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam

proses implementasi dan minimnya terjadi kesalahan begitu pula sebaliknya. Komunikasi dan koordinasi tersebut tercipta dan berlangsung dari berbagai arah, baik secara horisontal yaitu antara tenaga pendidik dengan tenaga pendidik, peserta didik dengan peserta didik; dan secara vertikal yaitu antara tenaga pendidik dengan peserta didik, peserta didik dengan tenaga pendidik; serta antara pihak luar yaitu tenaga pendidik dengan pihak luar dan peserta didik dengan pihak luar, begitu sebaliknya.

Selain itu, diukur berdasarkan komponen yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Lampiran II Poin C melalui komponen Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif yang berisi dua standar yaitu melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah dan menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak. Pada kenyataannya yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang telah melaksanakan program sekolah Adiwiyata dengan baik. Hal ini didorong dengan datum yang ada di penyajian data dimana di jelaskan dan di gambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan program Adiwiyata. Pada datum yang peneliti peroleh menunjukkan warga sekolah secara baik dan terencana telah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran lingkungan hidup tersebut merupakan bentuk kegiatan budaya pembiasaan. Disisi lain, tenaga pendidik dan peserta didik juga telah ikut serta dan berperan aktif mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang diadakan oleh pihak luar.

Untuk kegiatan dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tenaga pendidik maupun peserta didik telah berupaya melaksanakan dengan baik dan maksimal. Begitu pula sebaliknya, pihak luar terutama instansi/swasta sekitar turut serta dan berperan aktif mendorong berjalannya pelaksanaan program sekolah Adiwiyata. Namun pada kegiatan menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup dan memberikan dukungan kepada pihak luar terkait peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditemukan penghambat. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembinaan atau mengimbas kepada sepuluh sekolah terpilih, yaitu sekolah setingkat Adiwiyata Kota/kabupaten. Hal ini seperti hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa kendala tersebut merupakan timbal balik yang diterima. Sekolah yang diimbas tersebut masih menunjukkan perilaku dan tindakan yang kurang termotivasi, peduli, berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan terkait pembelajaran lingkungan hidup yang diberikan. Sehingga dapat dinilai bahwa penghambat atau kendala tersebut terjadi sebagai akibat komunikasi dan koordinasi yang sulit tercapai sebagai akibat pola pikir, perilaku dan tindakan antara tenaga pendidik dan peserta didik sekolah imbas yang tidak terjaga dan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman suatu standar dan tujuan kebijakan yang ada (Witaradya, 2010).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang

a. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Lingkungan Internal

Faktor pendukung lingkungan internal ialah adanya tenaga pendidik yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dan kompetensi yang dimiliki. Sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang, tenaga pendidik sangat mempengaruhi perubahan dan pembangunan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Sumberdaya yang ada seperti tenaga pendidik yang bersumbangsih melalui kompetensi yaitu ketrampilan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki, maka mendorong keberhasilan penerapan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Upaya yang dilakukan dengan membentuk pola pikir dan menanamkan perilaku serta tindakan berbudaya lingkungan kepada peserta didik melalui berbagai metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Maka dari itu, tenaga pendidik sebagai sumberdaya manusia yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah menengah Pertama Negeri 14 Malang memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangsihnnya kepada peserta didik dan mengajarkan peserta didik untuk timbal balik terhadap kegiatan pembelajaran lingkungan hidup baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn dalam kutipan Agustino (2008, 141-144) dimana

sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel pokok yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. Di sisi lain, juga didukung oleh warga sekolah lain seperti perangkat sekolah yang terdiri dari pegawai tata usaha, petugas kebersihan, dan satpam/*security* sekolah.

Faktor pendukung yang lain yaitu pengelolaan anggaran (RKAS) secara transparan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sekolah. Sejalan dengan variabel anggaran yang dimaksud dalam implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn pada kutipan Agustino (2008, 141-144) dimana anggaran yang direalisasikan hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana yang ada telah menunjang kegiatan pembelajaran lingkungan hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang.

Faktor penghambat lingkungan internal ialah terdapat partisipasi peserta didik yang belum maksimal dalam keberlanjutan kegiatan pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Masih adanya peserta didik yang belum ikut serta berperan aktif melalui pembelajaran lingkungan hidup dalam kegiatan belajar di kelas. Selain itu, masih ditemukan peserta didik yang tidak memanfaatkan penggunaan listrik dan air secara efisien dalam penerapan kesehariannya. Hal ini menjadikan sebagai salah satu faktor penghambat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan Adiwiyata kedepannya. Maka dari itu, sejalan dengan pendapat Sunarko (2005:185) bahwa faktor penghambat dipengaruhi oleh ketidakpastian faktor internal dan/atau faktor eksternal itu

sendiri. Yang diartikan bahwa gambaran peserta didik yang kurang memahami betul program sekolah Adiwiyata dan pentingnya pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah menengah Pertama Negeri 14 Malang.

Faktor penghambat internal lainnya dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata ini membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga pihak sekolah berupaya untuk menghemat pengeluaran yang ada dan mencukupkan bagi kebutuhan yang memang hanya diperlukan dalam pelaksanaan Adiwiyata. Sebab dana tersebut hanya diperoleh dari dana bantuan operasional pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Malang (BOS/BOSDA). Pernyataan tersebut didukung dari hasil wawancara peneliti oleh pendapat Ibu Sri Wahyu Nastiti selaku guru IPA, Ketua dan Koordinator Panitia Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Kemudian faktor penghambat yang terakhir ialah adanya sarana dan prasarana yang tidak tersedia dengan baik seperti terdapat beberapa LCD yang telah rusak dan layar tidak dapat dipergunakan.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Lingkungan Eksternal

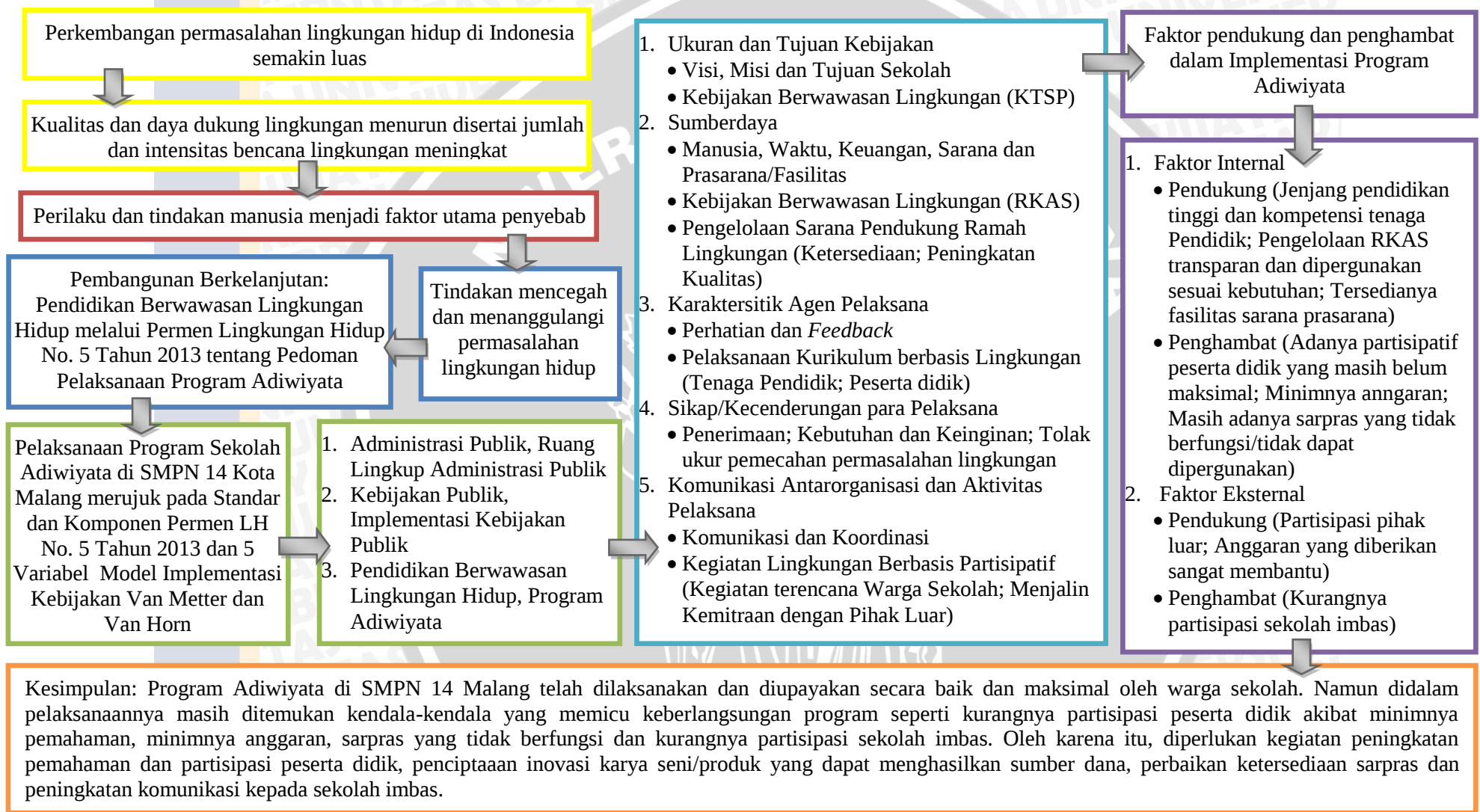
Faktor pendukung lingkungan eksternal ialah adanya dorongan pihak luar seperti wali murid atau orang tua peserta didik, masyarakat sekitar, dan instansi terkait dan/atau swasta lainnya dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Wali murid berperan dalam mendukung dan mengawasi kegiatan pembelajaran lingkungan hidup anaknya, tidak hanya dalam lingkup sekolah dan pekerjaan sekolah tetapi juga dalam lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah.

Selanjutnya, dukungan lain diperoleh dari kerjasama keterlibatan masyarakat sekitar dan instansi terkait dengan menjadi mitra dan narasumber melalui kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dalam pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang. Maka dari itu, sesuai Soenarko (2005:186-187) bahwa persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari pihak sekitar mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, pendukung lingkungan eksternal lainnya yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Malang (BOS/BOSDA) merupakan bentuk dukungan yang berarti bagi sekolah.

Faktor penghambat lingkungan eksternal yaitu timbal balik yang kurang berarti dari sekolah imbas yang dibina oleh Sekolah menengah Pertama Negeri 14 Malang. Hal ini ditunjukkan seperti tindakan yang kurang ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup yang diberikan. Sekolah imbas tersebut kurang termotivasi oleh lingkungan internal mereka, bersikap tidak peduli (acuh tak acuh), dan sekadar menerima arahan namun tidak memahami dan menjalankannya. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai teori Hogwood dan Gunn pada kutipan Abdul Wahab (2012:128-129) yang menyatakan implementasi sudah sesuai dengan rencana namun kondisi eksternal tidak menguntungkan; dan implementasi yang tidak sesuai dengan rencana disebabkan pihak-pihak terkait yang tidak mau bekerjasama, atau bekerja tidak secara efisien, atau mereka tidak sepenuhnya memahami kebijakan, atau kebijakan berada diluar kemampuan mereka sehingga hambatan-hambatan yang ada tidak dapat

mereka selesaikan. Selain menurut Hogwood dan Gunn, penghambat tersebut juga sesuai dengan pendapat Sunarko (2005:185) bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kurang memperhatikan masalah teknis dan adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber seperti waktu, uang dan sumberdaya manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Sri Wahyu Nastiti bahwa sekolah imbas yang dilakukan pembinaan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang hanya menerima kondisi sekolah mereka dengan keterbatasan yang dimiliki seperti dana yang tidak mencukupi untuk memungkinkannya dilakukan perubahan serta tidak memiliki tekad seperti keinginan dan kemauan untuk pengembangan sekolah mereka.





Gambar 19.
Matriks Hasil Penelitian
Sumber: Olahan Peneliti, 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka pelaksanaan program Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang dapat ditarik kesimpulan:

1. Standar dan tujuan seperti visi, misi dan tujuan sekolah serta komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat standar kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan pengembangan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup telah diterapkan.
2. Karakteristik agen pelaksana dimana warga sekolah memiliki perhatian dan timbal balik melalui komponen program Adiwiyata kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dan melalui komponen Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan.
3. Sikap/Kecenderungan warga sekolah melalui penerimaan, kebutuhan dan keinginan serta dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup sekitar.
4. Komunikasi antara warga sekolah dengan pihak luar terlaksana melalui komponen program Adiwiyata Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif.
5. Pendukung internal ialah tenaga pendidik memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, kualitas dan kompetensi yang dimiliki; dan anggaran telah disusun dan dirincikan secara transparansi serta dipergunakan sesuai kebutuhan.

Sedangkan pendukung eksternal ialah adanya dukungan dari pihak luar sebagai mitra dan narasumber seperti wali murid atau orang tua peserta didik, masyarakat dan instansi/swasta.

6. Penghambat internal ialah sumberdaya yang ada secara keseluruhan belum berjalan dengan baik berupa peserta didik yang belum berpartisipasi karena kurangnya pemahaman dan penerapan dalam kesehariannya; membutuhkan dana yang tidak sedikit; serta sarana dan prasarana masih ada yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan penghambat eksternal ialah kurangnya peran aktif dan partisipasi tim sekolah imbas terhadap kegiatan pembinaan pembelajaran lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, sebagai bahan pertimbangan maka saran yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang:

1. Hendaknya meningkatkan pemahaman kesadaran dan tanggung jawab peserta didik akan pentingnya pembelajaran lingkungan hidup melalui komunikasi yang intensif dan pendidikan dan pelatihan oleh tenaga pendidik dan pihak luar agar lebih meningkatkan lagi partisipasi peserta didik dalam kegiatan lingkungan di sekolah.
2. Penanggulangan anggaran dapat diupayakan dengan meminimalisir kegiatan yang membutuhkan pengeluaran yang lebih dan menciptakan inovasi dengan

memanfaatkan produk-produk bekas dan kerajinan yang bernilai tinggi dan dapat dijual kembali serta mampu menutupi anggaran.

3. Perlunya perbaikan ketersediaan sarana prasarana melalui peninjauan dan pengawasan secara keseluruhan serta penggunaan sebagaimana mestinya agar tetap dapat menunjang kegiatan pembelajaran lingkungan hidup di sekolah.
4. Perlunya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan sekolah imbas melalui kegiatan yang meningkatkan pemahaman akan pentingnya pembelajaran lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adli, Abah R. D. 2012. *Prinsip Dasar Program Adiwiyata*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2014 dari <http://mikertijayan.blogspot.com/2014/02/doanload-materi-bintek-adiwiyata-kab.html?m=1>.
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1988. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dimock & Dimock. 1992. *Administrasi Negara* terjemahan Husni Thamrin Pane. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ginting, Longgena. 2014. *Presiden Baru dengan Masalah Lingkungan Menumpuk*. Diakses pada tanggal 9 Maret 2015 dari <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/presiden-baru-dengan-masalah-lingkungan-menum/blog/51013/>.
- Herry, A. 2005. *9 Kunci Sukses Tim Sukses dalam Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Galang Press.
- Hidayat, Asep Saepul. 2012. *Manajemen Sekolah Berbasis Karakter*. Diakses pada tanggal 16 Maret 2015 dari http://www.academia.edu/7934649/Jurnal_Inovasi_dan_Kewirausahaan_MANAJEMEN_SEKOLAH_BERBASIS_KARAKTER.pdf.
- Indradi, Sjamsiar S. 2006. *Dasar – Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Agritek YPN: Malang.
- Juniar, Midia. 2013. *Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Perspektif Deliberatif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2014 dari http://journal.unair.ac.id/filerPDF/15%20Midia_KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.doc.pdf.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* terjemahan Ismanto. Jakarta: Adicita.

Karim, S. A. 2003. *Program PKLH Jalur Sekolah: Kajian dari Perspektif Kurikulum dan Hakekat Belajar Mengajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Informasi mengenai Adiwiyata*. Diakses pada tanggal 30 September 2014 dari <http://www.menlh.go.id/informasi-mengenai-adiwiyata/>.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. *Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2013*. Diakses pada tanggal 30 September 2014 dari <http://www.menlh.go.id/penghargaan-sekolah-adiwiyata-nasional-2013/>.

Landriany, Ellen. 2014. *Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2014 dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jmkpp/article/viewFile/1739/1834.pdf>

Madya, Kania T. W. 2012. *Green School/Sekolah Berbudaya Lingkungan*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2014 dari <http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/pendidikan---or/1326948669/green-school-sekolah-berbudaya-lingkungan.html>.

Makmur, Mochamad. 2009. *Ekologi Administrasi Publik: Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik*. Malang: Brawijaya University Press.

Moesa, Soekarman. 2002. *Ilmu Lingkungan: Ekosistem, Manusia, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Monalisa. 2013. *Program Adiwiyata Dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah di SMPN 24 Padang*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2014 dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pgeo/article/download/580/339.pdf>

Nawawi, Hadari. 1984. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pemerintah Kota Malang. 2015. *Sejarah dan Sekilas tentang Kota Malang*. Diakses pada tanggal 15 April 2015 dari <http://malangkota.go.id>.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Pratomo, Suko. 2008. *Pendidikan Lingkungan*. Bandung: Sonagar Press.

Saldana, J. Miles, M. B. and Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. Diakses pada tanggal 5 Mei 2015 dari http://www.sagepub.com/upm-data/55585_Chapter_1_Sample_Miles_Qualitative_Data_Analysis_3e_2.pdf

Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Unair Press.

Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Soeriaatmadja, R.E. 1999. *Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Sridianti. 2014. *Pengertian Lingkungan hidup menurut para ahli*. Diakses pada tanggal 21 Maret 2015 dari <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>

Stapp, W. B. and et al. 1997. *The Concept of Environmental Education*. Diakses pada tanggal 16 Maret 2015 dari http://hiddencorner.us/html/PDFs/The_Concept_of_EE.pdf

Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan: Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryosubroto, B. 1990. *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutisna, Oteng. 1983. *Pendidikan dan Pembangunan: Tantangan Bagi Pembaharuan Pendidikan*. Bandung: Ganaco NV.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tanjung, Zamzami. 2014. *Inilah Daftar Masalah Lingkungan Versi Netizen Untuk Diselesaikan oleh Presiden Jokowi*. Diakses pada tanggal 9 Maret 2015 dari [http : // www.mongabay.co.id / 2014 / 11 / 07 / inilah-daftar-masalah-lingkungan-versi-netizen-untuk-diselesaikan-oleh-presiden-jokowi/](http://www.mongabay.co.id/2014/11/07/inilah-daftar-masalah-lingkungan-versi-netizen-untuk-diselesaikan-oleh-presiden-jokowi/).

Tim Adiwiyata Tingkat Nasional, 2011. *Panduan Adiwiyata: Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses pada tanggal 7 Maret 2015 dari [http: //www.bplhdjabar.go.id/index.php/dokumen-publikasi/doc_download/ 538-buku-panduan-adiwiyata-2012.pdf](http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/dokumen-publikasi/doc_download/538-buku-panduan-adiwiyata-2012.pdf)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Witaradya, Kertya. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*. Diakses pada tanggal 5 Mei 2015 dari <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/173.04.P/35.73.405/2015

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 6088/UN10.3/PG/2015 Tanggal 21 April 2015, Perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : HAMIDA APRILLIA JAYANTIE.
- b. NIM : 115030107111111.
- c. Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan No. 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Informasi dan data tugas akhir yang berlokasi di :

- Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang.
- Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Malang

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

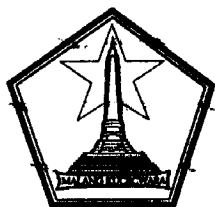
- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 24 Mei 2015**.

Malang, 23 April 2015


BAMBANG SUHARIJADI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan : -
Yth. Sdr. - Ketua Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi



PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333
Website : <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id
Kode POS : Malang 65145

REKOMENDASI

Nomor : 074 / 1862 / 35.73.307 / 2015

Menunjuk surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tanggal 29 Mei 2015 Nomor 8292/UN10.3/PG/2015 Perihal : Permohonan Ijin Survey, maka dengan ini kami berikan ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada :

1. Nama : Hamida Aprillia Jayantie
2. NIM : 115030107111111
3. Jenjang : S1
4. Prodi. / Jurusan : Administrasi Publik
5. Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 14 Malang
6. Waktu Pelaksanaan : Juni s.d Agustus 2015
7. Judul : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Tentang Program Adiwiyata

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik – baiknya dengan Kepala SKPD / Sekolah ybs;
2. Tidak Mengganggu proses belajar – mengajar;
3. Berlaku selama tidak menyimpang dari peraturan;
4. Selesai melaksanakan penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 Juni 2015.
A.A. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
Sekretaris
DINAS
PENDIDIKAN
SUWAKJANA, SE. MM.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19670302 199602 1 003

Tembusan :

1. Kepala SMP Negeri 14 Malang
2. Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6088 /UN10.3/PG/2015
Lampiran :
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
Di tempat.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu /Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Hamida Aprillia Jayantie
Alamat : Perum. Saptoraya Blok BO-6b RT.03/RW.15, Pakis - Malang
NIM : 115030107111111
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Publik
Tema : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013
Tentang Program Adiwiyata
Lamanya : 2 (dua) bulan (mulai tanggal 27 April 2015 s/d 27 Juni 2015)
Peserta : 1 (satu) orang
Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 21 April 2015

a.n Dekan

Ketua Prodi Administrasi Publik



Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : *6088* /UN10.3/PG/2015
Lampiran :
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang
Di tempat.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu /Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Hamida Aprillia Jayantie
Alamat : Perum. Saptoraya Blok BO-6b RT.03/RW.15, Pakis - Malang
NIM : 115030107111111
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Publik
Tema : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013
Tentang Program Adiwiyata
Lamanya : 2 (dua) bulan (mulai tanggal 27 April 2015 s/d 27 Juni 2015)
Peserta : 1 (satu) orang
Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 21 April 2015
Ket. Prodi Administrasi Publik


Dr. Lela Lela Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

1. *Perusahaan/Instansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Jurusan*
4. *Arsip TU*



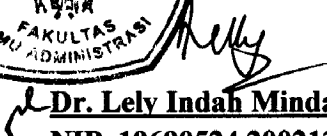
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : ~~8292~~ /UN10.3/PG/2015
Lampiran :
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
Di tempat.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu /Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Hamida Aprillia Jayantie
Alamat : Perum. Saptoraya Blok BO-6b RT.03/RW.15, Pakis - Malang
NIM : 115030107111111
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Publik
Tema : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013
Tentang Program Adiwiyata
Lamanya : 2 (dua) bulan (tanggal 3 Juni 2015 s/d 4 Juli 2015 – tanggal 3 Agustus 2015
s/d 29 Agustus 2015)
Peserta : 1 (satu) orang
Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 29 Mei 2015
Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

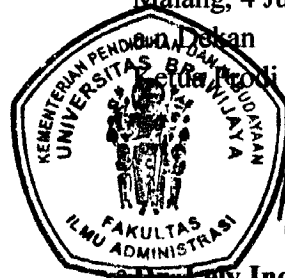
Nomor : 8292/UN10.3/PG/2015
Lampiran :
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Malang
Di tempat.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu /Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Hamida Aprillia Jayantie
Alamat : Perum. Saptoraya Blok BO-6b RT.03/RW.15, Pakis - Malang
NIM : 115030107111111
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Publik
Tema : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013
Tentang Program Adiwiyata
Lamanya : 2 (dua) bulan (tanggal 8 Juni 2015 s/d 4 Juli 2015 – tanggal 3 Agustus 2015
s/d 29 Agustus 2015)
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Juni 2015



Dekan
Prodi Administrasi Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Kota Malang

1. Apakah perbedaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013?
2. Berapakah penilaian yang diberikan pada masing-masing kategori Adiwiyata Kota/Kabupaten hingga Adiwiyata Mandiri dan apa sajakah persyaratan Adiwiyata Mandiri?
3. Dengan siapa sajakah Badan Lingkungan Hidup Kota Malang bekerjasama dalam pelaksanaan program Adiwiyata?

Pedoman wawancara pada Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum SMPN 14 Malang

1. Apakah pelaksanaan program Adiwiyata di SMPN 14 Malang sudah berpedoman pada Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013?
2. Apakah terdapat alasan yang mendasari dalam melaksanakan program Adiwiyata di SMPN 14 Malang?

Pedoman wawancara pada Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan Ketua dan Koordinator panitia program Adiwiyata SMPN 14 Malang

1. Apakah adanya pelaksanaan program Adiwiyata menciptakan penerimaan ataukah penolakan bagi tenaga pendidik dan peserta didik?

2. Apakah adanya pelaksanaan program Adiwiyata menjadi kebutuhan atau keinginan tenaga pendidik dan peserta didik?
3. Apakah adanya pelaksanaan program Adiwiyata menjadikan tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di sekolah?
4. Apakah adanya pelaksanaan program Adiwiyata menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik antara tenaga pendidik, peserta didik, dan pihak luar?
5. Apakah anda menemukan pendukung dan penghambat dalam kegiatan pembelajaran lingkungan hidup?

Pedoman wawancara pada Ketua dan Koordinator panitia program Adiwiyata SMPN 14 Malang

1. Apakah visi, misi dan tujuan SMPN 14 Malang telah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apakah bantuan operasional/dana yang diperoleh dari Pemprov maupun Pemda telah menunjang dan mencukupi pelaksanaan Adiwiyata di SMPN 14 Malang?
3. Apakah tenaga pendidik dan peserta didik sering mengikuti pendidikan atau pelatihan? Dan apakah dengan hal tersebut mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik?
4. Apakah kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik sudah memenuhi standar dan kualifikasi akademik dalam menunjang pembelajaran pembelajaran lingkungan hidup di SMPN 14 Malang?

5. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan SMPN 14 Malang dalam melaksanakan program Adiwiyata untuk menuju sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri?
6. Apakah terdapat batas waktu dalam menerapkan program Adiwiyata saat ini?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor?
8. Bagaimana perhatian dan timbal balik yang diberikan tenaga pendidik dan peserta didik atas keterlibatan dan pengaruhnya dalam pelaksanaan program Adiwiyata di SMPN 14 Malang?

Pedoman wawancara pada guru-guru SMPN 14 Malang

1. Bagaimana upaya anda untuk melibatkan siswa secara aktif mengikuti pembelajaran lingkungan hidup?
2. Metode pembelajaran Lingkungan hidup seperti apa yang sering anda gunakan dalam proses belajar mengajar di kelas? Dan bagaimana timbal balik siswa?
3. Berapakah Standar Ketuntasan Minimal/KKM belajar pada masing-masing mata pelajaran?
4. Bagaimana upaya anda dalam mengembangkan materi isu lokal hingga global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup?
5. Apakah menurut anda sarana dan prasarana yang ada sudah mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah?
6. Bagaimana upaya anda mengikutsertakan orang tua siswa dalam pelaksanaan Adiwiyata di SMPN 14 Malang?

Pedoman wawancara pada siswa-siswi SMPN 14 Malang

1. Menurut adik, apakah yang dimaksud dengan Adiwiyata?
2. Apakah adik menerima pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah? dan apakah Adiwiyata menjadi kebutuhan atau keinginan adik?
3. Menurut adik, seberapa penting pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah?
4. Bagaimana metode pembelajaran yang diberikan tenaga pendidik? Apakah menurut adik sudah baik dan menarik?
5. Apakah menurut adek sarana prasarana yang ada telah mendukung kegiatan pembelajaran lingkungan hidup?





PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diselenggarakan program Adiwiyata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);



4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
2. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
3. Menteri terkait adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. edukatif;
- b. partisipatif; dan
- c. berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata kepada seluruh unsur pelaksana Program Adiwiyata baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 4

- (1) Program Adiwiyata diikuti oleh:
- a. Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA); dan



- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- (2) Sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus negeri atau swasta yang telah terakreditasi.

Pasal 5

Penyelenggara Program Adiwiyata terdiri atas:

- a. Menteri dan menteri terkait;
- b. gubernur; dan
- c. bupati/walikota.

Pasal 6

- (1) Komponen Program Adiwiyata, meliputi:
 - a. aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan;
 - b. aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan;
 - c. aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan
 - d. aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.
- (2) Terhadap pelaksanaan komponen Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan:
 - a. pembinaan;
 - b. penilaian; dan
 - c. pemberian penghargaan.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri membentuk:
 - a. dewan pertimbangan adiwiyata;
 - b. tim teknis adiwiyata;
 - c. tim pembina adiwiyata nasional; dan
 - d. tim penilai adiwiyata nasional.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, gubernur membentuk:
 - a. tim pembina adiwiyata provinsi; dan
 - b. tim penilai adiwiyata provinsi.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, bupati/walikota membentuk:
 - a. tim pembina adiwiyata kabupaten/kota; dan
 - b. tim penilai adiwiyata kabupaten/kota.
- (4) Unsur, susunan keanggotaan, dan perincian tugas tim yang menunjang pelaksanaan Program



Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pembentukan sekolah model atau percontohan;
 - d. pendampingan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi program.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh tim pembina adiwiyata:
 - a. nasional;
 - b. provinsi; dan
 - c. kabupaten/kota,sesuai dengan perincian tugasnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman pembinaan adiwiyata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Terhadap hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri, menteri terkait, gubernur, atau bupati/walikota melakukan penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian Adiwiyata.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh tim penilai:
 - a. adiwiyata nasional;
 - b. adiwiyata provinsi; dan
 - c. adiwiyata kabupaten/kota,sesuai dengan perincian tugasnya.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penilaian Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan tahapan yang meliputi:
 - a. penyampaian permohonan penilaian secara tertulis oleh calon Sekolah Adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota;



- b. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata oleh tim penilai kabupaten/kota;
 - c. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota kepada tim penilai provinsi;
 - d. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota oleh tim penilai provinsi;
 - e. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata provinsi kepada tim penilai nasional;
 - f. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata provinsi oleh tim penilai nasional; dan
 - g. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata nasional kepada Menteri melalui dewan pertimbangan adiwiyata.
- (2) Penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan terhadap sekolah yang memenuhi nilai pencapaian tingkat provinsi dan nasional.
- (3) Perincian tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Penilaian Program Adiwiyata dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 12

- (1) Calon Sekolah Adiwiyata yang memenuhi nilai capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;
 - b. Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi diberikan oleh gubernur;
 - c. Sekolah Adiwiyata tingkat nasional diberikan oleh Menteri dan menteri terkait; dan
 - d. Sekolah Adiwiyata mandiri diberikan oleh Menteri dan menteri terkait.

Pasal 13

- (1) Sekolah atau madrasah dapat diusulkan oleh tim penilai adiwiyata provinsi kepada tim penilai adiwiyata nasional sebagai calon penerima penghargaan adiwiyata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, jika:



- a. telah menjadi Sekolah Adiwiyata nasional;
 - b. pada saat penilaian tahun berjalan mencapai nilai pencapaian tingkat nasional; dan
 - c. memiliki 10 (sepuluh) sekolah imbas yang memenuhi kriteria Adiwiyata kabupaten/kota.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui dewan pertimbangan adiwiyata untuk ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Tim penilai dalam melaksanakan penilaian Program Adiwiyata wajib mematuhi kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
 - b. menaati semua ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - c. tidak diperbolehkan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian Program Adiwiyata;
 - d. berkomunikasi secara sopan dan profesional dalam melaksanakan penilaian;
 - e. berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan penilaian teknis; dan
 - f. tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun.

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan program adiwiyata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2013
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 716

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA

UNSUR, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN PERINCIAN TUGAS TIM YANG
MENUNJANG PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

A. Dewan Pertimbangan Adiwiyata

1. Unsur Dewan Pertimbangan adiwiyata berasal dari:

- instansi lingkungan hidup Pusat;
- instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- perguruan tinggi;
- organisasi lingkungan hidup;
- media massa;
- pemerhati lingkungan hidup;
- pemerhati pendidikan; dan
- budayawan.

2. Tugas Dewan Pertimbangan Adiwiyata:

- memberikan arahan dan pertimbangan dalam pengembangan konsep dan pelaksanaan Program Adiwiyata;
- mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri terhadap calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata mandiri dan Sekolah Adiwiyata nasional.

B. Tim Teknis

1. Unsur Tim teknis adiwiyata berasal dari:

- instansi lingkungan hidup Pusat;
- instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- perguruan tinggi;
- organisasi lingkungan hidup;
- dunia usaha; dan
- media massa.

2. Tim teknis bertugas mengembangkan kriteria, indikator, dan mekanisme pelaksanaan Program Adiwiyata.

C. Tim Pembina

1. Tim pembina nasional

a. Unsur Tim pembina nasional berasal dari:

- instansi lingkungan hidup Pusat;
- instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- 3) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- 4) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- b. Tugas tim pembina nasional meliputi:
 - 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
 - 2) bimbingan teknis kepada tim pembina provinsi;
 - 3) pendampingan terhadap tim pembina provinsi; dan
 - 4) monitoring dan evaluasi program.
2. Tim pembina provinsi
 - a. Unsur tim pembina provinsi berasal dari:
 - 1) instansi lingkungan hidup provinsi;
 - 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi.
 - b. Tugas tim pembina provinsi meliputi:
 - 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
 - 2) bimbingan teknis kepada tim pembina kabupaten/kota;
 - 3) pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
 - 4) pendampingan terhadap tim pembina kabupaten/kota;
 - 5) monitoring dan evaluasi program; dan
 - 6) penyusunan laporan pembinaan.
3. Tim pembina kabupaten/kota
 - a. Unsur tim pembina kabupaten/kota paling sedikit berasal dari:
 - 1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
 - 2) instansi kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di kabupaten/kota.
 - b. Tugas tim pembina kabupaten/kota meliputi:
 - 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
 - 2) bimbingan teknis kepada tim sekolah;
 - 3) pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1(satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
 - 4) pendampingan terhadap sekolah;
 - 5) monitoring dan evaluasi program; dan
 - 6) penyusunan laporan pembinaan.
- D. Tim penilai
 1. Tim penilai nasional
 - a. Unsur tim penilai nasional paling sedikit berasal dari:
 - 1) instansi lingkungan hidup pusat;
 - 2) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 3) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - 4) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - 5) organisasi lingkungan hidup;
 - 6) perguruan tinggi; dan

- 7) media massa.
 - b. Tim penilai nasional bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata mandiri dan nasional berdasarkan kriteria penilaian.
2. Tim penilai provinsi
 - a. Unsur Tim penilai provinsi paling sedikit berasal dari:
 - 1) instansi lingkungan hidup provinsi;
 - 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi;
 - 4) organisasi lingkungan hidup;
 - 5) perguruan tinggi; dan
 - 6) media massa.
 - b. Tim penilai provinsi bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata provinsi berdasarkan kriteria penilaian.
 3. Tim penilai kabupaten/kota
 - a. Unsur Tim penilai kabupaten/kota paling sedikit berasal dari:
 - 1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
 - 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi;
 - 4) organisasi lingkungan hidup;
 - 5) media massa.
 - b. Tim penilai kabupaten/kota bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata kabupaten/kota berdasarkan kriteria penilaian.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA

PEDOMAN PEMBINAAN ADIWIYATA

- A. Ruang Lingkup
Kegiatan pembinaan adiwiyata terdiri atas:
1. sosialisasi;
 2. bimbingan teknis;
 3. pembentukan sekolah model/percontohan;
 4. pendampingan; dan
 5. monitoring dan evaluasi program.
- B. Tujuan
Pembinaan adiwiyata bertujuan untuk:
1. meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
 2. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Program Adiwiyata; dan
 3. meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan adiwiyata baik di propinsi maupun di kabupaten/kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya.
- C. Materi
Komponen dan standar adiwiyata meliputi:
1. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar:
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar:
 - a. tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
 - b. peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar:
 - a. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
 - b. menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.
 4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar:
 - a. ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;
 - b. peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Uraian Komponen dan Standar tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Tersusunnya visi, misi, dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
	b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	b. Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri.
	c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar.	c. Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga	a. sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari total anggaran sekolah; b. anggaran sekolah di alokasikan secara proporsional untuk kegiatan kesiswaan, kurikulum dan kegiatan

Standar	Implementasi	Pencapaian
	kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.	pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.

Tabel 2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.	a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran;	a. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif, antara lain : demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, praktek lapangan, penugasan, observasi, project percontohan, dll.
	b. Mengembangkan isu lokal dan/ atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan;	b. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup;	c. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang

Standar	Implementasi	Pencapaian
		terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas;	d. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	e. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup;	e. Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: 1) SD/MI sebesar 50% (lima puluh perseratus); 2) SMP/MTs sebesar 40% (empat puluh perseratus); 3) SMA/MA sebesar 30% (tiga puluh perseratus); 4) SMK/MAK sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
	f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup;	f. Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui, antara lain: 1) majalah dinding; 2) buletin sekolah; 3) pameran; 4) website; 5) radio; 6) TV; 7) surat kabar; dan 8) jurnal.

Standar	Implementasi	Pencapaian
	g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	g. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	a. 50% (lima puluh perseratus) Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 1) makalah; 2) puisi/sajak; 3) artikel; 4) lagu; 5) hasil Penelitian; 6) gambar; 7) seni tari; dan 8) produk daur ulang.
	b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari;	b. 50% (lima puluh perseratus) peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari
	c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media	c. 50% (lima puluh perseratus) peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui antara lain: 1) majalah dinding; 2) buletin sekolah; 3) pameran; 4) website; 5) radio; 6) televisi;

Standar	Implementasi	Pencapaian
		7) surat kabar; dan 8) jurnal.

Tabel 3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah	a. memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah;	a. 80% (delapan puluh perseratus) warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: 1) piket kebersihan kelas; 2) Jumat Bersih; 3) lomba kebersihan kelas; dan 4) kegiatan pemeliharaan taman oleh masing-masing kelas.
	b. memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	b. 80% (delapan puluh perseratus) warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: 1) pemeliharaan taman; 2) tanaman obat keluarga; 3) hutan sekolah; 4) pembibitan; 5) kolam; dan 6) pengelolaan sampah.
	c. mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	c. 80% (delapan puluh perseratus) kegiatan ekstrakurikuler antara lain Pramuka, Karya Ilmiah Remaja,

		dokter kecil, Palang Merah Remaja, dan Pecinta Alam, yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: 1) pengomposan, tanaman obat keluarga; 2) biopori; 3) daur ulang; 4) pertanian organik; dan 5) biogas.
	d. adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	d. 5 (lima) klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut: 1) daur ulang sampah; 2) pemanfaatan dan pengolahan air; 3) karya ilmiah; 4) karya seni; 5) hemat energi; 6) energi alternatif.
	e. mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.	1) tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar; 2) peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.

2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain : orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll.	a. memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup;	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup.
	b. mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	3 (tiga) mitra yang mendukung kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti : pelatihan yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dll.
	c. meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah untuk kegiatan aksi bersama terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	d. menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup;	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, seperti seminar, workshop, lokakarya, dll .
	e. memberi dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti: bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, biogas, dll.

Tabel 4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan	a. menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah;	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/ getaran/radiasi, dll.
	b. menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah.	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/ taman/kebun sekolah, green house, tanaman obat keluarga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	a. memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan;	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, antara lain: 1) ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami; 2) pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan; 3) menggunakan paving block.

b. meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah;	Tersedianya 4 (empat) unsur dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah, antara lain: a. penanggung jawab; b. pelaksana; c. pengawas; d. tata tertib.
c. memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien;	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor.
d. meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan;	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi: a. Kantin tidak menjual makanan/ minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. b. Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/ terkontaminasi, kadaluarsa. c. Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti plastik, styrofoam, dan aluminium foil.

- D. pembinaan sekolah adiwiyata dilakukan dengan tahapan:
1. Tim pembina kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada sekolah dan melaporkan hasil pembinaan kepada tim pembina provinsi dengan tembusan kepada tim pembina nasional.
 2. Tim pembina provinsi melakukan pembinaan kepada tim pembina kabupaten/kota dan melaporkan hasil pembinaan kepada tim pembina nasional.
 3. Tim pembina nasional melakukan pembinaan kepada tim pembina provinsi dan melaporkan hasil pembinaan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pendidikan.

4. Laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
 HIDUP REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 05 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 ADIWIYATA

KRITERIA PENILAIAN ADIWIYATA

A. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Visi, Misi dan Tujuan sekolah yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1) memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	2	0,5	1	2
			Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat 1 (satu) upaya PPLH	Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat 2 (dua) upaya PPLH	Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat 3 upaya PPLH
		2	0,5	1	2
			2) Terinternalisasi (tahu dan paham) Visi, misi dan tujuan kepada semua warga sekolah.	Visi, misi dan tujuan dipahami kepala sekolah, 3 orang tenaga pendidik, 2 orang komite sekolah, 10 orang peserta didik, dan 2 orang tenaga non kependidikan	Visi, misi dan tujuan dipahami kepala sekolah, 5 orang tenaga pendidik, 4 orang komite sekolah, 20 orang peserta didik, dan 3 orang tenaga non kependidikan
b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran	3	1	2	3
			Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran,	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
1. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian				
	wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri		dan kerusakan lingkungan hidup pada 1 (satu) komponen	kerusakan lingkungan hidup pada 2 (dua) komponen	kerusakan lingkungan hidup pada 3 (tiga) komponen.
c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3	1	2	3
			Adanya ketuntasan minimal belajar pada kurang dari 100% dari mata pelajaran wajib atau kurang dari 100% dari muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian				
Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputiKesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, tersedianya sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah,	a. Sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % dari total anggaran sekolah.	5	1	3	5
			Memiliki anggaran untuk PPLH sebesar 10 - 15% dari total anggaran sekolah.	Memiliki anggaran untuk PPLH hidup sebesar >15- <20 % dari total anggaran sekolah.	Memiliki anggaran untuk PPLH hidup sebesar ≥ 20 % dari total anggaran sekolah.
	b. Anggaran sekolah dialokasikan secara proporsional untuk	5	1	3	5
			Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara	Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara	Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian				
peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.	kegiatan: 1) kesiswaan; 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran 3) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, 4) sarana dan prasarana, 5) budaya dan lingkungan sekolah, 6) peran masyarakat dan kemitraan, 7) peningkatan dan pengembangan mutu.		proporsional untuk 1-3 kegiatan	proporsional untuk 4-5 kegiatan	proporsional untuk 6-7 kegiatan

B. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian				
a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajara;	70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif antara lain: demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, praktek lapangan, penugasan, observasi, project percontohan, dll.	2	0.5	1	2
			40 - 50 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.	>50 % - <70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.	≥ 70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian				
b. Mengembangkan isu lokal dan/atau isu global sebagai materi pembelajaran LH sesuai dengan jenjang pendidikan;	70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2	0.5	1	2
			40 - 50 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	>50 % - <70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup	70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	0.5	0.75	1
			40 - 50 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	>50 % - <70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas.	70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1	0.5	0.75	1
			40 - 50 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	>50 % - <70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	≥70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
e. Mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup	Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:	1	0.5	0.75	1
			Prosentase tenaga pendidik yang mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait	Prosentase tenaga pendidik yang mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait	Prosentase tenaga pendidik yang mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup	1) SD/MI sebesar 50% 2) SMP/MTs sebesar 40% 3) SMA/MA sebesar 30% 4) SMK/MAK sebesar 30%		dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: SD/MI sebesar 30%-<40% SMP/MTs sebesar 20%-<30% SMA/MA sebesar 10%-<20% SMK/MAK sebesar 10%-<20%	dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut : a. SD/MI sebesar 40%-<50% b. SMP/MTs sebesar 30%-<40% c. SMA/MA sebesar 20%-<30% d. SMK/MAK sebesar 20%-<30%	dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut : a. SD/MI sebesar ≥50% b. SMP/MTs sebesar ≥40% c. SMA/MA sebesar ≥30% d. SMK/MAK sebesar ≥30%
f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup.	Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui: 1) majalah; 2) dinding; 3) buletin sekolah; 4) pameran; 5) web-site; 6) radio; 7) TV; 8) surat kabar; 9) jurnal; dll	1	0.5 Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 1-3 media	0.75 Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 4-6 media	1 Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 7-9 media
g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.	2	0.5 40 - 50 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.	1 >50 % - <70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.	2 ≥70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian				
a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain : makalah, Puisi/ Sajak, Artikel, Lagu, hasil Penelitian, gambar, seni tari, produk daur ulang, dll	3	1	2	3
			10 % - <30 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30 % - <50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.	50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup	4	2	3	4
			10 % - <30 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup	30 % - <50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup	≥50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup
c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media.	50 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui : majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	3	1	2	3
			10 % - <30 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	30 % - <50 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	≥50 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll

C. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah					
a. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah	80 % warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: piket kebersihan kelas, Jumat Bersih, lomba kebersihan kelas, kegiatan pemeliharaan taman oleh masing masing kelas, dll.	2	40 % - <60% warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.	60 %- <80% warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.	≥80 % warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.
b. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80 % warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain; pemeliharaan taman, tanaman obat keluarga, hutan sekolah. pembibitan, kolam, pengelolaan sampah, dll	2	40 % - <60% warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	60 %- <80% warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥80 % warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80 % kegiatan ekstra-kurekuler seperti pramuka, Karya Ilmiah Remaja, dokter kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, dll yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengomposan, tanaman obat	2	40 % - <60% kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	60 %- <80% kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥80 % kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah	keluarga, biopori, daur ulang, pertanian organik, biogas, dll				
d. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut: daur ulang sampah, pemanfaatan dan pengolahan air, karya ilmiah, karya seni, hemat energi, energi alternatif	2	0,5	1	2
			1-2 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3-4 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥ 5 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
e. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	1	0.5	0.75	1
			tenaga pendidik mengikuti 1 - < 4 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti 4 - <6 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti ≥ 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar
	peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	1	0.5	0.75	1
			peserta didik mengikuti 1 - < 4 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	peserta didik mengikuti 4 - <6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	peserta didik mengikuti ≥ 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
a. Memanfaatkan nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	2	0,5 1 (satu) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	1 2 (dua) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	2 3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup
b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	3 (tiga) mitra yang mendukung kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti: pelatihan yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dll	2	0,5 1 (satu) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 2 (dua) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 3 (tiga) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2	0,5 1 (satu) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 2 (dua) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
d. Menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, Seperti: seminar, workshop, lokakarya, dll		2	0,5	1
			1 (satu) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup,	2 (dua) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup,	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup,
e. Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti: bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, bio gas, dll	2	0,5	1	2
			1 (satu) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,	2 (dua) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

D. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan					
Implementasi	Pencapaian				
a. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah	5	1	3	5
			Tersedianya 1-2 sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana	Tersedianya 3 -5 sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana	Tersedianya ≥ 6 sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan					
Implementasi	Pencapaian				
	(penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase , ruang terbuka hijau, kebisingan/ getaran/radiasi, dll				
b. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/taman/ kebun sekolah, <i>green house</i> , tanaman obat keluarga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll)	5	1 Tersedianya 1-2 sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,	3 Tersedianya 3 -5 sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,	5 Tersedianya ≥ 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan					
Implementasi	Pencapaian				
a. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, seperti: a. Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami; b. Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan	2	0,5 Terpelihara nya 1 (satu) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya	1 Terpelihara nya 2 (dua) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya	2 Terpelihara nya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan					
Implementasi	Pencapaian				
	penghijauan; c. Menggunakan <i>paving block</i> , rumput.				
b. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah	Tersedianya 4 (empat) unsur dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah, antara lain: a. penanggung jawab; b. pelaksana; c. pengawas; d. tata tertib.	3	1 Tersedianya 2 (dua) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana	2 Tersedianya 3 (tiga) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana	3 Tersedianya 4 (empat) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana
c. Memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor	3	1 10% - <15% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor	2 15% - <20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor	3 ≥ 20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi: a. Kantin tidak menjual makanan/ minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. b. Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/terkontaminasi, kadaluarsa.	2	0,5 Kantin melakukan 1 (satu) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	1 Kantin melakukan 2 (dua) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	2 Kantin melakukan 3 (tiga) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan					
Implementasi	Pencapaian				
	c. Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti: plastik, styrofoam, aluminium foil.				

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA

TAHAPAN PENILAIAN PROGRAM ADIWIYATA

Penilaian Program Adiwiyata dilakukan dengan tahapan:

A. Sekolah Adiwiyata kabupaten/Kota

1. Sekolah menyampaikan permohonan penilaian sebagai sekolah adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota.
2. Calon sekolah adiwiyata menyampaikan dokumen berdasarkan lembar evaluasi sekolah adiwiyata dengan melampirkan bukti fisik berupa kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Aksi Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
3. Bagi sekolah yang memenuhi standar administrasi dilakukan verifikasi dengan menggunakan lembar evaluasi sekolah adiwiyata.
4. Tim penilai adiwiyata kabupaten/kota melakukan verifikasi terkait pencapaian dari 4 (empat) komponen adiwiyata, yaitu:
 - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
 - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
 - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
 - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata kabupaten/kota menetapkan nilai pencapaian sekolah.
6. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/kota apabila mencapai nilai paling rendah 56 (lima puluh enam), yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).
7. Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten/kota dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi, apabila sudah mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat) yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

B. Sekolah Adiwiyata Provinsi

1. Tim penilai adiwiyata provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diusulkan oleh kabupaten/kota, dan laporan kegiatan pembinaan.
2. Calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim penilai adiwiyata provinsi menetapkan nilai pencapaian sekolah.
4. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi apabila mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat), yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).
5. Sekolah adiwiyata tingkat provinsi dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional, apabila sudah mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua) yaitu

90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

C. Sekolah Adiwiyata Nasional

1. Tim penilai adiwiyata nasional melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diusulkan oleh provinsi dan laporan kegiatan pembinaan.
2. Calon sekolah adiwiyata nasional yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim penilai adiwiyata nasional menetapkan nilai pencapaian sekolah.
4. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata nasional apabila mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua), yaitu 90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

D. Sekolah Adiwiyata Mandiri

1. Tim penilai adiwiyata nasional menetapkan sekolah adiwiyata nasional yang akan dilakukan verifikasi berdasarkan usulan dari provinsi.
2. Sekolah adiwiyata nasional yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata mandiri apabila sekolah adiwiyata nasional tersebut telah melakukan pembinaan terhadap sekolah lain, paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah, dan sekolah yang dibina tersebut telah mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten/kota.
4. Sekolah adiwiyata mandiri dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan tingkat *Asean Eco School*.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Hamida Aprillia Jayantie

Tempat Lahir : Malang

Tanggal Lahir : 25 April 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Golongan Darah : O

Warga Negara : Warga Negara Indonesia

Alamat asal : Perumahan Saptoraya Blok BO-6b RT 03 RW 15
Kel. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang

Email : myda.aprillia25@gmail.com

Nomor HP : 085232196966

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Saptorenggo IV Kabupaten Malang
2. SMP Negeri 14 Kota Malang
3. SMA Negeri 10 Kota Malang

